

# VERITY

Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional

**India-Japan Maritime Security Cooperation in Indo-Pacific:  
Creating a Maritime Power Nexus in Balancing China (2012-2017)**

*Anak Agung Banyu Perwita, Joseph Tertia*

**Arab Saudi dan Krisis Harga Minyak Tahun 2014-2016 (Saudi Arabia and the Oil Price Crisis of 2014-2016)**

*Wildan Faisol*

**Negotiating between Identities: Indonesia's Chinese-Language Newspapers  
in the Post-New Order Era**

*Yuhao Wen*

**Dari Tionghoa ke Tjina: Telaah Sejarah terhadap Demonisasi Etnis Tionghoa  
di Indonesia (From Tionghoa to China: A Historical Review of the Demonization of Chinese Ethnicity in Indone-  
sia)**

*Michael .J. Kristiono*

**Pengaruh Implementasi Kesepakatan *Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership  
Agreements (FLEGT VPA)* terhadap Kebijakan Penggunaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) pada  
Ekspor Kayu dan Produk Kayu Indonesia ke Uni Eropa**

***(The Effect of Forest Law Enforcement, Governance, and Trade Voluntary Partnership Agreements (FLEGT  
VPA) on the Policy of Using the Timber Verification and Legality System (SVLK) on Export of Indonesian Timber  
and Wood Production to the European Union)***

*Firman Daud Lenjau Lung*

# VERITY

Verity diterbitkan oleh Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli. Jurnal ini diterbitkan sebagai sarana pertukaran dan penyebaran gagasan-gagasan ilmiah dalam bidang Hubungan Internasional dan bidang-bidang lain yang terkait dengannya.

Pelindung	: Aleksius Jemadu
Penanggung Jawab	: Susy Tekunan
Mitra Bestari	: C.P.F.Luhulima Hariadi Wirawan Ian Robert Cosh Makmur Keliat
Pemimpin Redaksi	: Susy Tekunan
Redaksi	: Amelia Liwe Edwin Tambunan Elyzabeth Bonethe Nasution Firman Daud Gusti Patading Hetty Antje Geru Ignatius Ismanto Johanes Herlijanto Karina Putri Indrasari Merly Yunus Seru Reggianie Christy Natalia Richard Daulay Roy Pratikno Roy Andy Panjaitan Yosef Djakababa
Kreatif/Disain	: Sigit Pamungkas
Administrasi & Keuangan	: Elfi Fransisca K. Endah P.
Sirkulasi & Distribusi	: Ria Handayani Marbun Rouli Afrilya Gultom

## **Alamat Redaksi:**

Jurnal Ilmiah Verity  
Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pelita Harapan  
UPH Tower, Lippo Village  
Karawaci, Tangerang 15811  
Telp. (021) 5460901; Faks. (021) 5460910; E-mail: [verity@uph.edu](mailto:verity@uph.edu)

## DAFTAR ISI

Tahun 10, Nomor 19, Januari – Juni 2018  
P-ISSN: 2086-5554 | E-ISSN: 2614-0470

Pengantar Redaksi

**India-Japan Maritime Security Cooperation in Indo-Pacific:  
Creating a Maritime Power Nexus in Balancing China (2012-2017)**

Anak Agung Banyu Perwita, Joseph Tertia..... 1-12

**Arab Saudi dan Krisis Harga Minyak Tahun 2014-2016  
(Saudi Arabia and the Oil Price Crisis of 2014-2016)**

Wildan Faisol..... 13-24

**Negotiating between Identities: Indonesia’s Chinese-Language Newspapers  
in the Post-New Order Era**

Yuhao Wen  
..... 25-33

**Dari Tionghoa ke Tjina: Telaah Sejarah terhadap Demonisasi Etnis Tionghoa  
di Indonesia**

*(From Tionghoa to China: A Historical Review of the Demonization of Chinese Ethnicity in  
Indonesia)*

Michael J.  
Kristiono..... 34-48

**Pengaruh Implementasi Kesepakatan *Forest Law Enforcement, Governance and Trade  
Voluntary Partnership Agreements (FLEGT VPA)* terhadap Kebijakan Penggunaan Sistem  
Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) pada Ekspor Kayu dan Produk Kayu Indonesia ke  
Uni Eropa**

*(The Effect of Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership  
Agreements (FLEGT VPA) on the Policy of Using the Timber Verification and Legality  
System (SVLK) on Export of Indonesian Timber and Wood Products to the European Union)*  
Firman Daud Lenjau Lung..... 49-62

## PENGANTAR REDAKSI

Di tahun ke-10 edisi nomor 19 Jurnal Verity Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, tim redaksi menghadirkan 5 artikel yang mendalami pembahasan mengenai isu kontemporer dalam studi hubungan internasional yang lebih spesifik, seperti bidang kerja sama maritim, krisis harga minyak, dan hal-hal di bidang perpolitikan Indonesia yang fokus pada etnis Tionghoa. Selain itu, Jurnal Verity edisi kali ini juga membahas tentang implementasi kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam ekspor produk kayu yang merupakan salah satu sumbangsih terbesar dalam pendapatan ekonomi di Indonesia.

Tulisan pertama yang disajikan oleh Anak Agung Banyu Perwita membahas mengenai situasi kewanitaan Indo-Pasifik yang ditandai dengan makin meningkatnya peran Cina dibandingkan Amerika khususnya di Indo-Pasifik sehingga negara maju Asia lainnya seperti Jepang dan India tergerak untuk melakukan kerja sama yang memiliki kesamaan kepentingan dalam bidang kemaritiman. Implementasi kerja sama dalam bidang maritime tersebut, baik Cina maupun Jepang, dikarenakan kedua negara tersebut mulai khawatir dengan keberadaan Cina yang melakukan ekspansi maritim dan membuat kekuatan Cina diperhitungkan di wilayah Indo-Pasifik, khususnya dalam mengontrol asset perairan di Indo-Pasifik melalui kebijakan strategi *"Two Ocean"*. Teori yang dipakai oleh penulis adalah teori neorealisme yang memahami bahwa dalam politik internasional yang bersifat anarki membuat aktor negara selalu sadar akan keberadaan aktor lainnya sehingga dibutuhkan usaha untuk bertahan dalam persaingan mempertahankan kekuasaan aktor negara. Tidak hanya melihat dunia politik internasional yang anarki, Jepang dan India juga memiliki latar belakang sejarah dalam perselisihannya dengan Cina dalam konflik perbatasan. Menurut Anak Agung, Jepang dan India melakukan kerja sama dalam bidang keamanan maritim untuk memperkuat hubungan strategis bilateral dan mengimbangi kekuatan ekspansi maritim yang dilakukan oleh Cina.

Tulisan ke-2 selanjutnya oleh Wildan Faisol membahas tentang kiris harga minyak yang erat dengan negara Arab Saudi pada tahun 2014-2016 dengan menyoroti motivasi negara Arab Saudi yang juga memiliki pengaruh besar dalam organisasi OPEC yang memilih untuk mempertahankan harga minyak saat organisasi OPEC mencoba membatasi tingkat produksi minyak Arab Saudi. Tulisan Wildan Faisol didasarkan pada teori Stabilitas Hegemoni yang memberikan penceritaan bahwa suatu kekuatan hegemon dapat menciptakan tatanan ekonomi yang stabil dalam dunia internasional. Pengaruh Arab Saudi dalam OPEC dinilai oleh penulis karena tidak ada negara yang mampu mengimbangi control OPEC dalam sektor perminyakan internasional. Selain itu, Arab Saudi juga berupaya mencapai kepentingan politiknya melalui kontrolnya terhadap bidang politik dan ekonomi negara rivalnya yaitu Irak dan Iran. Selanjutnya tulisan ke tiga yang dipenakan oleh Yuhao Wen membahas tentang identitas orang Tionghoa-Indonesia di era Pasca-Orde Baru yang dipertanyakan kembali identitasnya yang dituangkan dalam media etnis yang berbahasa Mandarin sebagai bahasa utama etnis Tionghoa. Era Pasca-Orde Baru lebih menekankan multikulturalisme yang tentunya memberikan harapan yang baru bagi orang Tionghoa di Indonesia untuk mengekspresikan kebudayaan aslinya melalui penyebaran media etnis dalam bentuk surat kabar ataupun majalah. Sebagaimana besar hasil analisa artikel tersebut berasal dari penelitian dokumentasi dan arsip, analisa media serta interview yang dilakukan oleh penulis di tahun 2015. Penulis mengakui dalam analisa artikel tersebut sangatlah

kompleks untuk mengidentifikasi identitas orang Tionghoa-Indonesia. Pada akhirnya etnis Tionghoa-Indonesia dalam mengekspresikan budayanya melalui media publik sudah lebih terfokus pada diskusi situasi lokal.

Pembahasan tentang budaya Tionghoa di Indonesia juga disajikan oleh Michael J. Kristiono. Dalam tulisan tersebut penulis mengangkat isu sejarah diskriminasi dan rasisme etnis Tionghoa di Indonesia pada era Orde Baru. Menurut penulis, sentiment terhadap etnis Tionghoa di Indonesia tidak hanya berdampak pada tatanan sosial budaya, tetapi juga tatanan politik internasional sebagaimana yang digambarkan dalam sejarah pada saat terjadinya pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia dan RRT di tahun 1967. Tulisan ke-5 yang ditulis oleh Firman Daud membahas tentang implementasi tata hukum hutan dalam mengelola dan melakukan perdagangan kayu Indonesia ke Uni Eropa. Dalam artikel tersebut penulis mencoba untuk menjelaskan pengaruh implementasi kebijakan perdagangan oleh pemerintah Indonesia dalam mengekspor kayu yang diatur dalam *Voluntary Partnership Agreement on Forest Law Enforcement Governance and Trade* (FLEGT VPA) untuk mencegah perdagangan kayu secara illegal. Bagaimana pun dalam implementasinya masih terdapat banyak kendala sehingga penulis juga menjabarkan efektivitas ekspor perdagangan kayu yang kemudian mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan Uni Eropa.

➤ **Redaksi**

# INDIA-JAPAN MARITIME SECURITY COOPERATION IN INDO-PACIFIC: CREATING A MARITIME POWER NEXUS IN BALANCING CHINA (2012-2017)

Anak Agung Banyu Perwita, Joseph Tertia  
President University  
aabanyu.perwita@gmail.com

## ABSTRACT

Di abad ke-21, keadaan keamanan Indo-Pasifik mengalami perubahan yang pesat, terutama dikarenakan oleh ekspansi maritim China dan melemahnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan. Meresponi situasi ini, India dan Jepang sebagai kekuatan kawasan memutuskan untuk bekerja sama. Berdasarkan pidato Perdana Menteri Shinzo Abe pada 2007, India dan Jepang memiliki titik temu di bidang keamanan maritim. Mengikuti kembali berkuasanya Perdana Menteri Shinzo Abe pada 2012, Jepang telah memperluas lingkup keamanannya di mana Jepang memandang pentingnya India sebagai mitra keamanan. Sementara itu, kebijakan ‘Act East’ Perdana Menteri Narendra Modi telah mendorong India untuk mengambil peran yang lebih proaktif ke kawasan bagian timur, termasuk Jepang. India dan Jepang kemudian menyelaraskan kebijakan strategis mereka untuk memperkuat kerja sama maritim. Artikel ini menjelaskan implementasi kerja sama maritim India-Jepang dalam menyeimbangkan China di Indo-Pasifik.

**Keywords:** Maritime security, Maritime security cooperation, India-Japan relations, Indo-Pacific security environment, China’s threat

Geopolitics is often being used to define particular issue in International Relations. The political practice of a state over a territory has become one of the most important aspects in determining the current situation on international politics.<sup>1</sup> Region with strategic location tend to be contested with state actors in order to achieve their national interests. States with geographical advantage will often influence – or included – in the strategic thinking of other states. Meanwhile superpower states in the region will have significant importance to the regional geopolitics.<sup>2</sup> The strategic importance of a region will then result in how state actors plan their territorial

strategies which result to the dynamics of geopolitics.<sup>3</sup>



Figure 1 Map of Indo-Pacific

In the 21st century, many nation states have shifted its attention towards Indo-Pacific.<sup>4</sup> The region sits at the intersection of major international shipping lines and is contested with prominent state

<sup>1</sup> Fox, William. (1985). *Geopolitics and international relations*. In C. E. Zоргbibe, *on geopolitics: classical and nuclear* (pp. 15-44). The Hague: Martinus Nijhoff.

<sup>2</sup> Zoppo, Ciro E.. (1985). *Classical geopolitics and beyond*. In C. E. Zоргbibe, *on geopolitics: classical and nuclear* (pp. 1-14). The Hague: Martinus Nijhoff.

<sup>3</sup> Schlovin, Soren. (2016). *Geopolitics: an overview of concepts and empirical examples from international relations*. *FIIA Working Paper*, 5-7.

<sup>4</sup> Medcalf, Rory. (2013). *The indo-pacific: what's in a name?* *The American Interest*, pg. 58-66.

actors such as China, US, India, Japan, Australia and the ASEAN member states. Within this situation, the geopolitics of Indo-Pacific has become very complex, especially under the notion of power competition between China and the US. China's rise and maritime expansion have urged the US to reengage its Indo-Pacific partners, which then led China to expand its influence even more. Other regional states that are concerned with China's growing influence and perceived the decline of US' power in the region, then seek to comply to China or to increase their power to balance China.

The most notable states affected by China-US competition are India and Japan. The two states are concerned on China's expanding presence and are in close cooperation with the US. However in regards to the shift of balance of power in Indo-Pacific, India and Japan have sought to be less interdependent with US and thus increased their own capability. As maritime nations, the two states prioritized to increase their maritime security operations in the region to preserve the sea lines of communications (SLOCs) for achieving their national interests. In 2007, Prime Minister Shinzo Abe delivered a speech entitled "Confluence of the Two Seas" at the Indian Parliament that highlighted how India and Japan have a converging maritime security perspective in Indo-Pacific.<sup>5</sup> This speech would later become the foundation of India-Japan maritime security cooperation. Concerns on China's expanding maritime presence and commonalities in maritime security have then reinforced the maritime

---

<sup>5</sup> Abe, Shinzo. Confluence of the two seas. *Speech by H.E.Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan at the Parliament of the Republic of India. Ministry of Foreign Affairs of Japan.* August 22, 2007. Accessed October 16, 2017. <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html>.

security cooperation between India and Japan.

### **Maritime Security Cooperation as a Balancing Act**

In order to further understand this research, the author tries to explain the theory in the topic discussed. The first one is Neorealism. According to Kenneth Waltz, Neorealism or Structural Realism believes that international politics is depicted by an anarchic structural system where nation states are seen as individual actor seeking for survival.<sup>6</sup> There are three systems in Neorealism: unipolarity where there is only one superpower states, bipolarity where two superpower states competing for hegemony, and multipolarity where there are more than two states competing for power.<sup>7</sup>

Further, Waltz explains that the power relations in international system is defined by the concept of Balance of Power. In Balance of Power, state actors are given two options, which are 'balancing' or 'bandwagoning', towards the emerging power in international system. Through Neorealism perspective, state actors will tend to balance the emerging power that pose the biggest potential threat.<sup>8</sup> In terms of balancing, T.V. Paul argues that states may resort to traditional hard balancing where states tend to create strategic military cooperation and open arms buildup to confront the emerging power.<sup>9</sup> Then there is

---

<sup>6</sup> Waltz, Kenneth. (1988). The origins of war in neorealist theory. *Journal of Interdisciplinary History*, Vol. 18, No. 4. pg. 615-628.

<sup>7</sup> *Ibid.*

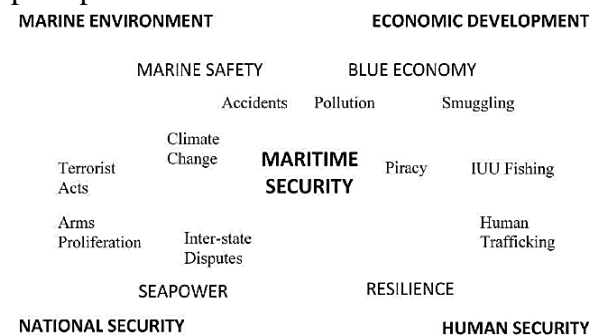
<sup>8</sup> Levy, J. S. (2004). What do great powers balance against and when? In T. Paul, J. J. Wirtz, & M. Fortmann, *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century* (pp. 29-51). California: Stanford University Press.

<sup>9</sup> T., Paul. (2004). Introduction: the enduring axioms of balance of power theory and their contemporary

soft balancing in which states create bloc or collaborate in regional or international institution to give political pressure to the emerging power.

The author then uses national interest and threat perceptions to further identify states' behavior within Balance of Power concept. National interest and threat perceptions of the certain states will determine the set of approach or policy, either in balancing or bandwagoning act.<sup>10</sup>

As the discussion in this research revolves around the maritime area of Indo-Pacific, the writer uses maritime security as the set of approach. The traditional definition of maritime security is the use of seapower to ensure control of the sea for naval supremacy and commerce.<sup>11</sup> However according to Christian Bueger, maritime security extends beyond the traditional security dimension. Bueger connects the issues relating to maritime security with a matrix as seen in Diagram 1.<sup>12</sup> The matrix explains how maritime security is able address several issues and assist which issue should be prioritized by the maritime actor based on their national interest and threat perceptions.



relevance. In T. Paul, J. J. Writz, & M. Fortmann, *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century* (pp. 1-28). California: Stanford University Press.

<sup>10</sup> Levy, J. S. (2004).

<sup>11</sup> Mahan, Alfred T. *The influence of sea power upon history, 1660-1783*. Boston: Little, Brown and Company. (1918)

<sup>12</sup> Bueger, C. (2015). *What is maritime security*. Cardiff: Cardiff University.

Diagram 1: Maritime security matrix by Christian Bueger.<sup>13</sup>

For the purpose of this article, the authors then combines the maritime security with cooperative security to explain Maritime Security Cooperation. David Dewitt explains that in cooperative security, nation states must first engage in bilateral security cooperation activities that will enable them to create an inclusive relations, which eventually become the foundation for multilateral security frameworks.<sup>14</sup> In terms of maritime security, cooperative security serves as bridge that connects maritime security understanding of one state to the others. Chris Rahman explains that maritime security cooperation has a comprehensive approach to address the growing contemporary maritime security issues.<sup>15</sup> In establishing an effective maritime security cooperation, states need to set up a strategic bilateral relations and later develop it to create an inclusive regional security order.<sup>16</sup>

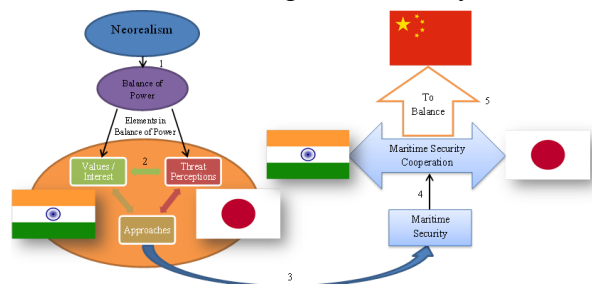


Diagram 2: Theoretical framework mind map.<sup>17</sup>

From the above diagram, the writer uses Balance of Power concept of international system as the basic theory in

<sup>13</sup> Bueger, C. (2015).

<sup>14</sup> Dewitt, David. (1994). Common, comprehensive, and cooperative security. *The Pacific Review*, Vol. 7. pg. 1-15.

<sup>15</sup> Rahman, Chris. (2009). *Concepts of maritime security: a strategic perspective on alternative visions for good order and security at sea, with policy implications for New Zealand*. Wellington: Victoria University.

<sup>16</sup> *Ibid*.

<sup>17</sup> The theoretical framework's mindmap is derived from Andrew Heywood's book on Global Politics concepts and theories (Heywood, Andrew. (2011). *Global Politics*. New York: Palgrave Macmillan).



this research. Balance of Power explains the behavior of state actors in the existing international system. There are two elements that would determine the behavior of state actors, which are the National Interest and Threat Perceptions. Those two elements would later result in set of approach or policy, which in this research is Maritime Security. The concept of Maritime Security would be combined with Cooperative Security framework to explain Maritime Security Cooperation. As a mean of balancing, Maritime Security Cooperation serves as the tool for two or more states to form a partnership in confronting the emerging power.

This theoretical approach would then explain the topic in this research as follows: in a multipolar Indo-Pacific where US power is declining and China is thriving to become the regional hegemon, India and Japan which have commonalities in maritime security and concerned on China have then decided to cooperate in maritime security to balance China.

### Implementation of India-Japan Maritime Security Cooperation to Balance China in Indo-Pacific

The security environment of Indo-Pacific is rapidly changing, mainly due to China's rise as military superpower in the region. China is seeking to assert control in the waters of Indo-Pacific through the "two-ocean" (*liang ge haiyang*) strategy.<sup>18</sup> However China's assertive actions in East and South China Seas have caused security concerns which disturb the SLOCs stability of Indo-Pacific. Unilaterally, China claims

<sup>18</sup> The State Council of the People's Republic of China. *Full text of the Vision for Maritime Cooperation under the Belt and Road Initiative*. The state council of the people's Republic of China. June 20, 2017. Accessed December 9, 2017. [http://english.gov.cn/archive/publications/2017/06/20/content\\_281475691873460.htm](http://english.gov.cn/archive/publications/2017/06/20/content_281475691873460.htm)

the territorial water of those regions which are still debated by the regional states. The claims have then sparked tension with Japan in East China Sea and with the Southeast Asia littoral states in South China Sea. Beyond that, China is also keen to increase their naval presence across the Indian Ocean. China has built naval ports in Myanmar, Sri Lanka, and most notably in Pakistan, then opened up its first military base overseas in Djibouti.<sup>19</sup>

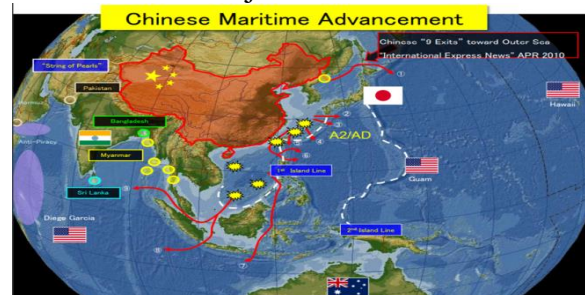


Figure 2: The Chinese naval routes that span across the Indo-Pacific maritime region.<sup>20</sup>

The growing security concerns in Indo-Pacific have then prompted the US to reengage its Indo-Pacific partners through the Rebalance policy. The US is seeking to ensure the American influence in the region, while checking on China's rise and expansion.<sup>21</sup> The US cooperation with Japan, Australia, ROK, Singapore, Thailand, and the Philippines remain as the foundation of strategic actions in Indo-Pacific. Albeit the Rebalance policy, the US influence in the region is declining vis-à-vis China.<sup>22</sup> Moreover under the new leadership of

<sup>19</sup> Scott, David. Chinese maritime strategy for the Indian ocean. *Center for International Maritime Security*. November 28, 2017. Accessed December 9, 2017. <http://cimsec.org/chinese-maritime-strategy-indian-ocean/34771>

<sup>20</sup> Kaneda, Hideki. (2016). Chain of maritime security coalitions. *DPG Conference Reports*, Vol.1 Issue 1. pg 55-66

<sup>21</sup> Campbell & Andrews. (2013). *Explaining the US 'pivot' to Asia*. London: Chatam House

<sup>22</sup> Mishra, Vivek. (2016). US power and influence in the Asia-Pacific region: the decline of 'alliance mutuality'. *Strategic Analysis*, Vol. 40 Issue 3. pg 159-172

President Donald Trump, uncertainty looms over the US commitment in Indo-Pacific.<sup>23</sup> Under the notion of shifting balance of power from US to China in Indo-Pacific, other regional states have to take certain actions in responding the situation, including India and Japan. As prominent maritime nation, India has vast amount of interest in the region. India heavily depends on SLOCs of Indo-Pacific, particularly for protecting its territorial sovereignty and commercial interests such as energy and merchandise trades.<sup>24</sup> Another important maritime actor in Indo-Pacific is Japan. In 2016, Japan has released the ‘Free and Open Indo-Pacific Strategy’ which prioritizes Japan’s maritime interest in the region.<sup>25</sup> Japan sees that the security environment surrounding the nation is declining, especially with China roaming around in Japan’s territorial water and the nuclear activity in Korean Peninsula. With the threats looming in Japan’s surrounding environment, thus they need to enhance their maritime force capability.<sup>26</sup> Japan also depends on seaborne economic activities, as around 80% of its energy imports are transported through the sea.<sup>27</sup>

As two largest maritime democracies in Indo-Pacific, India and Japan have recognized their common maritime interests. The commonalities were first unveiled

during Prime Minister Abe’s ‘‘Confluence of the Two Seas’’ speech.<sup>28</sup> Both states recognize the strategic imperative of each other’s maritime capacity in preserving the maritime region with rules-based order.<sup>29</sup> India and Japan also have a rather similar threat perceptions towards China. Both India and Japan have historical disputes with China. China also has border conflict with India in Doklam Plateau and with Japan in Senkaku/Diayou Islands. Then, China’s increasing naval modernization has at least been mentioned in both India and Japan’s perception towards China.<sup>30</sup> Lastly, the two states are also concerned on the growing tension in South China Sea, emphasizing on prevention of ‘unilateral actions that raise tensions’ in which it pointed towards China’s assertiveness.<sup>31</sup>

In their respective maritime security strategy, both India and Japan committed to take larger security roles in the region. India through *Ensuring Secure Seas* strategy seeks to become a maritime net security provider for its maritime.<sup>32</sup> Thus incorporating the

<sup>23</sup> Marston, Hunter. Forecasting U.S.-Asia relations under Trump. *Brookings Institution*. April 10, 2017. Accessed December 13, 2017. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/04/10/forecasting-u-s-asia-relations-under-trump/>.

<sup>24</sup> India Ministry of Defence (Navy). (2015). *Ensuring secure seas: Indian maritime security strategy*. pg. 9.

<sup>25</sup> International Cooperation Bureau. (2017). *Priority policy for development cooperation FY2017*. Japan Ministry of Foreign Affairs.

<sup>26</sup> Japan Ministry of Defense. (2017). *Defense of Japan 2017*. pg. 45-47.

<sup>27</sup> International Energy Agency. (2016). *Energy policies of IEA countries: Japan 2016 review*. Paris: OECD/IEA.

<sup>28</sup> Abe, Shinzo. *Confluence of the Two Seas*. Speech by H.E.Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan at the Parliament of the Republic of India. Ministry of Foreign Affairs of Japan. August 22, 2007. Accessed October 16, 2017. <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html>.

<sup>29</sup> Garege, Ramanand. (2016). The India-Japan strategic partnership: evolving synergy in the Indo-Pacific. *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*, 8:3. pg. 257-266.

<sup>30</sup> Based on India Ministry of Defence. (2017). Annual Report 2016-2017. pg. 4 and Japan Ministry of Defense. (2017). pg. 108.

<sup>31</sup> India Ministry of External Affairs. *India-Japan joint statement during the visit of Prime Minister to Japan*. November 11, 2016. Accessed December 14, 2017. <http://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/27599/IndiaJapan+Joint+Statement+during+the+visit+of+Prime+Minister+to+Japan>.

<sup>32</sup> Limaye, Satu. (2017). *Weighted West, focused on the Indian ocean and cooperating across the Indo-Pacific: the Indian navy's new maritime strategy, capabilities, and diplomacy*. Arlington: CNA Analysis and Solutions.

‘Act East’ policy, India Security and Growth for All (SAGAR) concept to develop the Indian Ocean littoral states, as well as to provide maritime security in Indian Ocean.<sup>33</sup>

As for Japan, the reinterpretation of the Article 9 of the Constitution has expanded the scope of its security activities to include military operations when armed attack occurred to foreign country in close relationship with Japan.<sup>34</sup> Under the ‘Free and Open Indo-Pacific Strategy’, Japan is set to provide collective maritime security to the Asian countries and beyond to African continent.

Following the return of Prime Minister Abe for his second premiership, Japan reaffirmed its stance to acknowledge India as important security partner.<sup>35</sup> India’s engagement to Japan was also accelerated under Prime Minister Modi’s Act East policy. The two prime ministers share similar interest in expanding their respective nations as maritime power in the region to eventually maintain the stability in the Indo-Pacific. Under Prime Minister Abe and Prime Minister Modi, India and Japan have begun to intensify their maritime security cooperation.<sup>36</sup>



Figure 3: India-Japan Maritime Security Cooperation Timeline.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Japan Ministry of Defense. (2013). *National security strategy*.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Shutaro Sano. (2017). *Japan-India security cooperation: building a solid foundation amid uncertainty*. Washington DC: CSIS.

<sup>37</sup> Based on the Joint Statements of India and Japan.

As can be seen in the timeline in Figure 3, India and Japan have always expanded their scope of maritime security cooperation. In 2014, they elevated their relations to ‘Special Strategic and Global Partnership’, then followed by establishing ‘India and Japan Vision 2025’ in the next year. The following year, the two states determined to align the Act East policy with Free and Open Indo-Pacific Strategy.<sup>38</sup> The purpose of this alignment is to create a regional framework in pursuance of connected and stable Indo-Pacific. The strategic alignment was finalized last September in India, with the Act East and Free and Open Indo-Pacific Strategy synergized in maritime security, Indo-Pacific connectivity, improving cooperation with ASEAN and its member states as maritime partners, and strategic information exchanges between India and Japan.<sup>39</sup>

In line with the balancing act, India and Japan have used their maritime security cooperation in hard balancing and soft balancing China. The implementation of India-Japan maritime security cooperation are underlined within their strategic alignments. The table below shows the framework of India-Japan maritime security cooperation in balancing China.

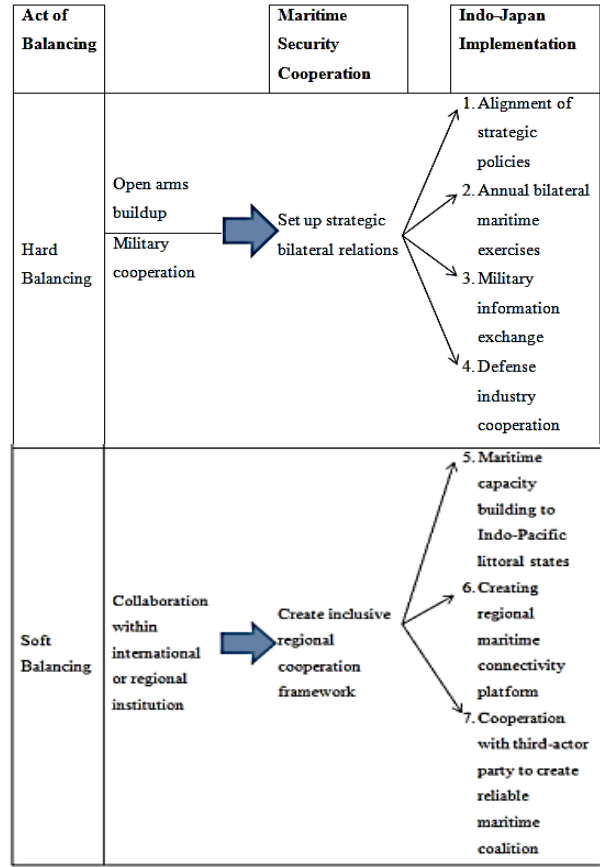


Table 2: Indo-Japan Maritime Security Cooperation as an Act of Balancing

India and Japan underlined the importance to conduct annual bilateral naval exercises, which aim to enhance their maritime operability in Indo-Pacific. Since 2012, India and Japan have conducted annual naval exercises under the name of Japan-India Maritime Exercise (JIMEX).<sup>40</sup> Besides the navies, they have also conducted *Sahyog-Kaijin* coast guard exercises.<sup>41</sup> Then in 2015, Japan is included as permanent

<sup>38</sup> Japan Ministry of Foreign Affairs. *Japan-India summit meeting*. November 11, 2016. Accessed January 23, 2018. [http://www.mofa.go.jp/s\\_sa/sw/in/page3e\\_000616.html](http://www.mofa.go.jp/s_sa/sw/in/page3e_000616.html).

<sup>39</sup> Japan Ministry of Foreign Affairs. *Japan-India joint statement: toward a free, open and prosperous Indo-Pacific*. September 14, 2017. Accessed January 23, 2018. <http://www.mofa.go.jp/files/000289999.pdf>.

<sup>40</sup> Press Information Bureau. Visit of INS Sahyadri at Sagami Bay, Japan. *India ministry of defence*. October 14, 2015. Accessed January 30, 2018. <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=128725>.

<sup>41</sup> Dennis S. Jesudasan. India, Japan conduct joint exercise sahyog-kaijin off cenai coast. *The Hindu*. September 23, 2016. Accessed January 30, 2018. <http://www.thehindu.com/news/national/India-Japan-conduct-joint-exercise-%E2%80%98Sahyog-Kaijin%E2%80%99-off-Chennai-coast/article14001430.ece>.

member in Malabar exercise.<sup>42</sup> Ever since then, India and Japan maritime forces conduct exercise at least three times per year. The joint maritime exercises are intended to prepare themselves against incoming attack from potential adversary, presumably China.<sup>43</sup> This is shown in the latest Malabar exercise, where it focused on Anti-Submarine Warfare (ASW) capabilities. The ASW exercise was aimed at the concern of China's submarines sightings in Indian Ocean.

Besides that, India and Japan are also starting to cooperate in defense industry. India is set to buy 12 US-2 amphibious aircrafts from Japan for USD1.3 billion.<sup>44</sup> Japan is also set to invest on maritime infrastructure in Andaman & Nicobar Islands. Its strategic location overlooking the Strait of Malacca to the east and the Indian Ocean to the west has made it as a suitable location for a surveillance base, especially to track China's naval activities in Indian Ocean.<sup>45</sup> India and Japan will be able to limit China's naval movement in the Indian Ocean and are able to increase their maritime operations in South China Sea.

Under the guise of regional approach in their bilateral cooperation, India and

Japan are trying to push away China's maritime influence in Indo-Pacific. The two states have determined to expand their bilateral cooperation to resolve the South China Sea dispute. Individually, both India and Japan provide maritime capacity building and joint exercise to Southeast Asia littoral states.<sup>46</sup> This is to decrease the Southeast Asia states dependency to China, while increasing India and Japan regional approach to balance China. Cooperatively, India and Japan also established Asia-Africa Growth Corridor which aims to develop and connect the African continent with Asia through the Indian Ocean.<sup>47</sup> The AAGC is simply an alternative option from India and Japan against China's Maritime Silk Road in its Belt and Road Initiative.<sup>48</sup> India and Japan have sought the AAGC to be the alternative and better form than the Belt and Road Initiative.

Lastly, India and Japan also expand their bilateral cooperation to include the US and Australia. The security setup of those four nations are known as Asia's Quadrilateral Security Diamonds.<sup>49</sup> The idea of the Quad was actually born in 2007, however it quickly dissolved after high pressure from China. Then on November 2017, the leaders of those four nations concluded their first meeting since 2007 discussing about the security concerns in

---

<sup>42</sup> Japan Ministry of Foreign Affairs. *Inaugural U.S.-India-Japan Trilateral Ministerial Dialogue*. September 30, 2015. Accessed January 31, 2018. [http://www.mofa.go.jp/sa/sw/page4e\\_000325.html](http://www.mofa.go.jp/sa/sw/page4e_000325.html).

<sup>43</sup> Shamshad A. Khan. (2015). *India-Japan cooperation towards a rule-based order in Asia-Pacific: mapping Indian and Japanese strategic thinking*. Tokyo: Japan Institute for International Relations.

<sup>44</sup> Ankit Panda. Will India and Japan finally conclude a long-pending US-2 amphibious aircraft defense deal?. *The Diplomat*. September 13, 2017. Accessed January 30, 2018. <https://thediplomat.com/2017/09/will-india-and-japan-finally-conclude-a-long-pending-us-2-amphibious-aircraft-defense-deal/>.

<sup>45</sup> Balaji Chandramohan. (2017). *The growing strategic importance of Andaman and Nicobar islands*. Dalkeith: Future Directions International

---

<sup>46</sup> Bibek Chand and Zenel Garcia. (2017). Power politics and securitization: the emerging Indo-Japanese nexus in Southeast Asia. *Asia & the Pacific Policy Studies*, Vol. 4, No. 2. pg. 310-324

<sup>47</sup> AAGC. (2017). *Asia Africa growth corridor vision document: partnership for sustainable and innovative development*. Ahmedabad: African Development Bank Meeting.

<sup>48</sup> Shahana Tankachan. (2017). *India-Japan AAGC (Asia Africa Growth Corridor): an assessment*. New Delhi: National Maritime Foundation.

<sup>49</sup> Shinzo Abe. *Asia's democratic security diamond*. Project syndicate. December 27, 2012. Accessed February 1, 2018. <https://www.project-syndicate.org/commentary/a-strategic-alliance-for-japan-and-india-by-shinzo-abe?barrier=accessreg>.

Indo-Pacific. Since then, the idea of Asia's Quad has been revived.<sup>50</sup> The Quad is strongly believed to be concerning on China's maritime expansion and presumably seeks to contain its advancement. In this regard, India-Japan maritime relations has provided the concept of free and open Indo-Pacific which is the aim of the Quad. To the very least, Australia and the US would back up the Indo-Japan maritime nexus, especially in checking the development of China maritime expansion.<sup>51</sup>

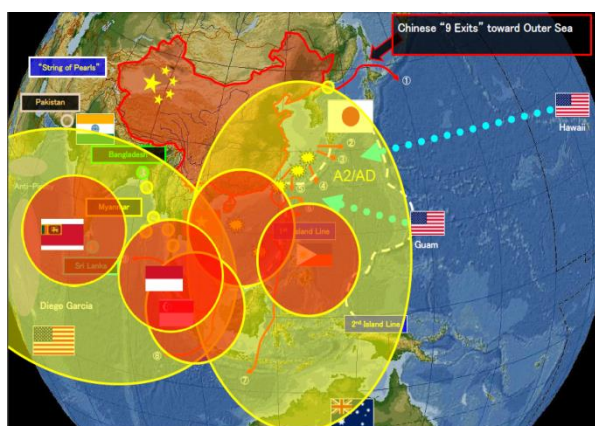


Figure 27: The Quadrilateral Chain of Coalition in Indo-Pacific to Balance China.<sup>52</sup>

states, maritime security is strategically important as they could share the responsibility of protecting their respective SLOCs. Through the balancing act, it can be identified that India and Japan use maritime security cooperation to strengthen their bilateral strategic relations and enhance their regional collaboration to balance China's maritime expansion. That being said, this research concluded that maritime security is an area of convergence for India and Japan, and enhancing maritime security cooperation is essential to balance China's maritime expansion on the backdrop of shifting Indo-Pacific security environment.

## Conclusion

This research discussed how India and Japan implement their maritime security cooperation as mean to balance China's expanding maritime influence in Indo-Pacific. China's expansive actions in Indo-Pacific clearly drives India and Japan to cooperate closely in preserving the stability of the region security environment. For both

<sup>50</sup> Harsh V. Pant. Take note: Asia's quad is back. *The Diplomat*. November 10, 2017. Accessed December 13, 2017. <https://thediplomat.com/2017/11/take-note-asias-quad-is-back/>

<sup>51</sup> Abhijit Singh. India wants a quad to counteract China's expanding influence. *Observer Research Foundation*. January 25, 2018. Accessed February 2, 2018. <http://www.orfonline.org/research/india-wants-quad-counteract-china-expanding-influence/>.

<sup>52</sup> Vice Adm. Hideki Kaneda (Retd.). (2016). Chain of maritime security coalitions. *DPG Conference Reports*, Vol.1 Issue 1, pg 55-66

## REFERENCES

- AAGC. (2017). *Asia Africa growth corridor vision document: Partnership for sustainable and innovative development*. Ahmedabad: African Development Bank Meeting.
- Abe, S. (2012, December 27). *Asia's democratic security diamond*. Retrieved from <https://www.project-syndicate.org/commentary/a-strategic-alliance-for-japan-and-india-by-shinzo-abe?barrier=accesspaylog>
- Abe, S. (2007, December 22). *Confluence of the two seas*. Retrieved from <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html>
- Bueger, C. (2015). *What is maritime security*. Cardiff: Cardiff University.
- Campbell, K., & Andrews, B. (2013). *Explaining the US 'pivot' to Asia*. London: Chatam House.
- Chand, B., & Garcia, Z. (2017). Power politics and securitization: The emerging Indo-Japanese nexus in Southeast Asia. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 4( 2), 310-324. <https://doi.org/10.1002/app5.180>
- Chandramohan, B. (2017). *The growing strategic importance of Andaman and Nicobar islands*. Dalkeith: Future Directions International.
- Dewitt, D. (1994). Common, comprehensive, and cooperative security. *The Pacific Review*, 7, 1-15. <https://doi.org/10.1080/09512749408719067>
- Garge, R. (2016). The India-Japan strategic partnership: Evolving synergy in the Indo-Pacific. *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*, 8(3), 257-266. <https://doi.org/10.1080/18366503.2016.1235362>
- Heywood, A. (2011). *Global politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- India Navy Ministry of Defence. (2016, January 25). *Ensuring secure seas: Indian maritime security strategy*. Retrieved from [https://www.indiannavy.nic.in/sites/default/files/Indian\\_Maritime\\_Security\\_Strategy\\_Document\\_25Jan16.pdf](https://www.indiannavy.nic.in/sites/default/files/Indian_Maritime_Security_Strategy_Document_25Jan16.pdf)
- India Ministry of External Affairs. (2016, November 2011). *India-Japan joint statement during the visit of prime minister to Japan*. Retrieved from <http://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/27599/IndiaJapan+Joint+Statement+during+the+visit+of+Prime+Minister+to+Japan>
- International Cooperation Bureau. (2017). *Priority policy for development cooperation*. Tokyo: Japan Ministry of Foreign Affairs.
- International Energy Agency. (2016). *Energy policies of IEA countries: Japan 2016 review*. Paris: OECD/IEA. <https://doi.org/10.1787/19900082>
- Japan Ministry of Defense. (2013). *National security strategy*.
- Japan Ministry of Defense. (2017). *Defense of Japan 2017*.
- Japan Ministry of Foreign Affairs. (2015, September 30). *Inaugural U.S.-India-Japan trilateral ministerial dialogue*. Retrieved from [http://www.mofa.go.jp/s\\_sa/sw/page4e\\_000325.html](http://www.mofa.go.jp/s_sa/sw/page4e_000325.html)
- Japan Ministry of Foreign Affairs. (2016, November 11). *Japan-India summit meeting*. Retrieved from [http://www.mofa.go.jp/s\\_sa/sw/in/page3e\\_000616.html](http://www.mofa.go.jp/s_sa/sw/in/page3e_000616.html)
- Japan Ministry of Foreign Affairs. (2017, September 14). *Japan-India joint statement: toward a free, open, and prosperous Indo-Pacific*. Retrieved from <http://www.mofa.go.jp/files/000289999.pdf>
- Jesudasan, D. S. (2016, September 23). *India, Japan conduct joint exercise 'Sahyog-Kaijin' off chennai coast*. Retrieved from <http://www.thehindu.com/news/national/India-Japan->

[conduct-joint-exercise-%E2%80%98Sahyog-Kaijin%E2%80%99-off-Chennai-coast/article14001430.ece](#)

- Kaneda, H. (2016). Chain of maritime security coalitions. *DPG Conference Reports*, 1(1), 55-66.
- Khan, S. A. (2015). *India-Japan cooperation towards a rule-based order in Asia-Pacific: mapping Indian and Japanese strategic thinking*. Tokyo: Japan Institute for International Relations.
- Limaye, S. (2017). *Weighted West, focused on the Indian ocean and cooperating across the Indo-Pacific: the Indian navy's new maritime strategy, capabilities, and diplomacy*. Arlington: CNA Analysis and Solutions.
- Mahan, Alfred T.. (1918). *The influence of sea power upon history, 1660-1783*. Boston: Little, Brown and Company. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511783289.002>
- Marston, H. (2017, April 10). *Forecasting U.S.-Asia relations under Trump*. Retrieved from <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/04/10/forecasting-u-s-asia-relations-under-trump/>
- Medcalf, R. (2013). The Indo-Pacific: what's in a name? *The American Interest*, 58-66.
- Mishra, V. (2016). US power and influence in the Asia-Pacific region: The decline of 'alliance mutuality'. *Strategic Analysis*, 40( 3), 159-172. <https://doi.org/10.1080/09700161.2016.1156251>
- Panda, A. (2017, September 13). *Will India and Japan finally conclude a long-pending US-2 amphibious aircraft defense deal?* Retrieved from <https://thediplomat.com/2017/09/will-india-and-japan-finally-conclude-a-long-pending-us-2-amphibious-aircraft-defense-deal/>
- Pant, H. V. (2017, November 10). *Take note: Asia's quad is back*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2017/11/take-note-asias-quad-is-back/>
- Paul, T., Wirtz, J. J., & Fortmann, M. (2004). *Balance of power: theory and practice in the 21st century*. California: Stanford University Press. <https://doi.org/10.2307/40204152>
- Press Information Bureau. (2015, October 14). *Visit of INS Sahyadri at Sagami Bay Japan*. Retrieved from <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=128725>
- Rahman, C. (2009). *Concepts of maritime security: A strategic perspective on alternative visions for good order and security at sea, with policy implications for New Zealand*. Wellington: Victoria University.
- Sano, S. (2017). *Japan-India security cooperation: Building a solid foundation amid uncertainty*. Washington DC: CSIS.
- Schlovin, S. (2016). Geopolitics: An overview of concepts and empirical examples from international relations. *FIIA Working Paper*, 5-7.
- Scott, D. (2017, November 28). *Chinese maritime strategy for the Indian ocean*. Retrieved from <http://cimsec.org/chinese-maritime-strategy-indian-ocean/34771>
- Singh, A. (2018, January 25). *India wants a quad to counteract China's expanding influence*. Retrieved from <http://www.orfonline.org/research/india-wants-quad-counteract-china-expanding-influence/>
- State Council of the People's Republic of China. (2017, June 2017). *Full text of the vision for maritime cooperation under the belt and road initiative*. Retrieved from [http://english.gov.cn/archive/publications/2017/06/20/content\\_281475691873460.htm](http://english.gov.cn/archive/publications/2017/06/20/content_281475691873460.htm)
- Tankachan, S. (2017). *India-Japan AAGC (Asia Africa Growth Corridor): An assessment*. New Delhi: Maritime Foundation.



Waltz, K. N. (1988). The origins of war in neorealist theory. *Journal of Interdisciplinary History*, 18( 4), 615-628. <https://doi.org/10.2307/204817>

Zorgbibe, C. E. (1985). *On geopolitics: classical and nuclear*. The Hague: Martinus Nijhoff.

# ARAB SAUDI DAN KRISIS HARGA MINYAK TAHUN 2014-2016 (SAUDI ARABIA AND THE OIL PRICE CRISIS OF 2014-2016)

Wildan Faisol  
Universitas Indonesia  
wildanfaisol9@gmail.com

## ABSTRACT

This article explains the Saudi Arabian oil crisis of 2014-2016. In 2014, the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) had been expected to cut production to stabilize the market and control the price of oil, but instead of reducing their own production, Saudi Arabia pushed OPEC to let the market control the price of oil. This raised the question of why Saudi Arabia led the OPEC push to let the price decline. The purpose of this article is to understand the reasons behind Saudi Arabia's efforts as prices plummeted from 2014 until 2016. This paper explores Saudi Arabia as the de facto leader of OPEC using geopolitical purposes to influence the rest of OPEC and to weaken their opponents including Iran, Iraq and Russia.

**Keywords :** OPEC, Oil Price, Saudi Arabia

## 1.1 Latar Belakang

Bagian awal dari paper ini menjelaskan tentang sejarah dari Organisasi Negara Eksportir Minyak atau yang disebut sebagai OPEC. Pada bagian ini juga dijelaskan fenomena naik dan turunnya harga minyak dunia serta beberapa kejadian yang mempengaruhinya fenomena tersebut. Pada bagian akhir juga akan ditutup dengan sebuah pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan sikap Arab Saudi sebagai negara dengan pengaruh terbesar di dalam OPEC.

Pada tahun 1960, 5 negara produsen minyak terbesar di dunia yaitu Irak, Iran, Arab Saudi, Venezuela dan Kuwait berkumpul pada konferensi Baghdad untuk menyepakati lahirnya organisasi internasional untuk negara-negara produsen minyak. Sejak didirikannya OPEC di tahun 1960, kerjasama antar negara produsen minyak telah stabil meskipun sempat terjadi beberapa kali konflik antar sesama anggota OPEC. Beberapa diantaranya ialah konflik antara Irak dengan Iran pada medio tahun 1980-an dan Iraq dengan Kuwait pada dekade tahun 1990-an. Namun konflik tersebut tidak bisa menghilangkan sisi kooperatif antar sesama negara anggota OPEC. Hal ini sangat berkaitan dengan

negara-negara anggota OPEC yang memiliki ketergantungan yang sama besarnya dengan pendapatan dari sektor penjualan Minyak dan berkerjasama juga untuk mengamankan harga minyak di angka yang tinggi, (Mabro, 2006).

Dalam perjalanannya, OPEC juga mengalami beberapa kali tantangan dalam menjaga harga minyak internasional. Harga minyak dunia mengalami kenaikan dalam dekade tahun 1990 hingga tahun 2000, dari harga 18 US\$/Barel ketika memasuki periode 1990-an. Naik kembali menjadi 21 US\$/Barel selama tahun 1991 akibat perang teluk. Kemudian mencapai 28 US\$/Barel semenjak tahun 2000, (MEES, 2003). Meskipun harga minyak dunia sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 1998 hasil dari krisis finansial Asia, tetapi harga tersebut kembali naik bahkan konsisten naik sejak tahun 2002 hingga 2008 sehingga menyentuh harga 147 US\$/Barel, (BBC, 2008). Namun krisis finansial global pada tahun 2008 yang membuat negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) menurunkan tingkat permintaan minyak membuat harga minyak kembali turun pada angka 33 US\$/Barel (Clifford, 2009).

Merasa terancam dengan harga minyak pada kisaran angka tersebut, para anggota OPEC berusaha mengurangi kuota tingkat produksi minyak agar dapat menstabilkan kembali harga minyak internasional, (Mouawad, 2008). Strategi ini kembali berhasil membuat harga minyak kembali merangkak naik menjadi 70 US\$/Barel dan mencapai 110 US\$/Barel pada tahun 2012, (Mouawad, 2009).

Memasuki awal 2015, harga minyak mulai mengalami penurunan yang sangat drastis. Hingga akhir tahun 2015, harga minyak dunia menyentuh angka 40 US\$/Barel. Bank Dunia mengkalkulasi merosotnya harga minyak hingga 47% pada tahun 2015. Hal ini berlanjut hingga 2016 yang kembali turun sebesar 25%, (Statista, 2017). Harga yang semakin turun tersebut membuat para negara-negara anggota OPEC dilanda kekhawatiran berupa defisit anggaran, (Hartmann, 2015). Negara-negara anggota OPEC tersebut mengalami defisit anggaran yang besar, nilai tukar jatuh dan terancam terbelit hutang.

Namun hal sebaliknya terlihat pada Arab Saudi. Negara-negara eksportir minyak mengajak OPEC untuk mengurangi kuota produksi agar harga kembali naik dan stabil. Tetapi Arab Saudi sebagai *natural leader* di dalam OPEC memilih untuk tidak mengurangi kuota produksi minyak pada 2014, (Reuters, 2015). Bahkan pada pertemuan di tahun 2015, OPEC tetap memutuskan untuk produksi minyak pada level 31,5 juta barel per hari. Hal ini kembali terlihat pada pertemuan anggota OPEC dan Non-OPEC di Doha Qatar dan Vienna Austria pada tahun 2016. Namun dalam dua pertemuan tersebut OPEC gagal untuk menemui kesepakatan tentang pengurangan produksi minyak. Keputusan OPEC tersebut senada dengan keinginan Arab Saudi untuk mempertahankan harga tanpa harus mengurangi tingkat produksi minyaknya. Sebagai negara yang akan dirugikan dengan

turunnya harga minyak, namun Arab Saudi dengan OPEC tidak menemui kesepakatan untuk membatasi kuota produksi ketika harga minyak telah turun. Sikap Arab Saudi tersebut menjadi paradok dalam fenomena ini. Oleh karena itu penulis akan mengulas motif dibalik sikap Arab Saudi dalam mendorong OPEC untuk tidak mencapai kesepakatan dalam memotong kuota produksi. Fenomena tersebut menjadi rumusan permasalahan penulis untuk di analisa pada artikel ini.

## 1.2. TEORI STABILITAS

Terdapat beberapa definisi tentang hegemon yang dilahirkan oleh beberapa akademisi. Pertama, Gilpin (1981) mendefinisikan hegemoni sebagai perpaduan antara kemampuan untuk memaksa negara-negara lain dengan berpartisipasi dalam sebuah sistem yang telah diatur oleh negara yang berkuasa tersebut. Gilpin mencoba membandingkan konsep hegemon dengan zaman kekaisaran. Perbandingan tersebut dalam hal kekuatan kekaisaran tersebut dapat mempertahankan suatu struktur kekuasaan secara paksa terhadap para tanah jajahannya. Definisi lain terkait hegemoni yang memandang hegemoni merupakan hal positif dan tidak memberikan unsur paksaan terhadap negara lain, (Snidal, 1985) (Keohane, 1984). Hegemon dapat dianggap sebagai sesuatu yang positif karena berfungsi untuk mengatur dan menyusun sistem sehingga membentuk norma untuk saling bekerja sama sehingga dapat kestabilan dalam sistem. Sedangkan teori Stabilitas Hegemoni pada mulanya lahir dari pemikiran Kindleberger. Dalam teori ini Kindleberger menjelaskan bahwa kekuatan hegemon dapat menciptakan sebuah tatanan ekonomi global yang stabil (Kindleberger, 1973). Ketika kekuatan hegemon tersebut mengalami kemunduran maka akan muncul ketidakstabilan secara tatanan global.

Kindleberger menambahkan bahwa negara hegemon mampu memiliki kemampuan untuk menciptakan stabilitas global dan menghindarkan dari distorsi pasar dalam konteks perdagangan internasional. Tatanan yang stabil hanya dapat tercipta juga ketika negara hegemon tersebut bersedia menanggung segala biaya untuk menjamin kestabilan sistem beserta mendapatkan dukungan dari negara-negara sekitar lainnya.

Kemudian teori ini juga dikembangkan oleh Gilpin dengan memasukkan dimensi politik di dalamnya. Gilpin menjelaskan bahwa teori ini adalah untuk memahami peran yang dimainkan oleh hegemon dan hubungannya dalam konteks pembangunan ekonomi dan stabilitas politik dalam struktur internasional (Gilpin, 2006). Peran tersebut dimaksimalkan oleh negara hegemon untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Gilpin menambahkan, negara hegemon tersebut adalah yang akan mendapatkan keuntungan terbesar melalui perdagangan bebas karena memiliki faktor-faktor efisiensi dalam hal produksi, perdagangan dan finansial. Melalui pengaruhnya, negara hegemon tersebut mampu memaksa negara lain untuk mengikuti segala kebijakan yang sama dalam sistem perdagangan internasional. Sedangkan Stephan Krasner juga memberikan beberapa pandangannya terkait teori stabilitas hegemonik. Menurut Krasner hanya negara hegemon lah yang dapat memanfaatkan perdagangan bebas untuk mempengaruhi kepentingan-kepentingan negara lain dalam tatanan perdagangan internasional (Webb & Krasner, 1989).

Dengan menggunakan pendekatan teori stabilitas hegemoni maka akan dapat menjelaskan posisi Arab Saudi selama ini di dalam OPEC. Selain menjadi *swing producer*<sup>1</sup> di dalam OPEC, Arab Saudi juga

menjadi negara yang menghukum segala konflik atau perilaku curang (*cheating*) yang dilakukan oleh negara-negara anggota OPEC.

### 1.3. ANALISA

Bagian analisa ini terbagi dalam empat bagian. Pertama, akan membahas peran Arab Saudi dalam OPEC. Kedua akan membahas faktor rivalitas Arab Saudi dengan Iran. Kemudian dalam bagian ketiga dan keempat akan membahas rivalitas Arab Saudi dengan Irak dan Rusia.

## 2. OPEC dan Arab Saudi

Pada tahun 1970-an OPEC masih dapat memegang kendali atas harga dan jumlah produksi minyak sehingga dapat melakukan monopoli harga atas minyak dunia. Kesuksesan OPEC pada tahun 1970-an tidak lepas dari kontribusi negara-negara anggotanya dalam melahirkan kesepakatan kolektif demi tujuan ekonomi dan politik tertentu. Hal ini juga didukung faktor minyak masih sebagai sumber energi utama di banyak negara-negara industrial dan juga minimnya jumlah kompetitor produksi OPEC. Bahkan perilaku *cheating* yang dilakukan anggota OPEC saat itu belum menjadi permasalahan krusial. Hal ini karena Arab Saudi sebagai anggota terbesar OPEC mampu menyeimbangkan hasil produksinya sebagai timbal balik atas kelebihan produksi yang di sebabkan perilaku *cheating* tersebut.

Sementara itu di tahun-tahun setelah 1980-an, OPEC tidak lagi memperlihatkan perilakunya sebagai organisasi kartel minyak secara konsisten. Permintaan minyak yang mulai turun pada tahun 1980-an karena munculnya resesi ekonomi yang terjadi di negara-negara industrial dan juga munculnya konversi sumber energi baru

---

<sup>1</sup> Swing Producer dalam dunia perdagangan minyak bisa sebagai negara atau perusahaan yang berusaha

---

memperbaiki fluktuasi pasar minyak. Terutama berperan dalam menyeimbangkan tingkat permintaan dengan tingkat ketersediaan barang.

selain minyak. Selanjutnya pada periode 2003 hingga 2015, OPEC tidak dapat lagi memperlihatkan kembali tujuannya yang ingin mengkoordinasikan kebijakan produksi minyak anggota-anggotanya. Hal ini semakin menegaskan OPEC tidak lagi berfungsi seperti kartel layaknya ketika tahun 1970-an. Merujuk pada pandangan dari Charles F. Doran bahwa kelangsungan suatu kartel dapat dilihat pada masalah internal atau eksternal yang muncul, (Doran, 1980). Secara kondisi internalnya, OPEC memiliki masalah pada struktur produksi OPEC. Dalam melaksanakan kontrak produksi, secara institusi OPEC hanya mengatur harga namun tidak memiliki peraturan-peraturan yang mengikat anggota-anggotanya untuk memproduksi sesuai kuota yang telah disepakati. OPEC pun kesulitan untuk dapat mencegah munculnya kecurangan yang muncul di antara anggota-anggotanya.

Sejarah Arab Saudi sebagai negara hegemon dalam sistem perdagangan minyak internasional bermula dari pembentukan OPEC pada tahun 1960, (Ramady, 2015). Pada mulanya OPEC dibentuk untuk dapat mengatur stabilitas harga minyak dan juga untuk mengurangi pengaruh *seven sisters* dalam mengatur perdagangan minyak internasional. Pada tahun 1973 OPEC mulai menunjukkan posisinya sebagai hegemon baru dalam dunia perdagangan minyak internasional semenjak menggunakan hak dan wewenangnya dalam mengatur mekanisme harga minyak internasional. Hal tersebut juga hasil dari negoisasi yang gagal dengan kelompok *seven sisters* pada bulan Oktober tahun 1973. Kemudian pada tahun tersebut negara-negara anggota OPEC terutama yang berasal dari Timur Tengah melakukan embargo sekaligus memotong tingkat produksi minyak sehingga terjadi lonjakan harga. Sikap negara-negara anggota OPEC tersebut mengancam perekonomian negara-negara barat beserta Jepang, karena tingkat industrialisasi di

negara-negara tersebut bergantung pada pasokan minyak. Semenjak fenomena tersebut OPEC kerap kali dipandang sebagai organisasi kartel minyak internasional.

Namun internal keanggotaan dalam OPEC juga terdapat beberapa kali situasi perpecahan. Hal ini seringkali dimulai dari pendapatan keuntungan yang berbeda-beda antar anggota OPEC. Mulanya Arab Saudi sebagai negara tertinggi yang mendapat keuntungan dari penjualan minyak dan memiliki tingkat cadangan minyak yang dalam volume besar. Faktor tersebut ditunjang dengan kemajuan teknologi yang membuat Arab Saudi dapat menciptakan biaya produksi minyak termurah dibandingkan dengan anggota-anggota OPEC lainnya. Namun di sisi lain, anggota-anggota OPEC lainnya yang tidak memiliki tingkat cadangan minyak sebesar Arab Saudi serta biaya produksi minyak yang relatif tinggi namun melihat sikap Arab Saudi dapat menjerumuskan harga minyak pada titik rendah. Beberapa kali terjadi momen konflik antar anggota OPEC baik melibatkan Arab Saudi atau dengan pihak lainnya diselesaikan melalui kebijakan Arab Saudi untuk membanjiri produksi minyak agar harga semakin turun. Hal serupa juga dilakukan ketika anggota-anggota OPEC melakukan kecurangan dengan meningkatkan kuota produksi diatas kesepakatan dalam OPEC.

Arab Saudi sebagai anggota OPEC yang memiliki kemampuan untuk memproduksi minyak dalam harga yang rendah dengan volume produksi yang tinggi juga harus berusaha menutupi *over* produksi OPEC akibat perilaku *cheating* dari anggota-anggotanya. Oleh karena itu Arab Saudi melakukan produksi dengan volume yang lebih rendah meskipun dapat mengakibatkan penurunan profit namun bertujuan untuk menstabilkan kembali harga minyak. Begitu juga ketika terjadi

rendahnya produktivitas minyak dari negara anggota OPEC, Arab Saudi harus mampu menutupinya dengan kemampuan produksinya. Terlebih ketika penurunan produktivitas tersebut secara bersamaan diikuti dengan tingginya permintaan minyak dunia. Pada momen tersebut Arab Saudi harus melakukan produksi minyak lebih tinggi dibandingkan anggota OPEC lainnya demi memenuhi tingkat permintaan minyak internasional.

### **3. Arab Saudi vs Iran**

Menurut teori stabilitas hegemoni, konsep hegemoni mengacu pada negara hegemon yang mampu memaksimalkan kekuatannya terhadap negara lain dalam sistem internasional. Gilpin berasumsi bahwa terdapat dua dimensi yang bisa dimaksimalkan untuk mengkategorikan sebuah kekuatan sebagai kekuatan hegemon, yaitu kekuatan politik dan militer serta keunggulan pada efisiensi ekonomi. Sesuai dengan kriteria tersebut bagian ini mengkaji Arab Saudi sebagai negara hegemon dalam OPEC berperan kunci pada krisis harga minyak tahun 2014.

Pertama, motivasi politik Arab Saudi dalam menjaga harga minyak supaya tetap berada pada angka yang rendah adalah untuk melemahkan salah satu kompetitornya secara ekonomi dan politik di kawasan Timur Tengah yaitu Iran. Bukan untuk pertama kalinya Arab Saudi menggunakan minyak sebagai senjata politiknya dalam menghadapi Iran. Sejak awal tahun 1980-an, Iran telah menjadi ancaman terhadap hegemoni Arab Saudi di kawasan Timur Tengah. Pada tahun 1977, Arab Saudi membanjiri pasar minyak internasional dengan meningkatkan produksinya secara drastis yang berujung pada turunnya harga minyak secara tajam (Cooper, 2008). Aksi Arab Saudi tersebut ditujukan kepada rezim Shah Pahlevi di Iran yang menjadi rival terbesar Arab Saudi dalam mempertahankan

supremasinya di kawasan Timur Tengah. Momen tersebut juga bersamaan dengan retaknya hubungan Iran dan Amerika Serikat sejak tahun 1976. Amerika Serikat menganggap Iran tidak bisa diharapkan sebagai partner anggota OPEC yang kooperatif karena Iran cenderung mendukung kenaikan harga minyak dunia hingga dua digit (Cooper, 2008). Sedangkan hubungan Arab Saudi dengan Amerika Serikat mengalami peningkatan kerja sama dengan perdagangan senjata antara dua pihak tersebut.

Pemerintahan Iran dibawah Shah Pahlevi mengalami penurunan dari segi industri manufaktur hingga 50% dan inflasi yang mencapai 30%. Berbagai kebijakan Shah Pahlevi dengan memotong berbagai anggaran dalam negeri demi menyeimbangkan neraca tidak berhasil. Hanya dalam waktu dua tahun setelah momen krisis tersebut rezim pemerintahan Shah Pahlevi mengalami keruntuhan dengan revolusi yang dijalankan oleh Ayatollah Imam Khomeini. Namun rezim pemerintahan Iran pasca revolusi yang di pimpin oleh Ayatollah Imam Khomeini justru membawa ancaman lebih besar kepada Arab Saudi. Beberapa pihak yang terlibat konflik terhadap Arab Saudi di Timur Tengah merupakan sekutu Iran seperti pemerintahan Syria di bawah Bashar Al Assad, pemberontak Houthi di Yaman dan pemberontak Hizbullah di Libanon. Hal tersebut semakin mengancam hegemoni Arab Saudi dengan Iran kembali melanjutkan program nuklirnya.

Pada bulan November tahun 2006, konsultan keamanan kerajaan Arab Saudi yang juga menjadi duta besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat yaitu Nawaf Obaid menuliskan opininya di surat kabar Washington Post. Opini tersebut menjelaskan bahwa jika Arab Saudi meningkatkan volume produksinya dan memotong harga minyak hingga 50 % maka

akan dapat memberikan pukulan telak terhadap perekonomian Iran.<sup>2</sup> Lanjutnya, hal tersebut dapat menghambat pendanaan Iran terhadap milisi-milisi Syiah yang berada di Irak dan berbagai negara lainnya. Hal ini kembali dilakukan oleh Arab Saudi pada krisis ekonomi global tahun 2008 dengan membanjiri pasar minyak internasional dan membuat harga minyak dunia turun dari angka 147\$ /barel menjadi hanya 33\$ /barel.<sup>3</sup> Hal tersebut berimbas pada perekonomian Iran yang mengalami penurunan pemasukan dari setor minyak dan ketika itu pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad mulai memotong berbagai anggaran pada kebijakan-kebijakan populisnya. Krisis dan inflasi yang terjadi menciptakan demonstrasi besar dari rakyat Iran yang menuntut kembali dijalankannya program-program subsidi kesehatan, sosial dan pendidikan.

Semenjak hubungan Iran dan negara-negara Barat memburuk pasca revolusi, Iran mulai membuka hubungan lebih erat dengan rival AS seperti Cina dan Rusia. Iran juga membuka pintu investasi asing pada perusahaan-perusahaan Cina untuk investasi di bidang perminyakan. Beberapa diantaranya ialah investasi yang dilakukan oleh China National Petroleum dan Sinopec di daerah selatan dan utara Azadegan dan kawasan Yadavaran.<sup>4</sup> Selain itu Cina juga menjadi negara importer minyak terbesar di

dunia melewati AS di tahun 2015.<sup>5</sup> Hal ini menarik perhatian Arab Saudi yang ingin melebarkan *market share* kepada Cina dengan menjalin kerjasama dan perlahan-lahan juga ingin menyingkirkan Iran sebagai partner kerjasama terbesar Cina di Timur Tengah. Memasuki akhir tahun 2014, Nawaf Obaid kembali menuliskan opininya di surat kabar Reuters bahwa kebijakan Arab Saudi untuk mengontrol OPEC supaya tidak memotong kuota produksi minyak akan memberikan dampak besar terhadap kawasan Timur Tengah.<sup>6</sup> Diantaranya ialah Iran yang akan kembali merasakan tekanan ekonomi ketika pada tahun tersebut masih bergelut dengan sanksi larangan ekspor minyak dari Amerika Serikat. Jika melihat sejarah sebelumnya, kebijakan Arab Saudi menggunakan minyak untuk menegaskan hegemoninya di dalam OPEC dan kawasan Timur Tengah kembali mengancam rezim pemerintahan Hasan Rouhani di Iran.<sup>7</sup>

Dalam hal tingkat produksi minyak, Iran memiliki proyek jangka panjang untuk meningkatkan produksi minyaknya di tahun 2019. Pemerintahan Iran menargetkan untuk memproduksi minyak hingga 5,7 Juta barel per hari di tahun 2019 (Iran Daily, 2015) meskipun masih terkendala dengan teknologi yang dimilikinya. Wakil Menteri perminyakan Iran, Roknoddin Javadi sebelumnya menyatakan bahwa target produksi minyak Iran ialah 3,96 juta barel per hari hingga pertengahan tahun 2016,

---

<sup>2</sup> Obaid, Nawaf. *Stepping into Iraq Saudi Arabia will protect sunnis if the U.S. leaves*. The Washington Post. November 29, 2006. Accessed February 08, 2018. [http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/28/AR2006112801277\\_pf.html](http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/28/AR2006112801277_pf.html).

<sup>3</sup> Krauss, Clifford. *No change in oil goal, but cartel Is watchful*. The New York Times. December 22, 2009. Accessed February 08, 2018. [http://www.nytimes.com/2009/12/23/business/energy-environment/23ope.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2009/12/23/business/energy-environment/23ope.html?_r=0).

<sup>4</sup> Paula Dittrick. 2010. *Chinese oil companies invest heavily abroad*. Accessed February 16, 2018 <http://www.ogj.com/articles/print/volume-108/issue-5/general-interest/chinese-oil-companies.html>.

---

<sup>5</sup> *China World's Top Crude Buyer*. Iran Daily, May 11, 2015, Accessed February 16, 2018. <http://www.iran-daily.com/News/117811.html>.

<sup>6</sup> Hudson, Editing By Dale. *Determinants of a new Saudi oil policy: Nawaf Obaid*. Reuters. December 02, 2014. Accessed February 08, 2018. <https://www.reuters.com/article/us-saudi-oil-column/determinants-of-a-new-saudi-oil-policy-nawaf-obaid-idUSKCN0JG13K20141202>.

<sup>7</sup> Cooper, Andrew Scott. *Why Would the Saudis Deliberately Crash the Oil Markets?* Foreign Policy. September 23, 2016. Accessed February 08, 2018. <http://foreignpolicy.com/2014/12/18/why-would-the-saudis-crash-oil-markets-iran/>.

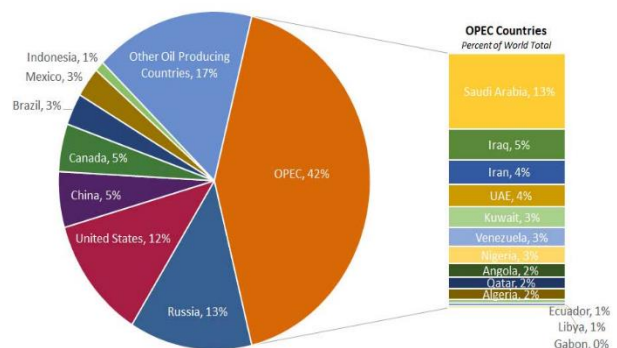
(Bloomberg, 2015). Dalam hal ini jika kapasitas produksi Iran yang terus naik dan jika dikombinasikan dengan tingkat produksi minyak yang dimiliki oleh sekutunya yaitu Irak maka dapat mengimbangi tingkat produksi minyak yang dimiliki oleh Arab Saudi. Kombinasi dari 2 negara tersebut dapat mengganggu posisi hegemoni Arab Saudi dalam OPEC. Peningkatan produksi minyak oleh Iran dan Irak dikhawatirkan akan perlahan-lahan menggantikan Arab Saudi sebagai produsen minyak utama di kawasan Timur Tengah.

Pada sisi peralatan militer, Iran yang sering kali memberi ancaman melalui kepemilikan roket misilnya yang membuat Arab Saudi juga merasa khawatir. Kekhawatiran tersebut Arab Saudi bahwa misil tersebut suatu saat akan diarahkan kepada instalasi minyak Arab Saudi. Itzkowitz (2011) menganalisa bahwa peluncuran misil Iran yang ditargetkan kepada instalasi minyak negara-negara teluk dapat memberikan efek kenaikan harga minyak yang sangat tinggi.<sup>8</sup> Selain kenaikan harga minyak dunia, jika misil Iran tersebut berhasil menyerang instalasi minyak Arab Saudi maka akan terjadi penurunan tingkat ekspor minyak oleh Arab Saudi.

Oleh karena itu keterlibatan Arab Saudi dan Iran dalam beberapa konflik tersebut menunjukkan bahwa adanya persaingan diantara kedua Negara tersebut baik dalam OPEC atau dalam kawasan Timur Tengah. Bagi Arab Saudi, peningkatan kekuatan Iran baik segi politik dan ekonomi akan mengancam hegemoni Arab Saudi baik di OPEC dan kawasan Timur Tengah. Terutama semenjak Iran mencapai kesepakatan Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) yang menghasilkan kesepakatan untuk mencabut

sanksi embargo minyak Iran dan mengizinkan Iran kembali melanjutkan program nuklirnya. Dampak dari pencabutan sanksi tersebut bisa membuat Iran memajukan perekonomian dan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Selain itu kekhawatiran Arab Saudi akan Iran yang mendapat kepercayaan dari AS dan Negara-negara Eropa dalam mengesahkan perjanjian JCPOA dapat membuat sekutu terbesarnya yaitu AS berpaling kepada Iran.

Daniel Yergin dalam analisisnya terkait sikap Arab Saudi mendorong OPEC untuk menekan harga minyak supaya turun ialah untuk melemahkan rivalnya yaitu Iran dan Irak, (Yergin 2015). Selain itu Arab Saudi juga tidak ingin pencabutan sanksi ekspor minyak Iran membuat pasar minyak dunia didominasi oleh pasokan minyak dari Iran.



Gambar 3.1. Tingkat Produksi Minyak Dunia tahun 2015<sup>9</sup>

Oleh karena itu harga minyak yang murah sangat memukul perekonomian Iran yang membutuhkan tingkat harga minyak dunia di atas 100 US\$/Barel demi mempertahankan kebijakan subsidi minyak dalam negerinya.

Karena harga minyak murah tersebut akan memberikan dampak terhadap

<sup>8</sup> Shiffrinson, J. R., & Priebe, M. (2011). A crude threat: the limits of an Iranian missile campaign against Saudi Arabian oil. *International Security*, 36(1), 167-201. doi:10.1162/isec\_a\_00048

<sup>9</sup> <https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2017/march/opec-losing-ability-influence-oil-prices>

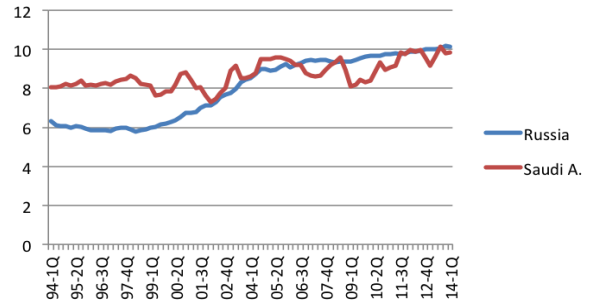


pengeluaran Iran terhadap subsidi minyak dalam negeri yang pada tahun 2014 mencapai 100 miliar US\$ atau senilai dengan 25% Produk Domestik Bruto (PDB) Iran.<sup>10</sup>

#### 4. Arab Saudi vs Rusia

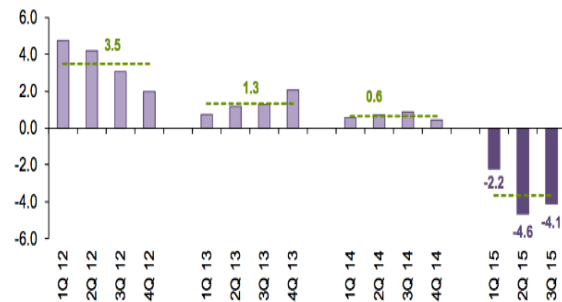
Tidak bisa dipungkiri bahwa segala upaya Iran dalam melawan hegemoni Arab Saudi di kawasan Timur Tengah dibantu dengan dukungan politik oleh Rusia. Begitu juga konflik sipil yang terjadi di Syria, pemerintahan Basar Al Assad mendapat dukungan dari Iran dan Rusia, sedangkan kelompok pemberontak mendapat dukungan dari Arab Saudi.

Kedekatan Syria dengan Rusia telah dimulai sejak tahun 1980 ketika Syria menjadi tempat berdirinya pangkalan militer Uni Soviet di laut tengah.<sup>11</sup> Dalam konflik sipil di Syria, Rusia juga mengambil sikap untuk memveto usulan Arab Saudi di PBB untuk melakukan intervensi terhadap pemerintah Syria.<sup>12</sup>



Gambar 4.1. Tingkat Ekspor Minyak Arab Saudi dan Rusia Tahun 1994-2014<sup>13</sup>

Rusia juga merupakan salah satu pesaing Arab Saudi di luar OPEC dalam hal produksi minyak. Dari waktu ke waktu, terutama pasca Perang Dingin, Rusia semakin meningkatkan produksinya di atas Arab Saudi.<sup>14</sup> Namun dengan turunnya harga minyak dunia hingga dibawah 50 US\$ per barel sangat memukul perekonomian Rusia. Rusia diperkirakan membutuhkan harga minyak di angka 100 US\$ per barel untuk kembali menyetatkan ekonominya.



Gambar 4.2. PDB Rusia Tahun 2012-2015<sup>15</sup>

<sup>10</sup> The Economist. *Winners and losers*. October 23, 2014. Accessed July 9, 2018. <https://www.economist.com/international/2014/10/23/winners-and-losers>

<sup>11</sup> The Economist. *Why Russia is an ally of Assad*. September 30, 2015. Accessed February 16, 2018. <https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/09/economist-explains-22>.

<sup>12</sup> Borger, Julian, and Bastien Inzaurrealde. *Russian vetoes are putting UN security council's legitimacy at risk, says US*. September 23, 2015. Accessed February 16, 2018. <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/23/russian-vetoes-putting-un-security-council-legitimacy-at-risk-says-us>.

<sup>13</sup> DiChristopher, T. (2015, December 08). *More than money at risk for Saudis as oil plunges*. Retrieved from <https://www.cnbc.com/2015/12/07/how-cheap-oil-raises-political-risks-in-saudi-arabia.html>

<sup>14</sup> Schofield, James. *Business | Russias oil renaissance*. BBC News. June 24, 2002. Accessed February 16, 2018. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2058214.stm>.

<sup>15</sup> Edwards, J. (2015, December 24). *Saudi Arabia is killing the Russian economy in its fight to control oil prices*. Retrieved from <http://uk.businessinsider.com/saudi-arabia-is-killing->

Strategi Arab Saudi didalam OPEC dalam mendorong turunnya harga minyak dunia tidak hanya untuk mengincar Iran, tetapi juga Rusia. Menurut Rashid Abanmy dengan harga minyak yang rendah dapat menekan Iran dengan program nuklirnya sekaligus melemahkan dukungan Rusia terhadap Iran dan Syria di Timur Tengah.<sup>16</sup>

Strategi tersebut perlahan menunjukkan sisi positif karena Rusia mulai melunak terhadap Arab Saudi pasca turunnya harga minyak dunia pada tahun 2014 - 2016.<sup>17</sup> Bahkan pemerintahan Arab Saudi melakukan kunjungan pertamanya di Rusia. Dalam kunjungan tersebut kedua negara berhasil mensepakati beberapa perjanjian, baik pada bidang minyak dan keamanan.<sup>18</sup>

## 5. Arab Saudi vs Irak

Hubungan yang kurang harmonis antara Arab Saudi dan Irak telah berlangsung selama 27 tahun. Konflik antar Arab Saudi dan Irak bermula pada invasi Irak terhadap Kuwait di tahun 1990. Invasi Irak dibawah Sadam Hussein tersebut membawa motif bahwa Kuwait akan meningkatkan produksi minyaknya sehingga dapat membuat turunnya harga minyak. Sama seperti Arab Saudi, Irak dan Kuwait merupakan negara yang memiliki

ketergantungan dari ekspor minyak. Dengan menguasai Kuwait membuat Irak dapat menguasai sekitar 20% cadangan minyak dunia.

Namun invasi Irak ini mendapat kecaman baik dari Arab Saudi, PBB dan negara-negara lainnya. Aksi balasan terhadap invasi Irak dipimpin oleh AS dengan Operasi Desert Storm beserta dukungan angkatan udara Arab Saudi. Kurang dari seminggu aliansi tersebut dapat memukul keluar Irak dari Kuwait.

Hubungan Irak dan Arab Saudi setelah turunnya Saddam Hussein di tahun 2003 ternyata masih kurang harmonis. Pemerintahan Irak yang baru terbentuk pasca lengsernya Sadam Hussein justru didominasi dengan kelompok yang didukung oleh Iran. Semenjak itu Irak selalu memosisikan Iran sebagai aliansi terdekatnya dibandingkan dengan Arab Saudi. Hingga pada tahun 2015 Iran banyak merekrut tentara dari Irak yang akan di tempatkan pada Syria demi melindungi pemerintahan Bashar Al Assad.<sup>19</sup>

Dalam Hal produksi minyak, Irak hingga saat ini memiliki tingkat produksi minyak yang sangat tinggi bahkan menyaingi Iran dan Arab Saudi. Hanya saja sanksi dari AS pasca invasi Irak ke Kuwait di tahun 1990 dan kehancuran beberapa infrastruktur pasca invasi AS ke Irak di tahun 2003 menyebabkan tingkat ekspor minyak Irak sempat melemah dalam beberapa tahun. Namun dengan semenjak jatuhnya Sadam Hussein, industri perminyakan Irak membuka secara lebar terhadap investasi asing yang akan masuk. Beberapa perusahaan minyak besar seperti Chevron, Haliburton, Exxon Mobile, dan Conoco Phillips telah menanamkan

---

[the-russian-economy-in-its-fight-to-control-oil-prices-2015-12/?IR=T](http://the-russian-economy-in-its-fight-to-control-oil-prices-2015-12/?IR=T)

<sup>16</sup> Middelkoop, Willem. *The big reset: war on gold and the financial endgame*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015.

<sup>17</sup> Rapoza, Kenneth. *For Putin, oil decline worse than Obama's sanctions*. October 9, 2014. Accessed February 18, 2018.  
<https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2014/10/09/declining-oil-hurting-putins-economy-more-than-u-s-sanctions/2/#7e0c6d26681c>.

<sup>18</sup> Chow, Edward. *Russia and Saudi Arabia: a new oil bromance?* November 3, 2017. Accessed February 18, 2018.  
<https://www.csis.org/analysis/russia-and-saudi-arabia-new-oil-bromance>.

<sup>19</sup> Mullen, Jethro. *Iraq agrees to share intelligence with Russia, Iran and Syria*. Edition CNN. September 28, 2015. Accessed February 17, 2018.  
<https://edition.cnn.com/2015/09/27/middleeast/iraq-russia-iran-syria-intelligence-deal/index.html>.

sahamnya. Begitu juga dengan investasi asing dari Cina yang telah memasuki Irak yang bermain pada berbagai sektor seperti minyak, gas, listrik, transportasi dan kesehatan.

Oleh karena itu usaha Arab Saudi untuk memanfaatkan OPEC dalam mendorong turunnya harga minyak dunia juga turut sekaligus untuk melemahkan sekutu Iran lainnya seperti Irak. Dengan melemahkan perekonomian Irak maka dukungannya terhadap Iran juga akan terhambat, terutama dalam mempertahankan pemerintahan Syria. Namun pasca periode tahun 2014-2016 dalam turunnya harga minyak dunia berujung pada sikap Irak yang melunak terhadap Arab Saudi.<sup>20</sup> Bahkan Irak dan Arab Saudi secara resmi membangun hubungan baru dengan menyepakati beberapa perjanjian baru.<sup>21</sup> Salah satu dari perjanjian tersebut ialah membuka kembali kedutaan Arab Saudi di Irak yang telah tutup selama 27 tahun.

## KESIMPULAN

Snidal (1985) menekankan bahwa peran hegemoni dalam kerjasama internasional dapat menerima semua kepentingan berbagai negara selama tidak berupaya menggantikan posisinya sebagai hegemon. Dalam aplikasinya terhadap tulisan ini, semua negara memiliki keinginan kolektif untuk membuat kesepakatan bersama terkait pembatasan tingkat produksi minyak demi meningkatkan harga minyak dunia. Namun secara individunya setiap

negara merasa akan mendapatkan keuntungan secara lebih ketika memilih untuk tidak saling bekerja sama.

Oleh karena itu sejarah konflik dalam internal keanggotaan OPEC maupun eksternal dari OPEC dapat diambil benang merah bahwa Arab Saudi menjadi negara hegemon dalam internal OPEC tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak ada negara dalam OPEC yang mampu mengambil alih peran dan kontrol OPEC dalam sektor perminyakan internasional. Dengan hal ini pula Arab Saudi memanfaatkannya untuk mencapai kepentingan geopolitiknya dengan mendisiplinkan para rivalnya dalam bidang politik dan ekonomi seperti Irak dan Iran.

Merosotnya harga minyak internasional memang memukul perekonomian negara-negara seperti Libya, Venezuela dan Nigeria. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ketergantungan terhadap penjualan minyak untuk dijadikan sebagai pendapatan utama negara membuat negara-negara dalam OPEC masih bertahan dalam hegemoni Arab Saudi.

Dengan segala dinamika yang terdapat di dalam OPEC selama 50 tahun terakhir tidak membuat status keanggotaan OPEC menjadi tidak menarik atau merugikan. Lantas keanggotaan sebuah negara di dalam OPEC masih sangat diperhitungkan mengingat negara-negara anggota OPEC masih menguasai 40% tingkat produksi minyak dunia dan 80% tingkat ketersediaan cadangan minyak dunia. Dengan negara-negara anggotanya yang memiliki ketergantungan tinggi dari penjualan minyak untuk perekonomiannya, status keanggotaan dalam OPEC masih menjadi hal yang penting untuk menjalin hubungan positif dengan negara-negara besar dalam OPEC seperti Arab Saudi.

---

<sup>20</sup>Maksad, Firas, and Kenneth M. Pollack. *How Saudi Arabia is stepping up in Iraq*. August 21, 2017. Accessed February 18, 2018.

<https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2017-08-21/how-saudi-arabia-stepping-iraq>.

<sup>21</sup>Fayyad, Huthifa. *Renewed Saudi-Iraq ties 'to rival Iran's influence'*. October 26, 2017. Accessed February 18, 2018.

<http://www.aljazeera.com/news/2017/10/renewed-saudi-iraq-ties-rival-iran-influence-171024151411564.html>.

## DAFTAR PUSTAKA

- BBC. (2008, June 9). *Why the oil price keeps rising*. Retrieved from <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7431805.stm>
- Bloomberg. (2015). *Iran can add 600k B/D to capacity if sanctions lifted: Hussein*.
- Borger, J., & Inzaurre, B. (2015, September 23). *Russian vetoes are putting UN security council's legitimacy at risk, says US*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/23/russian-vetoes-putting-un-security-council-legitimacy-at-risk-says-us>
- Chow, E. (2017, November 3). *Russia and Saudi Arabia: A new oil bromance?* Retrieved from <https://www.csis.org/analysis/russia-and-saudi-arabia-new-oil-bromance>
- Clifford, C. (2009, July 2). *Oil's record high, one year later*. Retrieved from [http://money.cnn.com/2009/07/02/markets/year\\_oil/](http://money.cnn.com/2009/07/02/markets/year_oil/)
- Cooper, A. S. (2014, December 18). *Why would the Saudis deliberately crash the oil markets? Foreign Policy*. Retrieved from <http://foreignpolicy.com/2014/12/18/why-would-the-saudis-crash-oil-markets-iran/>
- Cooper, A. (2008). *Showdown at Doha: The secret oil deal that helped sink the shah of Iran*. *Middle East Journal*, 62(4), 567-591. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/25482569> . <https://doi.org/10.3751/62.4.11>
- DiChristopher, T. (2015, December 7). *More than money at risk for Saudis as oil plunges*. Retrieved from <https://www.cnbc.com/2015/12/07/how-cheap-oil-raises-political-risks-in-saudi-arabia.html>
- Dittrick, P. (2010, August 2). *Chinese oil companies invest heavily abroad*. Retrieved from <http://www.ogj.com/articles/print/volume-108/issue-5/general-interest/chinese-oil-companies.html>
- Fayyad, H. (2017, October 26). *Renewed Saudi-Iraq ties 'to rival Iran's influence*. Retrieved from <http://www.aljazeera.com/news/2017/10/renewed-saudi-iraq-ties-rival-iran-influence-171024151411564.html>
- Gilpin, R. (1981). *War and change in world politics*. UK: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511664267>
- Gilpin, R. & Gilpin, J. M. (2006). *Global political economy: understanding the international economic order*. Princeton, NJ: Princeton University Press. <https://doi.org/10.5860/choice.38-6290>
- Hartmann, B. (2016, March 28). *What low oil prices really mean*. Retrieved from <https://hbr.org/2016/03/what-low-oil-prices-really-mean>
- Hudson, Editing By Dale. (2014, December 2). *Determinants of a new Saudi oil policy: Nawaf Obaid*. *Reuters*. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/us-saudi-oil-column/determinants-of-a-new-saudi-oil-policy-nawaf-obaid-idUSKCN0JG13K20141202>
- Iran Daily. (2015, January 13). *Oil, gas condensates to exceed 5.7m bpd*. Retrieved from <http://www.iran-daily.com/News/109331.html>
- Keohane, R. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton, N.J: Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/20042201>
- Kindleberger, C. P. (1973). *The world in depression, 1929-1939*. Berkeley, CA: University of California Press. <https://doi.org/10.2307/2230860>
- Krauss, C. (2009, December 22). *No change in oil goal, but cartel is watchful*. Retrieved from [http://www.nytimes.com/2009/12/23/business/energy-environment/23opec.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2009/12/23/business/energy-environment/23opec.html?_r=0)

- Mabro, R.(2006). *Oil in the twenty-first century: Issues, challenges and opportunities*. Oxford, UK: Oxford University Press
- Maksad, F. & Pollack, K. M..(2017, August 21). *How Saudi Arabia is stepping up in Iraq*. Retrieved from <https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2017-08-21/how-saudi-arabia-stepping-iraq>
- Middelkoop,W. (2015). *The big reset: War on gold and the financial endgame*. Amsterdam: Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.1515/9789048529506>
- Moneef, M. A. (2003, November 17). *Internal challenges to OPEC and its member states*. Retrieved from <http://archives.mees.com/issues/458/articles/19311>
- Mouawad, J. (2008, December 17). *OPEC agrees to another cut in production*. Retrieved from <http://www.nytimes.com/2008/12/18/business/worldbusiness/18opec.html>
- Mouawad, J. (2009, January 25). *OPEC achieves cuts, halting price slide*. Retrieved from <http://www.nytimes.com/2009/01/26/business/worldbusiness/26opec.html>
- Mullen, J.(2015, September 28). *Iraq agrees to share intelligence with Russia, Iran and Syria*. Retrieved from <https://edition.cnn.com/2015/09/27/middleeast/iraq-russia-iran-syria-intelligence-deal/index.html>
- Obaid, N. (2006, November 29). *Stepping into Iraq Saudi Arabia will protect Sunnis if the U.S. leaves*. Retrieved from [http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/28/AR2006112801277\\_pf.html](http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/28/AR2006112801277_pf.html)
- Obaid, N. (2014, December 2). Determinants of a new Saudi oil policy: Nawaf Obaid. *Reuters*. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/us-saudi-oil-column/determinants-of-a-new-saudi-oil-policy-nawaf-obaid-idUSKCN0JG13K20141202>
- Ramady, M. M. (2016). *OPEC in a shale oil world: Where to next ?* Cham, Switzerland: Springer International. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-22371-1>
- Rapoza, K. (2014, October 9). *For Putin, oil decline worse than Obama's sanctions*. Retrieved from <https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2014/10/09/declining-oil-hurting-putins-economy-more-than-u-s-sanctions/2/#7e0c6d26681c>
- Schofield , J. (2002, June 24). *Russias oil renaissance*. Retrieved from <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2058214.stm>
- Shifrinson, J. R., & Priebe, M. (2011). A crude threat: The limits of an Iranian missile campaign against Saudi Arabian oil. *International Security*, 36(1), 167-201. [https://doi.org/10.1162/ISEC\\_a\\_00048](https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00048)
- Snidal, D. (1985). The limits of hegemonic stability. *International Organization*, 39. <https://doi.org/10.1017/s002081830002703x>
- Statista. (2018, October). *Average annual OPEC crude oil price from 1960 to 2017 (in U.S. dollars per barrel)*. Retrieved from <https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/>
- Webb, Michael C., and Stephen D. Krasner (1989). Hegemonic stability theory: an empirical assessment. *Review of International Studies*, 15(2), 183-198. <https://doi.org/10.1017/s0260210500112999>
- Why Russia is an ally of Assad*. (2015, September 30) Retrieved from <https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/09/economist-explains-22>
- Winners and losers*. (2014, October 23). Retrieved from <https://www.economist.com/international/2014/10/23/winners-and-losers>

# NEGOTIATING BETWEEN IDENTITIES: INDONESIA'S CHINESE-LANGUAGE NEWSPAPERS IN THE POST-NEW ORDER ERA

Yuhao Wen

Western Sydney University, Sydney, Australia

yh.wensea@gmail.com

## ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penggambaran identitas orang Tionghoa-Indonesia di era pasca-Orde Baru. Di bawah rezim otoriter, ekspresi publik dengan identitas Tionghoa di semua bidang sosial, seperti budaya, bahasa dan politik, ditekan secara resmi oleh pemerintah seiring dengan kebijakan asimilasi. Seseorang bisa menjadi orang Tionghoa atau orang Indonesia, tetapi tidak keduanya. Sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia telah memulai proses demokratisasi, dan identitas lama serta warisan budaya Tionghoa-Indonesia telah "dibebaskan". Sekarang ada kebutuhan mendesak untuk memeriksa kembali identitas orang Tionghoa. Satu saluran untuk mengekspresikan identitas etnis Tionghoa adalah melalui media etnis, seperti surat kabar berbahasa Mandarin - sebagaimana yang akan difokuskan oleh makalah ini. Berdasarkan konteks ini, makalah ini bertujuan untuk melihat apa identitas orang Tionghoa-Indonesia yang disajikan dalam surat kabar Indonesia berbahasa Mandarin di masa pasca-Orde Baru, dengan menganalisa pelaporan dan diskusi mereka mengenai peristiwa politik domestik yang utama.

**Keywords:** Chinese newspapers, political reporting, ethnic identity, Chinese-Indonesians, post-New Order Indonesia

## 1. Introduction

When Indonesia was under the authoritarian New Order regime between 1966 and 1998, public expression of Chinese culture, such as Chinese education, Chinese mass media and ethnic Chinese organizations, were outlawed by the government in line with a strict policy of "assimilation". Import of printed matters in Chinese languages into the country was classified as a prohibited import, which was as dangerous as narcotics and arms in customs regulations (Suryadinata, 2004). One could either be a Chinese or an Indonesian, but not both, on the ground that Chinese identity, in official discourses, was not compatible with being Indonesian, or "pribumi" (indigenous, native), and thus was an obstacle to national unity.

With the collapse of the New Order in 1998, the assimilation policy was officially ended in 2000. Indonesia entered an era of reform and democratization when the government also embraced the ideas of multiculturalism in its discourses regarding

social and political issues. A series of initiatives and policies had positive impacts to "liberate" the expression of Chinese culture and ethnic identity were promulgated. The country's fourth president, Abdurrahman Wahid, for instance, abrogated the presidential decision which banned the public celebration of Chinese festivals, and he removed the prohibition of importing and publishing printed materials in Chinese characters (Chui, 2002). Along with the "resurging" of Chinese culture since 1998, was that a large number of Chinese-language publications emerged. For example, between November 1998 and December 2000, seventeen publications, be they published in Chinese or other languages, were founded by Chinese-Indonesians. Ten of them, including four newspapers and six magazines, were in Chinese (Huang, 2001). Li Zhuo Hui, former editor-in-chief of *Guoji Ribao (International Daily)*, one of the major Chinese-language newspapers in the country, described this florescence as a period when "a hundred flowers bloom (*baihua qifang*)" (Li, 2003).

As Anthony Reid observed, after 1998, the concept of "Chineseness" appears to have

become as popular as it was unpopular under the New Order (Reid, 2009). Ethnic media, including the Chinese-language newspapers, are one of the many open channels that can present the identity of Chinese-Indonesians. Based on this context, this paper aims to look at what identity of Chinese-Indonesians that Indonesia's Chinese-language newspapers in the post-New Order era present, by analyzing their reporting and discussions about major domestic political events.

## 2. Literature Review

Ethnic media, according to Hang Yin, refers to the “media by and for ethnics in a host country with content in ethnic languages” (Yin, 2015). On the contrary, Melissa Johnson, based on her studies on the English-language and bilingual Latina magazines in the United States, is not convinced by the idea that a link with ethnic language is necessary for ethnic media. She argues that language should be omitted as a focus in the research of ethnic media, because the media can thrive without the native language (Johnson, 2000). On the other hand, she also admitted that many Latino-Americans nowadays may regard English rather than Spanish as their native language, even though they still could be bilingual.

In fact, the situation in Indonesia should be similar to the one observed by Johnson in the US. After almost three decades of forced assimilation, for many Chinese-Indonesians, especially the young generations, their native language is Bahasa Indonesia and/or a local dialect, instead of Chinese – although many of the dialects had absorbed a considerable number of elements from Chinese languages such as Hakka and Hokkien. The publication language of ethnic Chinese media, therefore, is not necessarily in Chinese languages. Even so, one should not ignore the representative role that the Chinese-language media takes as a part of the Chinese communities.

There has been a growing body of literature investigating on the relationship between the presentation of ethnic identity by ethnic media and the involvement into local politics by those media. Yin, from a general sense, argues that ethnic media have roots in the host country and fostering an identity that is embedded in the local experience (Yin, 2015). K. Viswanath and Pamela Arora notice that ethnic media have served an “assimilatory function”, by reporting more on the involvement of minorities in the host country's politics (Viswanath and Arora, 2000). Wan-Ying Lin and Hayeon Song also point out that politics is one of the most important topics in “geo-ethnic stories” of ethnic media – the stories which are culturally relevant and locally vital (Lin and Song, 2006).

Yet, the role played by Indonesia's Chinese-language newspapers in promoting the social and political integration of Chinese-Indonesians into the mainstream society is under-explored in academic research. There have been many, on the other hand, emphasizing on their role in the preservation of Chinese traditions and culture. Leo Suryadinata highlights that the newspapers, together with Chinese language education and ethnic Chinese organizations, are the “three pillars” of Chinese culture in overseas Chinese communities (Suryadinata, 2004). He goes further to describe them as the “three treasures” (*san bao*) of “Chineseness” (Hoon, 2006). In addition, Chang-Yau Hoon observed that those newspapers had become an important venue for Chinese-Indonesians, in particular, the older generations, to express their nostalgia for their Chinese roots (Hoon, 2006).

## 3. Primary Sources

This paper is based on a stage report from an archival and documentary research, discourse analysis of media, interview and participant observation, which the author

conducted in Indonesia in 2015 for a master's thesis to the Australian National University, Canberra. This fieldwork, among other research, consisted a part of a year-long project that incorporated multi-disciplines to investigate the complexity of the identity of Chinese-Indonesians in the post-New Order era.

The primary sources that the author mainly consulted in this research include Indonesia's four largest Chinese-language newspapers in the post-New Order era. Based on circulation numbers, *Guoji Ribao*, or the *International Daily*, is the largest. It first appeared in Jakarta in 2001; later also expanded to major cities such as Surabaya, Medan and Pontianak. In 2001, it circulated about 27,000 copies per day. That figure was 35,000 in 2005, and then increased to 50,000 in 2013 (Chui, 2002; Luo and Gao, 2005; Li and Guo, 2013).

The second largest newspaper is *Yindunixiya Xingzhou Ribao* (*Sin Chew-Harian Indonesia*, or *Sin Chew-Indonesia Daily*). In 2006, the established *Indonesia Daily* was acquired by one of Malaysia's leading Chinese-language media, namely *Xingzhou Ribao* (*Sin Chew Daily*), one year before it was relaunched as today's *Sin Chew-Indonesia Daily*. In this paper, the *Sin Chew-Indonesia Daily* will be abbreviated as the *Indonesia Daily*. In 2001, the *Indonesia Daily* circulated about 30,000 copies per day. The circulations dropped to 10,000 in 2005 and had remained at a similar level ever since (Chui, 2002; Luo and Gao, 2005).

*Yindunixiya Shangbao* (*Bisnis Indonesia*, or *Business Indonesia*), which was founded in Jakarta in 2000, is the third largest newspaper. In 2001, it circulated about 5,000 copies per day; the circulations almost doubled in 2005, and then dropped to be around 8,000 in 2013 (Chui, 2002; Luo and Gao, 2005; Li and Guo, 2013). The content of *Business Indonesia* focuses on

economic news and business information, among other topics.

The following one is *Qiandao Ribao* (*Harian Nusantara*, or *Archipelago Daily*), which was first published in Surabaya in 2000, and later also set up a branch office in Jakarta. This newspaper mainly circulates in East Java. In 2001, its circulations were about 2,000 to 3,000 copies every day. That figure reached its peak at 7,000, and remains around 5,000 nowadays (Chui, 2002; Luo and Gao, 2005). The newspapers listed above have circulated over a decade and gone digital by setting up their websites, which have been updated as frequently as their printed editions. Moreover, both the *International Daily* and *Archipelago Daily* also publish digital newspapers.

#### **4. An Ethnic Approach to Political Discussion**

The New Order's ban on Chinese culture left a significant legacy in shaping the post-1998 ethnic Chinese media, making a nostalgia to their Chinese roots the main feature of many Chinese newspapers. In other words, many publications only write about their ethnicity. Because of the "liberation" of expressing the Chinese identity, they feel that they are more "Chinese" than ever before. Driven by this largely victim mentality, Chinese-language newspapers apply an ethnic dimension when in the discussion of domestic politics. This angle of looking at things emphasizes the long-term victimhood of many Chinese-Indonesians in social and political life.

One typical example is the special subject writings, including different genres, that the Chinese-language newspapers published every May to mourn the May 1998 Riots of the country. The riots erupted soon after the end of the devastating 1997 Asian Financial Crisis. Mass unemployment, severe inflation and a potential shortage of living necessities had severely undermined



people's confidence in the government. Public discontent to the deeply entrenched corruption and nepotism that were closely associated with President Suharto and his regime also developed to its peak. As a result, mass violence, including killings, rapes and lootings, which were targeting those who were perceived as the beneficiaries of the regime broke out across major cities, such as Jakarta, Solo and Surabaya. Many of the victims were Chinese-Indonesians, due to a widely accepted identification by the local society that they were an "ethnic class". For instance, there was a wide belief to Chinese-Indonesians that they became economically well-off by exploiting the Indonesian society (Heidhues, 2006). Charles Coppel estimated that because of fearing of the riots, more than one hundred thousand Chinese-Indonesians left for Singapore, Hong Kong and Australia to seek refuge (Coppel, 2002).

In May 2015, the major Chinese-language newspapers also published thematic writings on mourning the riots. Supplementary section of the *International Daily*, for instance, included numbers of memoirs and poems submitted by Chinese-Indonesians who were victims of the riots. These writings, all ended up with a similar tone, suggesting Chinese-Indonesian communities to learn from the past and make contributions to build a more harmonious relationship with other social and ethnic groups. One message that was not openly stated, but had explicitly delivered, was that the past was harsh yet the justice that the victims deserved had not been adequately acknowledged by the state and mainstream society. A poem which was written by a journalist and entitled "Storm in May", recollected a scene of the event, "when lootings, smashing, rapes and killings are happening, nobody out there except me immediately realized how crazy that situation was" (my translation) (Huang,

2015). A commentary on the *Indonesia Daily* went much further to condemn the Chinese communities nowadays were as forgetful as "chickens" which allowed themselves to be trampled (You, 2015). The writer urged that the Chinese should remember the past like "cows", and take the masterminds of the riots to court, or to the International War Crime Tribunal if there was a need.

It should not be denied that most criticisms made by the writers and newspapers could be based on their self-perception that they were part of responsible members of the nation and society. They pointed out the neglected facts in order to put wrongs to rights. On the other hand, however, when a minority continue to stress their history of victimhood in their relationship to the mainstream society, the minority are also demarcating themselves from the majority. It is arguably obvious that to express personal sentiments, mainly fear and anger, was also a significant purpose for those writings. As the poem had shown, the author adopted rather explicit and emotional descriptions such as "lootings", "smashing", "rapes", and "killings" – similar as the metaphors of "chickens" and "cows" in the commentary article. These sentiments are incentives of self-exclusion. Moreover, in a multi-ethnic society, in most cases, it is the majority or the dominant group, instead of the minority, possesses the position to determine the meaning of "diversity" and the scope of tolerance. In this sense, the condemnments from the commentary, for example, could be rather radical to the mainstream society, and less tolerable to certain groups within the Chinese communities.

## **5. An Non-Ethnic Approach to Political Participation**

Even though there is no sign suggesting that the Chinese-language

newspapers intend to abandon the ethnic dimension of looking at politics, there is also an emerging non-ethnic approach of political participation. The new trend indicates that the Chinese newspapers have increasingly involved in discussions of political issues that are concerning not only a segment of the Chinese communities but also wider audiences in the mainstream society.

National elections, including the presidential election and the national legislative election, are one of the most important political topics in the post-New Order era. Since 1998, the elections have taken place every five years – in 1999, 2004, 2009 and 2014. By looking at the voter turnouts in each of these years, it is obvious that Indonesian public have a strong while continuous enthusiasm toward political participation. For instance, the voter turnouts in the legislative elections in those four years were 93.30, 84.09, 70.99 and 75.11 percent, respectively (Voter Turnout, 2014). Since 2004, Indonesia has made the president of the country be directly elected by the people. Voter turnouts in the last three presidential elections were 68.51 percent in 2004, 71.91 in 2009, and 69.58 in 2014. By analyzing the news reports, editorials and commentaries in the Chinese-language newspapers about the 2014 elections, this paper will illuminate the demonstration of the non-ethnic approach of political participation by the newspapers.

The legislative election took place on April 9, and the presidential election was on July 9. The Chinese-language newspapers had been following every important move concerning the elections, producing up-to-date contents on relevant issues, with various forms, as frequently as the mainstream media such as *Kompas* and the *Jakarta Post*. Even though it is difficult to track when those newspapers firstly published about electoral topics, some

relevant news reports did come out as early as in 2012. In addition to introducing regular electoral news, the newspapers, such as the *International Daily*, also integrated relevant useful information such as the timetables and address details of different political parties' electoral campaigns, as well as a systematic explanation to the working voting system, to their readers. These thematic sections were able to elaborate the information in effective ways. For instance, in order to illustrate how the current voting system functioned and how a ballot could be counted as a valid one, the *International Daily* was able to offer readers ten examples of ballots which were filled out in sixteen right and wrong ways (2014nian Daxuan, 2014).

Other newspapers had also offered their own thematic sections. Polling for the legislative election was completed on April 9. Before the official result was announced, figures from immediate quick counts had suggested that even the leading political party, that is, the Indonesian Democratic Party-Struggle (*Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*, or PDI-P), was not qualified to nominate its own candidate to solely represent PDI-P to contest in the upcoming presidential election. All political parties had to form a coalition with their rivals from the legislative election in order to contest in the presidential election. On the next day of the legislative polling, *Business Indonesia* immediately published a concise report, summarizing different parties' considerations regarding forming a coalition with other parties (Yihui Xuanju, 2014).

The national elections offered an opportunity for the Chinese-language newspapers to get involved in a political education of Chinese-Indonesian communities. By explaining the political knowledge such as how the electoral system works and by notifying updates on the elections to the communities, the

newspapers provided Chinese-Indonesians, especially the old, Chinese-speaking generations who had been avoiding politics for more than three decades, the information that was needed to participate in politics. More importantly, this effort could promote political awareness in those communities and to encourage them to perceive politics as a natural part of daily life. Maybe it has been too difficult to motivate the old generations to contest in an election or to actively participate in political activities. At least, they should understand the politics, as the editor-in-chief of *Business Indonesia* said (interview, 2015). To achieve these goals, Li Zhuo Hui, the former editor-in-chief of the *International Daily*, had published five books in Chinese about Indonesian politics. Editor-in-chief of *Business Indonesia* also had six books on Indonesian politics and economy. In this sense, the Chinese-Indonesian media practitioners perceive themselves as truly Chinese and truly Indonesian.

This self-perception was also demonstrated through the Chinese newspapers' support to the candidate pair Jokowi and Jusuf Kalla, over Prabowo Subianto and Hatta Rajasa, in the presidential election. It is reasonable to see that why many Chinese-Indonesians gave their support to the former candidate pair. Not just because of Jokowi's decent performance in governing Solo and Jakarta, as well as his image of being a reformist and pluralist, but also because of Prabowo was believed to be one of the masterminds of the riots took place in 1998, which Chinese-Indonesians severely suffered from, but whom was still under the protection of impunity.

In June 2014, for example, the *International Daily*, published a commentary with the title "No Blank Vote, Respect Human Rights, and Remember the History", mobilizing readers to vote for

Jokowi and Kalla (Nan, 2014). On July 4 and 5, six pages of the *Archipelago Daily* were the bilingual posters, in Mandarin Chinese and Bahasa Indonesia, campaigning for Jokowi and Kalla (*Archipelago Daily*, 2014). In fact, the publication of those posters was sponsored by Bambang D.H, senior PDI-P politician and the former deputy mayor of Surabaya. PDI-P backed Jokowi throughout the elections. Even so, as far as the author had observed, the *Archipelago Daily* had never campaigned for the other candidates during the presidential election. That is to say, its stand was arguably firm.

More importantly, the presidential election in 2014, according to many scholars, such as Edward Aspinall and Marcus Mietzner, was one of the most bitterly contested one since the collapse of the New Order (Aspinall and Mietzner, 2014). One of the black campaigns against Jokowi at that time claimed that he was ethnically Chinese and was a Christian (Editorial, 2014). A fear that another May 1998 might break out with facilitation of the supporters of Prabowo – notably paramilitary groups such as *Pemuda Pancasila* (Pancasila Youth) and *Front Pembela Islam* (Islamic Defenders' Front, or FPI) – if Prabowo lost in the election spread widely among the Chinese (Setijadi, 2015). To prevent potential threats and to secure personal safety, some Chinese-Indonesians even left for other countries in the electoral period (Tneh, 2014). According to the chief editor of *Business Indonesia*, the declaration of support was a gamble, in which if the newspaper bet on a wrong side, the following consequence could be troublesome (interview, 2015). Being able to openly show political preference in this relatively intense atmosphere demonstrates that in the Chinese-language newspapers, the "Indonesian" side in defining their sense

of belonging was as important as the “Chinese” side of them.

## **6. Conclusion**

In summary, since the end of the New Order regime, the Chinese-language newspapers in Indonesia have constantly been negotiating between an ethnic and non-ethnic approach to political participation, that is, a negotiation of being Chinese and

being Indonesian. Their discussions on domestic politics were once predominantly about ethnicity-related issues. When the author was concluding the report on the fieldwork, even though there was no indication that the newspapers planned to abandon this dimension of seeing things, they had also developed a new trend, encouraging them to refer more to the local context.

## REFERENCES

- Are we all bigots? (2014, June 18). *Jakarta Post*. Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2014/06/18/editorial-are-we-all-bigots.html>
- Aspinall, E. & Mietzner, M. (2014). Indonesian politics in 2014: democracy's close call. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(3), 347-69. <https://doi.org/10.1080/00074918.2014.980375>
- Chui, K. (2002). *Dongnanya huawen ribao xianzhuang zhi yanjiu [A study of the current Chinese dailies in Southeast Asia]* [in Chinese]. Singapore: Chinese Heritage Centre and the South Seas Society.
- Coppel, C. A. (2002). Studying ethnic Chinese in Indonesia. *Asian Studies Monograph Series No. 7*. Singapore: Singapore Society of Asian Studies.
- Fangfa, D. T. (2014). The voting method for the 2014 legislative election. *Guoji Ribao [International Daily]*.
- Heidhues, M. S. (2006). Indonesia. *The Encyclopedia of the Chinese overseas*, 151-68. Singapore: Editions Didier Millet.
- Hoon, C. (2006). A hundred flowers bloom: the re-emergence of the Chinese press in Post-Suharto Indonesia. In W. Sun (Ed.), *Media and the Chinese Diaspora: Community, Communications and Commerce* (pp.91-118). New York, NY: Routledge. <http://doi.org/10.4324/9780203873601>
- Huang, B. (2015). Wuyue fengbao [Storm in May]. *Guoji ribao [International Daily]*.
- Huang, K. (2001). Yinni huaren xinwenye de xianzhuang yu qianjing [On the current situation and future of Indonesian Chinese press]. *Jinan Xuebao (Zhaxue Shehui Kexue Ban) [Journal of Jinan University (Philosophy & Social Science Edition)]*, 23(4), 67-72.
- Johnson, M. A. (2000). How ethnic are U.S. Ethnic media: The case of Latina magazines. *Mass Communication and Society*, 3(2-3), 229-48. [https://doi.org/10.1207/s15327825mcs0323\\_04](https://doi.org/10.1207/s15327825mcs0323_04)
- Lin, W., & Song, H. (2006). Geo-ethnic storytelling: An examination of ethnic media content in contemporary immigrant communities. *Journalism*, 7(3), 362-88. <https://doi.org/10.1177/1464884906065518>
- Li, S., & Qingyun, G. (2013). Xinshiqi yinni huawen baozhi dui huawen jiaoyu de tuidong zuoyong [The promoting role of chinese newspaper in Indonesia on Chinese education in the new period]. [In Chinese]. *Dongnanya Zongheng [Around Southeast Asia]*, (3): 61-66.
- Li, Z. H. (2003). *Yinhua xianqu renwu guanghui sui Yue [The role of the Chinese in Indonesia's struggle for independence]*. Jakarta, Indonesia: Liantong Shuju Chubanshe [Mandarin Book Store].
- Luo, H., & Hongying, G. (2005). Yinni huawen meiti de lishi, xianzhuang ji qianjing [The past, present and future of Indonesia's Chinese-language media]. *Xinwen Jizhe [The Journalist Monthly]*, (8): 18-21.
- Nan, F. (2014). Butou bai piao, zunzhong renquan yu mowang lishi [No blank vote, respect human rights, and remember the history]. *Guoji Ribao [International Daily]*.
- Reid, A. (2009). Escaping the burdens of Chineseness. *Asian Ethnicity*, 10(3), 285-96. <https://doi.org/10.1080/14631360903189666>
- Setijadi, C. (2014, July 4). *Striving for safety*. New Mandala. Retrieved from <http://www.newmandala.org/striving-for-safety/#sthash.nCXwQGGj.dpuf>

- Suryadinata, L. (2004). *Chinese and nation-building in Southeast Asia*. Singapore: Marshall Cavendish Academic. <https://doi.org/10.1355/9789812305312-013>
- Suryadinata, L. (2004). *Chinese Indonesians: State policy, monoculture and multiculturalism*. Singapore: Eastern Universities Press.
- Tneh, K. L. (2014). Yinni jiushi buneng luan [Indonesia must not be trapped into chaos]. *Yindunixiya Xingzhou Ribao [Sin Chew-Indonesia Daily]*.
- Viswanath, K., & Arora, P. (2000). Ethnic media in the United States: An essay on their role in integration, assimilation, and social control. *Mass Communication and Society*, 3(1): 39-56. [https://doi.org/10.1207/s15327825mcs0301\\_03](https://doi.org/10.1207/s15327825mcs0301_03)
- Voter Turnout Data for Indonesia. (2014). *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*.
- Yindunixiya, S. (2014). *Yihui xuanju hou gezhengdang kaolü lianmeng zhenzhuo lianmeng duixiang [After the legislative Election: Parties' consideration of coalitions and their potential partners]*.
- Yin, H. (2015). Chinese-language cyberspace, homeland media and ethnic media: A Contested space for being Chinese. *New Media & Society*, 17(4), 556-72. <https://doi.org/10.1177/1461444813505363>
- You, J. (2015). 98nian 5yue yajiada yu suoluo baoluan 17zhounian jinian [Memorizes the May 1998 riots in Jakarta and Solo in their 17 anniversary]. *Yindunixiya Xingzhou Ribao [Sin Chew-Indonesia Daily]*.

**DARI TIONGHOA KE TJINA: TELAAH SEJARAH TERHADAP DEMONISASI ETNIS  
TIONGHOA DI INDONESIA**  
*(FROM TIONGHOA TO CHINA: A HISTORICAL REVIEW OF THE DEMONIZATION  
OF CHINESE ETHNICITY IN INDONESIA)*

Michael J. Kristiono  
Peneliti independen, Banteay Meanchey, Kamboja  
*mj.kristiono@gmail.com*

**ABSTRACT**

This paper attempts to investigate the reasons behind the negative sentiments directed towards Chinese Indonesians from an International Relations (IR) perspective. By tracing back the treatment of the New Order government towards ethnic Chinese, it was found that such demonization initially happened due to two politically motivated reasons. Firstly, as part of de-Soekarnoization done by the New Order, the Chinese were outcast because Chinese identity does not conform to the “Indonesian identity”, which was in essence, the Javanese identity. Secondly, the condition reflected the change in Indonesian foreign policy which drifted apart from People’s Republic of China (PRC) as the latter was suspected to be involved in September 30 Movement. Then, I argue that due to those reasons, coupled by systematic maltreatment from the New Order Government, Chinese Indonesians were constructed as the “others”, that is, as non-Indonesians. Such construct has been deeply embedded such that reconciliation attempts done by the Reformation Era government were not sufficient enough to stop ethnic discrimination towards Chinese Indonesians from happening even until the present.

**Keywords:** Chinese Indonesians, identity, ethnic discrimination, New Order

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih banyak menjadi sorotan dunia internasional. Pada level internasional, isu HAM acapkali dipergunakan untuk memperkuat posisi tawar (*bargaining chip*) negara-negara tertentu untuk menekan Indonesia untuk dapat menerima kepentingan politik mereka.<sup>1</sup> NGO-NGO

seperti Human Rights Watch (HRW)<sup>2</sup> dan Amnesty Internasional<sup>3</sup> juga masih sering menggaungkan isu-isu pelanggaran HAM di Papua, kebebasan beragama, dan hukuman mati di Indonesia. Pada makalah ini, penulis mengangkat isu HAM di Indonesia yang saat ini cukup jarang dibahas pada level internasional, khususnya dalam diplomasi antarpemerintah dan advokasi transnasional, yaitu diskriminasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa. Makalah ini membahas diskriminasi tersebut dalam sebuah kajian Hubungan Internasional (HI) mengenai identitas etnis Tionghoa<sup>4</sup> di Indonesia.

---

\* Judul tulisan ini terinspirasi oleh judul novel karya Idrus berjudul *Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma*. Sama halnya dengan Idrus, yang novelnya melukiskan tentang kehidupan sehari-hari, penulis tergugah untuk menulis mengenai etnis Tionghoa di Indonesia karena melihat perkembangan politik identitas yang mulai muncul di Indonesia belakangan ini.

<sup>1</sup> Salah satunya pada Sidang Umum PBB ke-71 bulan September 2016, ketika enam negara Pasifik menyerukan agar PBB mengambil tindakan atas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Respon Indonesia atas seruan tersebut menjadi perdebatan yang cukup pelik baik pada tingkat nasional maupun internasional. Meski menarik untuk dibahas, hal tersebut bukan menjadi fokus dalam makalah ini.

---

<sup>2</sup> Human Rights Watch, “Indonesia”, *World Report 2016*, (New York: Seven Stories Press, 2016): 306-312.

<sup>3</sup> Amnesty International, “Indonesia”, *Amnesty International Report 2015/2016*, (London: Amnesty International Ltd., 2016): 186-189.

<sup>4</sup> Sebagai catatan, penulis tidak menafikan bahwa terdapat berbagai sub-etnis Tionghoa di Indonesia seperti Hokkien, Teochew, Kanton, dan sebagainya. Meskipun demikian, dalam kajian-kajian sosial mengenai etnis Tionghoa di Indonesia pada

## Potret Tionghoa: (Masih Ada) Citra Negatif Pasca 1998

Angka '98' masih merupakan momok besar bagi sebagian besar WNI etnis Tionghoa, terutama generasi yang lahir sebelum tahun 1990an. Penyebutan angka tersebut dalam konteks tertentu dipersepsikan sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan etnis Tionghoa di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih kuatnya memori kolektif etnis tersebut atas Kerusuhan Mei 1998. Peristiwa yang merupakan momen kelam dalam sejarah Indonesia, masih menyisakan bekas luka bagi etnis tersebut, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam peristiwa tersebut terjadi berbagai bentuk penyerangan yang secara sistematis ditujukan terhadap etnis Tionghoa.<sup>5</sup>

Meski demikian, hingga saat ini tidak ada bentuk pertanggungjawaban yang nyata dan tegas terhadap para korban Mei 1998, baik secara personal maupun secara kolektif. Pemerintah Indonesia pada era reformasi memang telah berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan rekonsiliasi seperti pencabutan larangan pementasan kebudayaan Tionghoa oleh Presiden Abdurrahman Wahid,<sup>6</sup> serta ditetapkannya Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional oleh Presiden Megawati

---

umumnya, kelompok-kelompok tersebut dapat dipandang sebagai sebuah entitas tunggal yaitu "etnis Tionghoa terlepas dari kewarganegaraan, orientasi budaya, atau identifikasi sosial" (Tan, 1991:119)

<sup>5</sup> Rene L. Pattiradjawane. (2000). "Peristiwa Mei 1998 di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Orang Etnis Cina di Indonesia", dalam Ignatius Wibowo (ed.). *Harga yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000): 212-252.

<sup>6</sup> Tim Lindsey, "Reconstituting the Ethnic Chinese", dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, (Singapore: ISEAS Publications, 2005): 59.

Soekarnoputri mulai tahun 2003.<sup>7</sup> Akan tetapi, berbagai upaya tersebut tidak berhasil menghilangkan citra negatif terhadap WNI etnis Tionghoa di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Setijadi pada tahun 2017 menyimpulkan masih adanya persepsi negatif terhadap etnis Tionghoa terkait previlise ekonomi, pengaruh politik, dan kesetiaan terhadap negara.<sup>8</sup>

Hal ini terbukti dengan adanya sentimen-sentimen yang kental terasa di kalangan masyarakat umum. Isu ke-Tionghoa-an seseorang masih sering dihembuskan pada masa kampanye politik seperti pada Pemilihan Presiden 2014 lalu. "Jokowi Cina" merupakan salah satu serangan yang kerap dilancarkan terhadap pasangan capres-cawapres Joko "Jokowi" Widodo dan Jusuf Kalla, seolah-olah sekiranya Jokowi adalah benar etnis Tionghoa, hal tersebut akan mengurangi kepantasan dan kapabilitasnya selaku calon presiden dalam memimpin Indonesia.<sup>9</sup>

Beberapa insiden lain yang sarat dengan nuansa rasisme pun masih terjadi dengan respon dari aparat pemerintah yang jauh dari memuaskan. Sebagai contoh, insiden pemukulan yang terjadi dalam bus Transjakarta pada 26 Agustus 2016 terhadap Andrew Budikusuma, WNI etnis Tionghoa, sarat dengan nuansa keetnisan. Hal ini terbukti dengan ucapan-ucapan para pelaku pengeroyokan yang sempat mengintimidasi korban dengan kata-kata seperti "Lu Ahok,

---

<sup>7</sup> Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002.

<sup>8</sup> Charlotte Setijadi. Chinese Indonesians in the Eyes of the Pribumi Public. *Perspective*, No. 73, Issue 2017: 11.

<sup>9</sup> Abdul Halim, "Panggil aku Wie Jo Koh alias Jokowi, Antek Asing dan Aseng", *VOA Islam*, 20 Mei 2014, diakses 20 Desember 2016, <http://www.voa-islam.com/read/liberalism/2014/05/20/30232/panggil-aku-wie-jo-koh-alias-jokowi-antek-asing-dan-aseng/#sthash.nTsOKwRb.dpbs>.



10 ya?”<sup>11</sup> dan “Pilih merem apa sipit?”<sup>12</sup> Meski demikian, temuan Polda Metro Jaya menyatakan bahwa pengeroyokan tersebut merupakan kenakalan remaja<sup>13</sup> dan hanya merupakan keisengan semata.<sup>14</sup>

Sementara itu, pada tanggal 29 Juli 2017, tujuh vihara dan kelenteng di Tanjung Balai, Sumatera Utara dibakar dan dijarah oleh ratusan warga.<sup>15</sup> Penyerangan ini dipicu oleh protes Meliana, seorang warga etnis Tionghoa, terhadap suara adzan

---

<sup>10</sup> Catatan pribadi penulis, nyaris tidak ada kesamaan fitur fisik antara Andrew (korban) dengan Ahok (Basuki Tjahaya Purnama, tokoh etnis Tionghoa, calon Gubernur DKI pada pilkada 2017) kecuali keduanya memiliki wajah tipikal etnis Tionghoa (berkulit cerah, bermata sipit).

<sup>11</sup> Martahan Sohutoron, “Polisi Cari Pemukul Pria di Transjakarta yang Teriak ‘Ahok’”, *CNN Indonesia*, 30 Agustus 2016, diakses 20 Desember 2016, [http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830112024-20-](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830112024-20-154767/polisi-cari-pemukul-pria-di-transjakarta-yang-teriak-ahok/)

[154767/polisi-cari-pemukul-pria-di-transjakarta-yang-teriak-ahok/](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830112024-20-154767/polisi-cari-pemukul-pria-di-transjakarta-yang-teriak-ahok/).

<sup>12</sup> Inge Klara Safitri, “Penumpang Transjakarta Dikeroyok, Polisi Periksa Tiga Saksi”, *Tempo Metro*, 31 Agustus 2016, diakses 20 Desember 2016, <https://metro.tempo.co/read/news/2016/08/31/064800443/penumpang-transjakarta-dikeroyok-polisi-periksa-tiga-saksi>.

<sup>13</sup> Sebagai catatan, keseluruhan dari lima pelaku telah berusia 16 tahun ke atas, yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai remaja berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45.

<sup>14</sup> Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Unit 1 Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya, AKP Pius Ponggeng tanggal 3 September 2016. Lihat Muhammad Fida Ul Haq, “Polisi: Pengeroyok Andrew di TransJ Tidak Ada Kaitan Kelompok Anti Ahok”, *Detiknews*, 3 September 2016, diakses 20 Desember 2016, <https://news.detik.com/berita/3290248/polisi-pengeroyok-andrew-di-transj-tidak-ada-kaitan-kelompok-anti-ahok>.

<sup>15</sup> Jumlah vihara dan kelenteng yang dibakar bervariasi dari sumber ke sumber. Penulis mengacu kepada keterangan Jubir Polda Sumatera Utara kepada BBC. Lihat BBC Indonesia, “Amuk Massa di Tanjung Balai, Vihara dan Kelenteng Dibakar”, *BBC Indonesia*, 30 Juli 2016, diakses 20 Desember 2016, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/07/160730\\_indonesia\\_rusuh\\_tanjung\\_balai](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160730_indonesia_rusuh_tanjung_balai).

maghrib dari pengeras suara di masjid dekat rumahnya yang dianggap terlalu lantang.<sup>16</sup> Protes Meliana tersebut dipelintir seolah-olah berorientasi kebencian terhadap agama tertentu dan berhasil memprovokasi massa untuk menyerang tempat-tempat ibadah sebagai aksi pembalasan.<sup>17</sup> Mengingat identitas agama Meliana sebetulnya tidak diketahui oleh para pelaku penyerangan,<sup>18</sup> pilihan rumah ibadah yang dijadikan target penyerangan didasarkan kepada stereotipe terhadap etnis Tionghoa. Meski demikian, pada kasus ini Setara Institute mencatat bahwa Polda Sumatera Utara tidak menginvestigasi pelaku provokasi massa, alih-alih berfokus mengusut dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Meliana.<sup>19</sup>

Insiden-insiden tersebut merupakan sebagian kecil bukti bahwa sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa masih tetap berlangsung di Indonesia. Lebih jauh lagi, aparat pemerintah pun seolah menghidari (sidestep) keberpihakan terhadap etnis Tionghoa. Hal ini tentunya disayangkan mengingat kebijakan pemerintah pasca reformasi seharusnya telah mengubah pandangan umum mengenai etnis Tionghoa.

Pada tulisan ini, penulis berpostulasi melekatnya sentimen negatif terhadap etnis

---

<sup>16</sup> Desitrianita K., “Salah Paham, 7 Tempat Ibadah Terbakar di Tanjung Balai”, *Tempo Hukum*, 30 Juli 2016, diakses 20 Desember 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/30/063791846/salah-paham-7-tempat-ibadah-terbakar-di-tanjung-balai>.

<sup>17</sup> Isyana Artharini, “Polisi Lalai dalam Mencegah Kerusakan Tanjung Balai”, *BBC Indonesia*, 12 Agustus 2016, diakses 20 Desember 2016, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/08/160811\\_indonesia\\_tanjung\\_balai](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160811_indonesia_tanjung_balai).

<sup>18</sup> *Op. cit.*, “Amuk Massa”.

<sup>19</sup> Isyana Artharini, “Dugaan Penistaan Agama dalam Kasus Tanjung Balai”, *BBC Indonesia*, 9 Agustus 2016, diakses 20 Desember 2016, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/08/160808\\_indonesia\\_tanjung\\_balai](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160808_indonesia_tanjung_balai).

Tionghoa hingga saat ini bukan hanya merupakan permasalahan kesenjangan ekonomi sebagaimana yang lazim diangkat. Penulis berargumentasi bahwa sentimen negatif tersebut merupakan akibat dari terlalu dalamnya demonisasi<sup>20</sup> yang dilakukan pada era Orde Baru. Identitas etnis Tionghoa telah dikonstruksikan sedemikian negatif pada era tersebut. Sebagai akibat, terlepas dari upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia pasca Orde Baru, sentimen-sentimen negatif tersebut masih tetap mengakar di kebanyakan masyarakat Indonesia.<sup>21</sup> Dengan kata lain, penulis berpendapat bahwa kondisi sosial WNI etnis Tionghoa di Indonesia merupakan imbas dari skenario politik domestik dan internasional, khususnya pada era Orde Baru. Pemerintah Orde Baru telah melakukan berbagai politik identitas untuk menggalang kekuatan kekuatan. Di tingkat domestik, pemerintah Orde Baru gencar melakukan rekonstruksi identitas<sup>22</sup> Indonesia. Sementara itu, di tingkat internasional, Indonesia bergeser menjauh dari RRT. Kedua kebijakan politik tersebut mengakibatkan terjadinya marjinalisasi dan demonisasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.

---

<sup>20</sup> Penggunaan istilah “demonisasi” merujuk kepada karya Hoon dalam Menkhoff dkk. (2014). Hoon menggambarkan etnis Tionghoa di Indonesia dipandang sebagai setan-setan tamak penuh dosa yang mengeksploitasi kaum pribumi.

<sup>21</sup> Op. cit., “Chinese Indonesians”: 11.

<sup>22</sup> Penulis berpandangan bahwa identitas sebuah entitas tidak bersifat ajeg, namun tidak terlepas dari konstruksi dan praktek politik. Dalam *Ethnicity and Globalization*, Stephen Castles berpandangan bahwa dalam konteks negara-bangsa, identitas politis sebuah negara erat kaitannya dengan identitas etnis sebuah bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, identitas etnis tidak terpisahkan dari praktek-praktek politik. Lihat *Ethnicity and Globalization*, (SAGE Publications Ltd., 2000): 153-154.

## **Rekonstruksi Identitas Indonesia pada Era Orde Baru**

Demonisasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia tidak terlepas dari faktor politik dalam negeri pasca tumbangannya rezim Soekarno yang berada dalam kondisi yang tidak stabil. Dalam rangka melakukan penataan ulang atas Indonesia, salah satu fokus pemerintahan Presiden Soeharto yaitu membangun konsep identitas Indonesia, yang pada penerapannya sangat kental dengan identitas ke-Jawa-an. Hal ini dilakukan dengan cara yang cukup agresif, salah satunya melalui program transmigrasi.<sup>23</sup> Bahkan Barbara Hartley secara ekstrem mengemukakan bahwa pada tahun 1970an terjadi penataan dan penginterpretasian ulang budaya lokal di berbagai tempat di Indonesia secara besar-besaran.<sup>24</sup> Proses pemaksaan identitas Jawa sebagai identitas tunggal ini sering disebut dengan istilah Jawanisasi.<sup>25</sup>

Untuk memahami Jawanisasi yang dilakukan oleh Soeharto, Niels Mulder melakukan penelitian mengenai kebudayaan Jawa. Menurut Mulder, Soeharto yang berasal dari etnis Jawa,<sup>26</sup> mempunyai impian untuk menciptakan keharmonisan dalam Indonesia. Dalam konteks pemikiran Jawa, kesatuan antara rakyat dan pemimpin merupakan hal yang sangat dicita-citakan. Berdasarkan filosofi tersebut, individual

---

<sup>23</sup> Christine Drake, “Spatial Pattern of National Integration in Indonesia”, *Transactions of the Institute of British Geographers*, Vol. 6, No. 4 (1981): 480-488.

<sup>24</sup> Barbara Hartley, “Constructions of Tradition”, *Culture and Society in New Order Indonesia*, (Oxford: Oxford University Press, 1993):74-75.

<sup>25</sup> Marshall Clark, “Shadow Boxing: Indonesian Writers and the Ramayana in the New Order”, *Indonesia*, No. 72 (October 2011): 159-162.

<sup>26</sup> Berdasarkan pembacaan mendalam terhadap Mulder, yang dimaksud Mulder mengenai kebudayaan Jawa adalah Jawa Keratonan (Surakarta/Yogyakarta).

adalah bagian dari kelompok,<sup>27</sup> sedangkan masyarakat adalah bagian dari raja. Keharmonisan ini dapat diraih dengan menciptakan keseragaman dan menyingkirkan keragaman.<sup>28</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pemerintahan Soeharto, identitas-identitas yang tidak sesuai dengan konstruksi “identitas Indonesia” harus diasimilasikan ke dalam “identitas Indonesia”.<sup>29</sup> Proses Jawanisasi ini merupakan salah satu penyebab maraknya rekonstruksi identitas etnis non-Jawa di Indonesia pada era Orde Baru. Identitas-identitas yang tidak sesuai dengan identitas Jawa yang digaungkan oleh Presiden Soeharto dianggap sebagai identitas yang harus diasimilasikan.

Proses Jawanisasi tentunya memarjinalkan kelompok-kelompok etnis non-Jawa yang dituntut untuk menyesuaikan elemen-elemen kehidupannya dengan preskripsi ala Soeharto. Meski demikian, pada pandangan penulis, terdapat sebuah spektrum bagaimana Jawanisasi tersebut memarjinalkan tiap-tiap etnis. Tanpa bermaksud meremehkan pemaksaan kebudayaan Jawa terhadap etnis-etnis lain pada era Orde Baru, penulis memandang bahwa etnis Tionghoa merupakan salah satu kelompok yang mengalami dampak negatif terbesar pada era tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa secara umum, kebudayaan etnis Tionghoa bersifat sangat bertolak belakang dengan identitas Jawa yang dipromosikan sebagai “identitas

Indonesia”. Budaya etnis Tionghoa terkenal sebagai budaya yang dinamis. Hal ini terbukti dengan berbagai komponen budaya yang bersifat meriah seperti penampilan barongsai, penggunaan petasan pada upacara-upacara adat, kebiasaan makan sambil berbincang-bincang dan seterusnya. Kedinamisan tersebut juga termanifestasikan dalam hubungan antar individu. Etnis Tionghoa berkarakter lebih terbuka, egaliter, dan berani berkonfrontasi secara langsung. Hal ini dikarenakan dalam budaya etnis Tionghoa, kecepatan dan ketepatan komunikasi sangat diutamakan.

Sementara itu, di sisi lain, kebudayaan Jawa cenderung bersifat tenang dan khidmat. Produk-produk kebudayaan Jawa juga menekankan pentingnya keteraturan, terbukti dengan munculnya berbagai macam pembakuan (pakem), baik pakem dalam bermusik,<sup>30</sup> pakem dalam olah bicara,<sup>31</sup> maupun pakem dalam seni tari.<sup>32</sup> Dalam pergaulan yang dilatarbelakangi kebudayaan Jawa yang tertutup, hierarkis dan tidak langsung, etnis Tionghoa dipandang sebagai kelompok etnis yang kasar dan tidak mengenal tata krama.<sup>33</sup> Di sisi lain, etnis Tionghoa acap kali mempermasalahkan kelambanan birokrasi yang kental dengan nuansa Jawa. Perbedaan kebudayaan yang cukup diametral antara etnis Tionghoa dengan keumuman yang dipaksakan sebagai “identitas Indonesia” pada era Orde Baru tersebut mengakibatkan WNI etnis Tionghoa cenderung sukar untuk

---

<sup>27</sup> Hal ini yang melandasi dilakukannya Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam sistem pemerintahan Soeharto yang sangat hierarkis, yang dimaksudkan untuk memudahkan kontrol pemerintah pusat hingga pada tingkatan akar rumput.

<sup>28</sup> Niels Mulder, *Inside Indonesian Society: Cultural Change in Java*, (Amsterdam: The Pepin Press, 1996): 56-57.

<sup>29</sup> Leo Suryadinata, “Indonesian Policies toward the Chinese Minority under the New Order”, *Asian Survey*, Vol. 16, No.8, (Aug., 1976):776.

---

<sup>30</sup> Yasadipura I, *The Book of Cabolek*, terjemahan Bahasa Inggris oleh S. Soebardi, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1975): 53-55.

<sup>31</sup> John Myhill, “A Quantitative Analysis of the Use of the Javanese Speech Levels in a Modern Anthology”, *Oceanic Linguistics*, Vol. 33, No. 1 (Jun., 1994): 73-103.

<sup>32</sup> Felicia Hughes-Freeland, “Dance, Dissimulation and Identity in Indonesia”, dalam Joy Hendry dan C.W. Watson, *An Anthropology of Indirect Communication*, (New York: Routledge, 2003):146-147.

<sup>33</sup> *Op. cit.*, *Inside*: 53-54.

berasimilasi di Indonesia, yang berakibat terjadinya segregasi dalam kehidupan kemasyarakatan.

### **Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia**

Lebih lanjut lagi, hal tersebut diperburuk dengan merenggangnya hubungan bilateral Indonesia dengan RRT. Pada awal masa pemerintahan Orde Baru, perpolitikan internasional didominasi oleh Perang Dingin, dengan polaritas ideologi kapitalis-komunis yang diwakili oleh dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kondisi perpolitikan internasional tersebut memaksa negara-negara kecil untuk memiliki kecenderungan untuk memihak salah satu dari dua negara adidaya tersebut dengan bergabung kepada “blok Barat” atau “blok Timur”. Meskipun Indonesia merupakan pendiri Gerakan Non-Blok (GNB), pada akhir era pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia lebih memiliki kedekatan dengan blok Timur.<sup>34</sup>

Meski demikian, pergantian era pemerintahan Indonesia dari Orde Lama kepada Orde Baru sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Salah satunya, Indonesia cenderung menjauh dari blok Timur, khususnya dari RRT. Retorika-retorika mengenai RRT yang disinyalir berada di balik layar rencana kudeta G30S PKI dikembangkan oleh pemerintahan Soeharto.<sup>35</sup> Hal tersebut mengakibatkan

antagonisme Indonesia terhadap Tiongkok yang puncaknya ditandai dengan pemutusan hubungan diplomatik kedua negara tanggal 9 Oktober 1967.<sup>36</sup>

Dampak antagonisme tersebut sangat dirasakan oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Etnis Tionghoa di Indonesia dituduh sebagai Kuda Troya (*Trojan Horse*), yaitu agen-agen RRT di Indonesia yang bermaksud melemahkan Indonesia.<sup>37</sup> Konstruksi sedemikian dapat dilihat dari perubahan resmi penggunaan istilah Tionghoa dan Tiongkok menjadi Tjina pada tahun 1967.<sup>38</sup> Pemilihan kata ‘Tjina’ untuk mendeskripsikan keduanya dapat diinterpretasikan mengandung makna bahwa etnis Tionghoa di Indonesia lebih memiliki kedekatan/kesamaan dengan penduduk Republik Rakyat Tiongkok (RRT).<sup>39</sup>

Terlebih lagi pada saat itu RRT menganut paham jus sanguinis<sup>40</sup> terkait kewarganegaraan penduduknya. Presiden RRT saat itu, Mao Zedong pernah mengeluarkan pernyataan pada First Plenary Session of the Chinese People’s Political Consultative Conference 1949. Mengutip hukum kenegaraan RRT tahun 1909, Mao menyatakan bahwa seluruh etnis Tionghoa

---

<sup>34</sup> Dalam logika realisme, hal ini sesuai dengan teori perimbangan kekuatan (“*balance of power*”) oleh Kenneth Waltz. Menurut Waltz, negara-negara lemah tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk menahan laju kekuatan negara-negara kuat. Akhirnya negara-negara lemah berkecenderungan memilih untuk bergabung (“*bandwagoning*”) dengan negara-negara kuat. Lihat Waltz (1979).

<sup>35</sup> Zhou Taomo, “China and the Thirtieth of September Movement”, *Indonesia*, No. 98 (Oktober 2014): 29-58.

---

<sup>36</sup> Michael Williams, “China and Indonesia Make up: Reflections on a Troubled Relationship”, *Indonesia* (Special Issue 1991): 150.

<sup>37</sup> Arief Budiman, “Portrait of the Chinese”, dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, (Singapore: ISEAS Publications, 2005): 98.

<sup>38</sup> Charles Coppel, “Introduction: Researching the Margins”, dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, (Singapore: ISEAS Publications, 2005): 2.

<sup>39</sup> Padahal, berdasarkan penelitian Cumingham, WNI etnis Tionghoa lebih memiliki kesamaan karakter dengan WNI ‘pribumi’ jika dibandingkan dengan warganegara RRT. Lihat Cumingham (2008:104).

<sup>40</sup> *Jus sanguinis* merupakan istilah yang bermakna kewarganegaraan seseorang tergantung kepada keturunannya, yaitu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Lihat Bertocchi dan Strozzi (2010).

perantauan (sojourner/huaqiao) merupakan bagian dari “kehendak rakyat” (“will of the people”).<sup>41</sup> Implikasinya, para huaqiao, selama masih menjunjung tinggi kebudayaan Tionghoa dan secara sukarela menyatakan loyal kepada pemerintahan RRT, dapat dianggap sebagai warganegara RRT.<sup>42</sup>

Sementara itu di Indonesia, para *huaqiao* dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok totok dan kelompok peranakan. Menurut Leo Suryadinata, kelompok totok sangat menjunjung tinggi budaya Tionghoa dan merupakan loyalis Tiongkok, sedangkan kelompok peranakan cenderung mengintegrasikan diri dengan Indonesia.<sup>43</sup> Ketika Pemerintah RRT di Beijing pada tahun 1959 menyerukan kepada para *huaqiao* di Indonesia untuk kembali ke tanah leluhurnya di RRT untuk menghindari kebijakan diskriminatif Pemerintah Indonesia, seruan tersebut direspon oleh beberapa *huaqiao* totok yang meninggalkan Indonesia.<sup>44</sup> Migrasi ini memperburuk citra etnis Tionghoa di Indonesia. Ironisnya, justru kelompok *huaqiao* peranakanlah terkena dampak negatif tersebut meskipun kelompok ini memutuskan untuk tetap menjadi WNI. Pada kasus ini, dapat dilihat bahwa “*the personal is international*”.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Jenny Edkins dan Maja Zehfuss, *Global Politics: A New Introduction*, (New York: Routledge, 2014): 249-250.

<sup>42</sup> Elena Barabantseva, *Overseas Chinese, Ethnic Minorities and Nationalism: De-Centering China*, (New York: Routledge, 2011): 24.

<sup>43</sup> Leo Suryadinata, “Chinese Politics in Post-Suharto’s Indonesia: Beyond the Ethnic Approach”, *Asian Survey*, Vol. 41, No. 3 (Mei/Juni 2001): 503-504.

<sup>44</sup> Paul J. Bolt, “Looking to the Diaspora: The Overseas Chinese and China’s Economic Development, 1978-1998”, *Diaspora: A Journal of Transnationalist Studies*, Vol. 5, No. 3: 467-496.

<sup>45</sup> “*The personal is international*” merupakan frase yang dipopulerkan oleh Cynthia Enloe dalam buku *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense*

## Konstruksi dan Demonisasi Kaum Liyan di Indonesia

Proses Jawanisasi dan memburuknya hubungan luar negeri Indonesia dengan RRT mengakibatkan munculnya segregasi antara WNI pada umumnya dan WNI etnis Tionghoa. Seiring waktu, segregasi tersebut menjadi sangat nyata. Pemerintah Orde Baru alih-alih melakukan tindakan perimbangan (countermeasure) justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pada prinsipnya sangat bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk me-Liyan-kan<sup>46</sup> etnis Tionghoa.

Konstruksi ‘Liyan’ terhadap etnis Tionghoa berada dalam posisi relasional terhadap ‘Diri’ Indonesia.<sup>47</sup> Mengingat identitas etnis Tionghoa yang sedemikian berbeda dengan identitas Indonesia’, untuk menjadi WNI, maka atribut-atribut identitas etnis tersebut harus ditinggalkan. Peng-‘Indonesia’-an etnis Tionghoa tersebut dilakukan melalui mekanisme-mekanisme kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertama, melalui Keputusan Presiden No. 127/U/Kep/12/1966, dengan dalih penyeragaman nama-nama WNI, para WNI etnis Tionghoa dianjurkan<sup>48</sup> mengadopsi nama yang “sesuai dengan nama Indonesia

---

*of International Politics*. Enloe mendapatkan inspirasi dari esai Carol Hanisch berjudul *The Personal Is Political*. Kedua frase tersebut sering dipergunakan sebagai slogan dan argumentasi perlawanan feminisme terhadap patriarki. Frase tersebut menggambarkan kedekatan ranah individual dengan ranah politik, terutama politik internasional. Lihat Hanisch (1969) dan Enloe (2000).

<sup>46</sup> Liyan (*others*) merupakan subjek-subjek lain yang berbeda dengan Diri (*self*), namun tetap berada dalam bingkai ko-eksistensi dengan diri. Lihat de Beauvoir (1949).

<sup>47</sup> Donald M. Nonini, “Indonesia Seen by Outside Insiders: Its Chinese Alters in Transnational Space”, *The International Journal of Social and Cultural*, Vol. 50, No. 1 (Spring 2006):216.

<sup>48</sup> Tepatnya “diwajibkan”. Lihat Coppel (2002).

asli”.<sup>49</sup> Nama Tionghoa umumnya terdiri dari dua atau tiga suku kata. Suku kata pertama merupakan nama keluarga, sedangkan suku-suku kata berikutnya merupakan nama diri. Contohnya, Kwee Cin Lay merupakan seorang WNI etnis Tionghoa dari keluarga Kwee dari generasi Cin<sup>50</sup> dengan nama diri Cin Lay.

Sesuai dengan Keppres tersebut, para WNI etnis Tionghoa harus mengubah nama mereka menjadi nama lain yang lebih ‘Indonesia’. Sebagai upaya mempertahankan identitas, sebagian WNI etnis Tionghoa menginkorporasikan nama Tionghoa ke dalam nama yang mereka adopsi.<sup>51</sup> Dengan demikian nama-nama “Frankenstein” seperti **Tantono**, **Liwang**, **Tjiayady**, dan sebagainya muncul sebagai kelaziman di komunitas-komunitas Tionghoa.

Kedua, mayoritas WNI etnis Tionghoa di Indonesia pada awal era Orde Baru menganut kepercayaan Buddha, Kong Hu Cu, dan Tao. Ketiga ajaran agama tersebut membentuk asosiasi keagamaan yang diberi nama Sam Kauw Hwee (atau Tri Dharma).<sup>52</sup> Hingga tahun 1967, keberadaan ketiga agama tersebut diakui, sekurang-kurangnya diizinkan oleh Pemerintah. Meski demikian, Keputusan Presiden No. 14/1967 hanya mengakui lima agama di Indonesia,

yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Berdasarkan Keppres tersebut, eksistensi beberapa ajaran agama dan kepercayaan di Indonesia, termasuk Kong Hu Cu dan Tao, menjadi kehilangan dasar legalitasnya. Secara khusus bahkan Kong Hu Cu dan Tao tidak diakui sebagai agama dan dileburkan secara paksa ke dalam agama Buddha (Suryadinata, 1995: 199-200).

Bahkan lebih lanjut lagi, ajaran-ajaran politeistik Tri Dharma dianggap tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Interpretasi yang diterima pada masa tersebut menyatakan bahwa Indonesia hanya mengakui konsep monoteisme. Dengan demikian, kepercayaan-kepercayaan politeisme harus menyesuaikan ajarannya atau dianggap sebagai sekte ilegal.<sup>53</sup> Merujuk interpretasi tersebut, ajaran-ajaran Tri Dharma harus diubahsuaikan berdasarkan kisi-kisi monoteisme yang digariskan pemerintah Orde Baru.<sup>54</sup>

Ketiga, Pemerintah Indonesia pada era Orde Baru, berdasarkan Keputusan Presiden No. 49/V/IN/8/1967 melarang materi publikasi dan periklanan yang ditulis dengan tulisan Hanzi.<sup>55</sup> Coppel menganggap

<sup>49</sup> *Op. cit.*, *Reconstructing*: 55.

<sup>50</sup> Beberapa klan masih mempertahankan tradisi pemberian nama generasi sebagai suku kata kedua dalam sebuah nama Tionghoa.

<sup>51</sup> Tidak semua melakukan hal ini. Sebagai contoh, Kwee Cin Lay mempergunakan nama Michael J. Kristiono. Hal ini merupakan hal yang cukup ironis mengingat nama “Michael” tentunya bukan “nama Indonesia asli”. Pada pandangan penulis, hal ini merupakan bukti adanya diskriminasi etnis atas WNI etnis Tionghoa mengingat secara keseluruhan, hanya nama Tionghoa saja yang terimbas peraturan ini. Nama-nama Raam Punjabi (India), Abdurrahman Wahid (Arab), dan Joop Ave (Belanda) masih banyak beredar pada era Orde Baru.

<sup>52</sup> Iem Brown, “Religions of the Chinese in Indonesia”, dalam Leo Suryadinata (ed.), *The Ethnic Chinese in the ASEAN*, (Singapore: ISEAS Publications, 1989): 107-108.

<sup>53</sup> Situasi yang sama dialami oleh umat Hindu di Indonesia. Ajaran Hindu dari India bersifat politeistik. Para penganut agama Hindu di Bali, demi mempertahankan eksistensi agama Hindu secara administratif, di atas kertas disesuaikan dengan “mengangkat” Siwa sebagai dewa utama yang disembah. Berdasarkan komunikasi informal dengan beberapa WNI etnis Bali pemeluk agama Hindu.

<sup>54</sup> Sebagai contoh, Maha Sangha Indonesia mengajarkan konsep Adi Buddha, yaitu figur teragung dalam ketuhanan Buddha. Buddha Maitreya di sisi lain mempercayai keberadaan Mingming Shangdi, yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Lihat Leo Suryadinata, “Buddhism and Confucianism in Contemporary Indonesia”, dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, (Singapore: ISEAS Publications, 2005): 79-85.

<sup>55</sup> Andreas Susanto, “Diversity in Compliance”, dalam Marleen Dieleman dkk. (eds), *Chinese*

unsur ini merupakan diskriminasi etnis yang paling gamblang mengingat tidak ada pelarangan serupa terhadap publikasi yang diterbitkan dengan tulisan non-Romawi (*non-Romanized script*) seperti tulisan Arab, bahkan tulisan Jepang yang ditulis dengan huruf Kanji (derivasi dari Hanzi).<sup>56</sup>

Dalam pelaksanaannya, pelarangan tersebut juga mencakup pelarangan terhadap penggunaan Bahasa Mandarin<sup>57</sup> di ruang publik. Film-film populer dari Tiongkok daratan, Hong Kong, dan Taiwan seperti film-film bergenre drama dan kungfu yang ditampilkan di ruang publik harus dialihsuarakan ke dalam Bahasa Indonesia.<sup>58</sup> Imbas dari pelarangan ini adalah makin berkurangnya keterikatan etnis Tionghoa dengan tradisi etnisnya karena dihilangkannya akses terhadap warisan budaya, baik lisan dan tulisan. Beberapa komunitas etnis Tionghoa masih menggunakan Bahasa Mandarin dan/atau pada ruang-ruang privat namun secara umum rasa keberpemilikan (*sense of belonging*) terhadap kebudayaan Tionghoa makin berkurang.

Keempat, kebijakan yang sangat menunjukkan upaya meng-'Indonesia'-kan etnis Tionghoa adalah diwajibkannya Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi WNI etnis tersebut. UU No. 62/1958 diperkuat Keputusan Presiden No. 2/1980 dan No. 13/1980, menyatakan bahwa SBKRI ditujukan untuk memfasilitasi pembuktian status kewarganegaraan Indonesia bagi warganegara keturunan asing.<sup>59</sup> Penulis berargumen bahwa

penerapan SBKRI berimplikasi bahwa penduduk Tionghoa tetap dianggap sebagai non-WNI oleh pemerintah era Orde Baru.

Meski demikian, prasyarat SBKRI pada prakteknya hanya diterapkan kepada etnis Tionghoa. WNI keturunan 'pendatang' lainnya seperti etnis Arab dan India, tidak membutuhkan SBKRI layaknya etnis Tionghoa. SBKRI dapat dipandang sebagai instrumen legal yang dipergunakan oleh oknum-oknum birokrasi untuk memeras etnis Tionghoa yang membutuhkan dokumen tersebut untuk mengurus-dokumen administratif kewarganegaraan, mendaftarkan diri untuk mengikuti pendidikan tinggi negeri, melamar kerja pada institusi pemerintahan, dan sebagainya.<sup>60</sup>

Sistem SBKRI merupakan sistem diskriminatif yang tetap dipertahankan sekurang-kurangnya hingga era Reformasi.<sup>61</sup> Menurut temuan surat kabar The Jakarta Post, SBKRI masih diperlukan untuk pembuatan paspor dan dokumen-dokumen kewarganegaraan lainnya hingga tahun 2003.<sup>62</sup> Sejatinya, WNI etnis Tionghoa yang secara resmi mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau bukti identitas kewarganegaraan Indonesia yang valid tidak perlu lagi mendeklarasikan status kewarganegaraannya, terlebih lagi bagi etnis Tionghoa yang sudah menjadi WNI sejak lahir. Penolakan Pemerintah Indonesia untuk mencabut atau merevisi peraturan terkait

---

*Indonesians and Regime Change*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2011): 69.

<sup>56</sup> Charles Coppel, *Studying Ethnic Chinese in Indonesia*, (Singapore: Singapore Society of Asian Studies, 2002): 24.

<sup>57</sup> Kebijakan ini juga mencakup bahasa atau dialek lain yang berasal dari Tiongkok seperti Hokkien, Kwangtung, dan Hakka.

<sup>58</sup> *Op. cit.*, Susanto: 70.

<sup>59</sup> *Op. cit.*, *Reconstituting*: 50-51

---

<sup>60</sup> *Op. cit.*, *Studying*: 371.

<sup>61</sup> Jemma Purdey, "Anti-Chinese Violence and Transitions in Indonesia", dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, (Singapore: ISEAS Publications, 2005): 22.

<sup>62</sup> Jakarta Post, "SBKRI: Segregation in Practice" (editorial), 15 Agustus 2003. Lebih lanjut lagi, berdasarkan pengalaman pribadi penulis, SBKRI masih diperlukan untuk pengurusan dokumen perjalanan (paspor) pada tahun 2001. Pengurusan SBKRI di Kantor Imigrasi Cilacap dikenakan biaya dua ratus ribu rupiah untuk jalur "normal", satu juta rupiah untuk jalur "cepat".

SBKRI menunjukkan sikap setengah-setengah (“forked tongue”) terhadap proses rekonsiliasi dengan etnis Tionghoa di Indonesia.<sup>63</sup>

### **Potret Tjina: Pelanggaran HAM yang Belum Terselesaikan**

Berdasarkan definisi UNESCO sebagaimana termaktub dalam Deklarasi San Jose 1981, etnosida merupakan sebuah proses dimana sebuah kelompok etnis dipungkiri haknya untuk menikmati, mengembangkan, dan menularkan kebudayaan dan bahasanya sendiri, baik secara kolektif maupun secara individual.<sup>64</sup> Dalam dokumen yang sama dinyatakan bahwa etnosida merupakan bentuk ekstrem dalam pelanggaran HAM secara masif.

Sejalan dengan definisi tersebut dan beberapa definisi lain,<sup>65</sup> demonisasi yang dilakukan pada era Orde Baru sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya dapat dipandang sebagai etnosida terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Pelarangan penggunaan nama, agama, dan bahasa tradisional etnis Tionghoa, ditambah dengan

pembatasan hak-hak sipil dalam kebijakan SBKRI, cukup sesuai dengan definisi etnosida yang diterima secara universal. Akibatnya, bagi sebagian besar etnis Tionghoa, identitas ke-Tionghoa-an mereka hanya sebatas pada ranah jasmani semata.

Indonesia sebagai negara anggota PBB yang telah mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), tentunya memiliki kewajiban untuk melindungi penegakan HAM di wilayahnya.<sup>66</sup> Sebagai negara yang memegang prinsip demokrasi, seharusnya Indonesia berkomitmen untuk melindungi penegakan HAM di wilayahnya.<sup>67</sup> Terlebih lagi secara substansi, konsep-konsep HAM telah diinkorporasikan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti Pasal 28 mengenai kemerdekaan berserikat dan Pasal 32 ayat 1 mengenai kebebasan mengembangkan nilai budaya.<sup>68</sup>

Mengingat demonisasi etnis Tionghoa dilakukan melalui mekanisme legal nasional, maka upaya pemulihan identitas etnis Tionghoa sudah sewajarnya juga dilakukan melalui mekanisme formal. Meski demikian, kebijakan-kebijakan era Reformasi masih belum berhasil menyelesaikan isu ini secara menyeluruh. Pemerintah Indonesia perlu menunjukkan komitmen total dalam upaya rekonsiliasi dengan WNI Indonesia. Sebagai bukti konkret, pencabutan produk-produk hukum bermasalah perlu dilakukan, yang dibarengi

---

<sup>63</sup> Coppel mencontohkan Instruksi Presiden No. 4/1999 oleh Presiden Habibie, dan pernyataan Menkumham era Presiden Megawati, Yusril Ihza Mahendra, yang sengaja dinarasikan secara abstrak untuk menggambarkan bagaimana Pemerintah Indonesia bersikap setengah-setengah terhadap SBKRI. Lihat *Studying*: 373.

<sup>64</sup> UNESCO Latin-American Conference, *Declaration of San Jose, 11 December 1981*, UNESCO Doc. FS 82/WF 31 (1982).

<sup>65</sup> Pada pandangan penulis, penghilangan identitas etnis secara paksa dan terstruktur tidak ubahnya dengan etnosida. Penulis sependapat dengan Clavero, yang menggambarkan etnosida sebagai pemusnahan kebudayaan sosial melalui pembunuhan jiwa (“souls”), tanpa harus membunuh individu. Dalam kasus ini, pembunuhan tidak dilakukan dengan menyapakan paksa fisik WNI etnis Tionghoa, melainkan dengan menyapakan paksa identitas Tionghoa dari individu tersebut. Lihat Bartolome Clavero, *Genocide or Ethnocide, 1933-2007: How to Make, Unmake, and Remake Law with Words*, (Firenze: Giuffre Editore, 2008): 100.

---

<sup>66</sup> Pemaksaan identitas ‘Indonesia’ kepada WNI etnis Tionghoa pada era Orde Baru juga merupakan pelanggaran terhadap beberapa artikel dalam DUHAM. Antara lain Artikel 2 mengenai diskriminasi etnis, Artikel 18 mengenai agama dan kepercayaan, Artikel 20 mengenai kebebasan berserikat. Lihat United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948, diakses 20 Desember 2016 [www.un.org/udhr\\_booklet\\_en\\_web](http://www.un.org/udhr_booklet_en_web).

<sup>67</sup> J. Soedjati Djiwandono, “Progress in Democratic Experiment in Indonesia?”, *Southeast Asian Affairs* (1989): 155-167.

<sup>68</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



dengan upaya-upaya penguatan proses penegakan hukum di Indonesia.

### **Kesimpulan: The Personal is International**

Berdasarkan pembahasan di atas, tulisan ini berkesimpulan bahwa sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa di Indonesia bukan hanya merupakan isu sosial-ekonomi domestik semata, melainkan juga dampak dari perpolitikan internasional. Pada era Orde Baru, WNI etnis Tionghoa di Indonesia mengalami pelanggaran HAM dalam bentuk demonisasi etnis. Etnis Tionghoa dikonstruksikan secara sistemis dan sistematis sebagai kaum Liyan, yang dalam hal ini dimaknai sebagai non-WNI. Demonisasi ini terjadi terhadap etnis Tionghoa karena dua alasan politis.

Pertama, sebagai bagian dari de-Soekarnoisasi, Soeharto melakukan konstruksi sosial terhadap identitas Indonesia melalui program Jawanisasi. Identitas-identitas yang tidak sesuai dengan identitas Indonesia harus ditanggalkan, termasuk identitas etnis Tionghoa. Namun demikian, WNI etnis Tionghoa sangat sukar menyesuaikan dengan identitas baru tersebut mengingat budaya Tionghoa yang bersifat diametral terhadap budaya Jawa.

Kedua, perlakuan diskriminasi terhadap WNI etnis Tionghoa merupakan dampak dari perubahan kebijakan luar negeri Indonesia. Pada akhir pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia memang cenderung dekat dengan Blok Timur. Meski demikian, memasuki Orde Baru, hubungan bilateral antara Indonesia dengan RRT memburuk. Salah satunya, RRT disinyalir

mendukung Peristiwa G30S PKI. Imbasnya, WNI etnis Tionghoa dipandang sebagai kuda Troya yang mengancam kedaulatan Indonesia.

Bukan hanya dipandang sebagai kaum Liyan, WNI etnis Tionghoa juga dipandang sebagai agen-agen negara lain yang mengancam Indonesia. Pemerintah era Orde Baru, alih-alih mengambil tindakan preventif maupun korektif terhadap adanya pandangan negatif tersebut, justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justru memarjinalkan dan mendemonisasi etnis Tionghoa, dan efektif justru melanggengkan citra negatif tersebut. Akibatnya, sentimen-sentimen negatif terhadap WNI etnis Tionghoa makin mengakar, yang puncaknya terjadi pada Kerusuhan Mei 1998.

Meskipun Pemerintah Indonesia pasca reformasi telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan rekonsiliasi, nyatanya sentimen tersebut tidak hilang begitu saja. Pada pandangan penulis, dengan mengingat prinsip demokrasi dan penegakan HAM yang sering digaungkan Pemerintah Indonesia, diperlukan sebuah tindakan nyata dan tegas dari Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemenuhan HAM bagi WNI etnis Tionghoa di Indonesia.

## ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Ani W. Soetjipto dan A.A. Sg. Dwinta Kuntaladara yang merupakan pemantik pemikiran penulis terhadap isu HAM dalam HI. Penulis juga berterima kasih kepada Resmita Reski Hariyani dan Alice Kang Hyunji atas masukan-masukannya terhadap manuskrip awal tulisan ini.

## REFERENCES

- Ackerly, B. (2008). *Universal human rights in a world of difference*. UK: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511756016.001>
- Amnesty International. (2016). Indonesia. *Amnesty International Report 2015/2016*. London: Amnesty International Ltd.
- Artharini, I. (2016, August 12). Polisi lalai dalam mencegah kerusuhan tanjung balai. *BBC Indonesia*. Retrieved from [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/08/160811\\_indonesia\\_tanjung\\_balai](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160811_indonesia_tanjung_balai)
- Artharini, I. (2016, August 9). Dugaan penistaan agama dalam kasus tanjung balai. *BBC Indonesia*. Retrieved from [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/08/160808\\_indonesia\\_tanjung\\_balai](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160808_indonesia_tanjung_balai)
- Barabantseva, E. (2011). *Overseas Chinese, ethnic minorities and nationalism: De-centering China*. New York, NY: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203845462>
- BBC Indonesia. (2016, July 30). Amuk massa di tanjung balai, vihara dan kelenteng dibakar. *BBC Indonesia*. Retrieved from [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/07/160730\\_indonesia\\_rusuh\\_tanjung\\_balai](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160730_indonesia_rusuh_tanjung_balai)
- Bertocchi, G. & Strozzi, C.. (2010). The evolution of citizenship. *The Journal of Law and Economics*, 53(1). <https://doi.org/10.1086/600080>
- Bolt, P. J. (1996). Looking to the diaspora: The overseas Chinese and China's economic development 1978-1998. *Diaspora: A Journal of Transnationalist Studies*, 5(3). <https://doi.org/10.1353/dsp.1996.0019>
- Brown, I. (1989). Religions of the Chinese in Indonesia. *The Ethnic Chinese in the ASEAN States: Bibliographical Essays*. Singapore: ISEAS Publications.
- Budiman, A. (2005). Portrait of the Chinese in Post-Soeharto Indonesia. In T. Lindsey & H. Pausacker (Eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, distorting, forgetting* (pp. 95-104). Singapore: ISEAS Publications. <https://doi.org/10.1355/9789812305442-009>
- Castles, S. (2000). *Ethnicity and globalization: From migrant worker to transnational citizen*. London: SAGE Publications Ltd. <http://dx.doi.org/10.4135/9781446217733>
- Clark, M. (2011). Shadow boxing: Indonesian writers and the Ramayana in the New Order. *Indonesia*, No. 72. <https://doi.org/10.2307/3351485>
- Clavero, B. (2008). *Genocide or ethnocide, 1933-2007: How to make, unmake, and remake law with words*. Firenze: Giuffre Editore.
- Coppel, C. (2002). *Studying ethnic Chinese in Indonesia*. Singapore: Singapore Society of Asian Studies.

- Coppel, C. (2005). Introduction: Researching the margins. In T. Lindsey & H. Pausacker (Eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, distorting, forgetting* (pp. 1-13). Singapore: ISEAS Publications. <https://doi.org/10.1355/9789812305442-005>
- Cummingham, C. E. (2008). *Unity and diversity among Indonesian migrants to the United States*. In H. Ling (Ed.), *Emerging voices: Experiences of underrepresented Asian Americans* (pp. 90-108). New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt5hj06v>
- de Beauvoir, S. (1949). *The second sex*. New York, NY: Vintage Books.
- Djiwandono, J. S. (1989). Progress in democratic experiment in Indonesia? In C. Y. Ng (Ed.), *Southeast Asian Affairs 1989* (pp. 155-168). Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute. <https://doi.org/10.1355/9789812306791-010>
- Drake, C. (1981). Spatial pattern of national integration in Indonesia. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 6(4). <https://doi.org/10.2307/621880>
- Edkins, J. & Zehfuss, M. (2014). *Global politics: A new introduction*. New York, NY: Routledge.
- Enloe, C. (2000). *Bananas, beaches and bases: Making feminist sense of international politics*. Berkeley, CA: University of California Press. <https://doi.org/10.2307/2075007>
- Halim, A. (2014, May 8). Panggil aku Wie Jo Koh alias Jokowi, Antek Asing dan Aseng. *Gurutomo*. Retrieved from <http://gurutomo.blogspot.com/2014/05/panggil-aku-wie-jo-koh-alias-jokowi.html>
- Hanisch, C. (1969). The personal is political. In S. Firestone & A. Doedt (Eds.), *Notes from Second Year: Women's Liberation*. New York, NY: Radical Feminist.
- Hartley, B. (1993). Constructions of tradition. In V. M. Hooker (Ed.), *Culture and society in New Order Indonesia*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Hendry, J. & Watson, C.W. (2003). *An anthropology of indirect communication*. New York, NY: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203428573>
- Hoon, C. Y. (2014). Evolving Chineseness, ethnicity and business: The making of the ethnic Chinese as a 'market-dominant minority' in Indonesia. In T. Menkhoff, H-D Evers, Y.W. Chay, & C. Y. Hoon (Eds.) *Catalyst for change: Chinese business in Asia* (pp.107-127). Singapore: World Scientific Publishing. [https://doi.org/10.1142/9789814452427\\_0005](https://doi.org/10.1142/9789814452427_0005)
- Human Rights Watch. (2016). Indonesia. *World report 2016*. New York, NY: Seven Stories Press.
- K. D. (2016, Juli 30). Salah paham, 7 Tempat Ibadah Terbakar di Tanjung Balai. *Tempo Hukum*. Retrieved from <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/30/063791846/salah-paham-7-tempat-ibadah-terbakar-di-tanjung-balai>
- Lindsey, T. (2005). Reconstituting the ethnic Chinese in Post-Soeharto Indonesia: Law, racial, discrimination, and reform. In T. Lindsey & H. Pausacker (Eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, distorting, forgetting* (pp. 41-76). Singapore: ISEAS Publications. <https://doi.org/10.1355/9789812305442-007>
- Menkhoff, T., Evers H-D., Chay, Y. W. & Hoon C. Y. (Eds.) (2014). *Catalyst for change: Chinese business in Asia*. Singapore: World Scientific Publishing. <https://doi.org/10.1142/8730>
- Mulder, N. (1996). *Inside Indonesian society: Cultural change in Java*. Amsterdam: The Pepin Press.
- Myhill, J. (1994). A quantitative analysis of the use of the Javanese speech levels in a modern anthology. *Oceanic Linguistics*, 33(1). <https://doi.org/10.2307/3623001>

- Pattiradjawane, R. L. (2000). Peristiwa Mei 1998 di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Orang Etnis Cina di Indonesia. *Harga yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purdey, J. (2005). Anti-Chinese violence and transitions in Indonesia: June 1998-October 1999. In T. Lindsey & H. Pausacker (Eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, distorting, forgetting* (pp. 14-40). Singapore: ISEAS Publications.  
<https://doi.org/10.1355/9789812305442-006>
- Safitri, I. K. (2016, August 31). Penumpang transjakarta dikeroyok, polisi periksa tiga taksi. *Tempo Metro*. Diakses dari  
<https://metro.tempo.co/read/news/2016/08/31/064800443/penumpang-transjakarta-dikeroyok-polisi-periksa-tiga-saksi>
- Setijadi, C. (2017). Chinese Indonesians in the eyes of the pribumi public. *Perspective*, 73(2017). Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.
- SBKRI: Segregation in Practice [editorial]. (2003, August 15). *Jakarta Post*.
- Sohutoron, M. (2016, August 30). Polisi cari pemukul pria di transjakarta yang teriak 'Ahok'. *CNN Indonesia*. Retrieved from  
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830112024-20-154767/polisi-cari-pemukul-pria-di-transjakarta-yang-teriak-ahok/>
- Suryadinata, L. (2005). Buddhism and Confucianism in contemporary Indonesia: Recent developmetns. In T. Lindsey & H. Pausacker (Eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, distorting, forgetting* (pp. 77-94). Singapore: ISEAS Publications.  
<https://doi.org/10.1355/9789812305442-008>
- Suryadinata, L. (1995). Kong hu cuisme dan agama kong hu cu di Indonesia. *Konfusianisme di Indonesia. Pergulatan Mencari Jati Diri*. Interfidei: Seri Dian 3 Year 2.
- Suryadinata, L. (1976). Indonesian policies toward the Chinese minority under the New Order. *Asian Survey*, 16(8). <https://doi.org/10.2307/2643578>
- Susanto, A. (2011). Diversity in compliance. In M. Dieleman, J. Koning & P. Post (Eds.), *Chinese Indonesians and regime change*. Leiden, Netherlands: Koninklijke Brill NV.
- Tan, M. G. (1991). The social and cultural dimensions of the role of ethnic Chinese in Indonesian society. In *Symposium on the role of the Indonesian Chinese in shaping modern Indonesian life* (pp. 113-125). Ithaca, NY: Cornell University.  
<https://doi.org/10.2307/3351258>
- Ul Haq, M. F. (2016, September 3). Polisi: Pengeroyok Andrew di transj tidak ada kaitan kelompok anti Ahok. *Detiknews*. Retrieved from  
<https://news.detik.com/berita/3290248/polisi-pengeroyok-andrew-di-transj-tidak-ada-kaitan-kelompok-anti-ahok>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UNESCO Latin-American Conference. (1982). *Declaration of San Jose*.
- UNESCO Doc. FS 82/WF 31.
- Waltz, K. (1979). *Theory of international politics*. Long Grove, IL: Waveland Press.
- Wijaya, C. A. (2016, October 31). Tanjung Balai administration breeding religious intolerance, say activists. *Jakarta Post*. Retrieved from  
<http://www.thejakartapost.com/news/2016/10/31/tanjung-balai-administration-breeding-religious-intolerance-say-activists.html>
- Williams, M. (1991). China and Indonesia make up: Reflections on a troubled relationship. *Indonesia* (Special Issue 1991). <https://doi.org/10.2307/3351260>

Yasadipura I. (1975). *The book of Cabolek*. The Hague, Netherlands: Martinus Nijhoff.  
Zhou, T. (2014). China and the Thirtieth of September Movement. *Indonesia*, 98.  
<https://doi.org/10.1353/ind.2014.0018>

**PENGARUH IMPLEMENTASI KESEPAKATAN *FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENTS (FLEGT VPA)* TERHADAP KEBIJAKAN PENGGUNAAN SISTEM VERIFIKASI DAN LEGALITAS KAYU (SVLK) PADA EKSPOR KAYU DAN PRODUK KAYU INDONESIA KE UNI EROPA**

*(The Effect of Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreements (FLEGT VPA) on the Policy of Using the Timber Verification and Legality System (SVLK) on Export of Indonesian Timber and Wood Products to the European Union)*

Firman Daud Lenjau Lung  
Universitas Pelita Harapan  
*firman.lung@uph.edu*

**Abstract**

As an entity with a big economic and political power, European Union has made a couple agreements with developing countries, such as Indonesia. One of the voluntary agreements is called Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT). However, in the recent development, there are some aspects from FLEGT in particular, and Indonesia-EU economic relation as a whole, that indicates a gap between both parties. Indonesia had changed and revised a few of its national regulations in order to adjust the demand from EU regarding the FLEGT. This adjustment was not actually suitable with President Joko Widodo's regulation on deregulation and debureaucratization. This article aims to see the political dimension from the implication of Indonesia-EU economic agreement; and how this circumstance forms a dependency towards each other. This article will also discuss how EU as a core and Indonesia as a semi-periphery country has had a binding dependency relation. The power of EU will be greater if it can 'conquer' Indonesia, for a bigger ASEAN market. Here comes the political dimension; where EU has a big urge to spread its impact not only for the Southeast Asia region, but also towards Asia as a whole.

**Keywords:** Structuralism, Dependency, North-South Gap, FLEGT VPA, European Union, Indonesia

**A. Pendahuluan**

Sebagai sebuah negara berkembang yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan taraf perekonomiannya, Indonesia terus mengkaji berbagai kebijakan perdagangan yang sudah dimiliki. Karena tidak bisa dipungkiri, bahwa salah satu sumbangsih terbesar bagi pemasukkan ekonomi negara Indonesia adalah melalui ekspor produk barang dan jasa. Hal ini terbukti, melihat kinerja ekspor Indonesia yang mengalami pertumbuhan positif dengan ditunjang oleh naiknya harga komoditas dan produk ekspor Indonesia akibat meningkatnya permintaan luar negeri.<sup>1</sup> Bahkan menurut data dari

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, kinerja ekspor sempat mencapai USD 14,5 milyar, naik sebesar 2,5% hingga Agustus tahun 2014.<sup>2</sup>

Melihat hal ini, tidak heran apabila Indonesia pun juga secara dinamis mencoba untuk menyesuaikan dan mengadaptasi kebijakan-kebijakan yang sebelumnya sudah ada; dan atau bahkan membentuk kebijakan baru, demi mengimbangi kondisi perdagangan global sekaligus

---

<sup>1</sup> Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, comp. *Diplomasi Ekonomi: Optimalisasi Instrumen Kerjasama Luar Negeri Sebagai Upaya Peningkatan*

---

*Ekspor dan Arus Masuk Investasi Asing ke Indonesia.* BPPK: Jakarta, 2012. Hal. 11

<sup>2</sup> Dikutip dari Warta Ekspor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Ditjen PEN/MJL/005/12/2014 Desember). [http://djpen.kemendag.go.id/app\\_frontend/webroot/admin/docs/publication/3971421058470.pdf](http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/webroot/admin/docs/publication/3971421058470.pdf), diakses pada tanggal 21 Maret 2016.

mengembangkan perekonomian nasionalnya. Di satu sisi memang ini merupakan suatu kemajuan yang terlihat baik bagi Indonesia. Namun melalui kasus yang akan penulis bahas, terlihat pula bagaimana penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia justru menjadi bumerang yang sangat berpotensi mempersempit kesempatan Indonesia untuk mengembangkan perekonomiannya.

Ekspor kayu dan produk kayu merupakan topik utama yang akan penulis jadikan pokok bahasan kali ini. Ekspor kayu Indonesia memang secara umum memiliki fluktuasi yang cukup tinggi dan tidak menentu. Hal ini tidak hanya disebabkan karena hambatan *tariff*, namun juga hambatan *non-tariff*.

Secara khusus, pembahasan pada makalah kali ini akan berfokus pada aktifitas ekspor kayu dan produk kayu Indonesia ke Uni Eropa. Sangat menarik, karena secara umum Uni Eropa memang memberlakukan peraturan tertentu yang menghambat lalu lintas ekspor Indonesia ke Uni Eropa; seperti sektor produk peralatan listrik, baju, minyak sayur, sepatu dan terutama *furniture* serta *plywood* yang merupakan salah satu komoditi penting dalam proses ekspor kayu dan produk kayu Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam mengatasi hal ini, Indonesia dan Uni Eropa pun sudah sama-sama melakukan antisipasi dengan membuat suatu persetujuan kerjasama yang tertuang dalam *Voluntary Partnership Agreement on Forest Law Enforcement Governance and Trade* (FLEGT VPA) atau Rencana Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola, serta Perdagangan di Bidang Kehutanan. Kebijakan ini dipicu dari praktik pembalakan liar yang marak pada era akhir 1990-an, di mana negara-negara maju yang tergabung dalam G8 pun mengambil

tindakan atas isu tersebut.<sup>4</sup> Lebih lanjut, sebagai salah satu pasar kayu terbesar di dunia, Uni Eropa pun merasa kebijakan FLEGT tersebut akan berdampak luas untuk memerangi perdagangan kayu ilegal.

*“The EU recognised that, as one of the world’s largest markets for timber products, its actions were having a considerable impact on the illegal timber trade. The EU also recognised that trade agreements would be a viable option, as a credible way for the EU to help countries meet the EU’s demand for legal timber.”*<sup>5</sup>

Namun dalam implementasinya, masih ada banyak hal yang masih menghambat laju ekspor kayu dan produk kayu Indonesia menuju Uni Eropa. Penulis pun ingin melihat bagaimana hambatan dari implementasi FLEGT-VPA ini dapat mempengaruhi efektifitas ekspor perdagangan kayu dari perusahaan dan instansi lokal Indonesia menuju Uni Eropa. Selain itu dapat dikaji pula mengenai seberapa besar hambatan kesepakatan FLEGT-VPA bersama Uni Eropa dapat mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa.

Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian, pasti sudah melalui berbagai pertimbangan. Hal ini pula yang penulis ingin kaji lebih lanjut, untuk melihat kesesuaian Rencana Strategis (Renstra) kementerian Indonesia dengan implementasi kebijakan saat ini; terkait kesepakatan FLEGT VPA dengan Uni Eropa, dan kebijakan SVLK secara nasional.

Setelah melihat permasalahan yang ada, muncullah beberapa *research questions* yang akan penulis jadikan acuan artikel ini

---

<sup>3</sup> BPPK, *Op.Cit.*, hal. 78.

---

<sup>4</sup> European Commission. *Combating Illegal Logging: Lessons from the EU FLEGT Action Plan*. European Commission, 2014.

[https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/brochure-FLEGT-lessons-summary-2014\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/brochure-FLEGT-lessons-summary-2014_en.pdf).

<sup>5</sup> *Ibid.*

adalah: Apa yang menjadi konsep dasar dari pemberlakuan FLEGT VPA oleh Uni Eropa? Apa dampak dari perubahan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia menurut Permendag Nomor 89 Tahun 2015? Bagaimana perkembangan kebijakan SVLK Indonesia dan asosiasi industri hilir terkait dengan implementasi FLEGT VPA? Bagaimana kesesuaian kesepakatan FLEGT VPA terhadap rencana strategis Kementerian Perdagangan Republik Indonesia periode 2015-2019?

## **B. Uni Eropa dan Pemberlakuan Kesepakatan FLEGT VPA**

Kesepakatan ini merupakan perjanjian bilateral antara Uni Eropa (UE) dan para negara pengekspor kayu yang berbasis ‘Kemitraan Sukarela’ atau *Voluntary Partnership Agreement*. Adapun tujuan dari FLEGT VPA ini adalah untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan dan memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE sudah diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra.<sup>6</sup>

*“FLEGT stands for Forest Law Enforcement, Governance and Trade. The EU’s FLEGT Action Plan was established in 2003. It aims to reduce illegal logging by strengthening sustainable and legal forest management, improving governance and promoting trade in legally produced timber.*

*The EU FLEGT Facility supports the European Union, its Member States and partner countries in implementing the EU FLEGT Action Plan. The European Forest Institute has hosted the Facility since 2007.*

*The Facility has its headquarters in Barcelona, Spain, with additional offices in*

---

<sup>6</sup> Dikutip dari Informasi Ringkas Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa, Mei 2011.  
[http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/document/s/eu\\_indonesia/euidn\\_vpa\\_201105note\\_id.pdf](http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/document/s/eu_indonesia/euidn_vpa_201105note_id.pdf), diakses pada tanggal 21 Maret 2016.

*Brussels, Belgium; Joensuu, Finland; and Kuala Lumpur, Malaysia.”<sup>7</sup>*

Kebijakan Uni Eropa mengenai FLEGT VPA ini adalah sebagai bentuk respon terkait dengan maraknya praktik pembalakan liar (*illegal logging*) terhadap produk-produk kayu yang diimpor oleh Uni Eropa. Lebih dari itu, Uni Eropa memang memiliki perhatian khusus terhadap kelangsungan kondisi hutan yang ada di dunia. Karena dengan adanya kesepakatan kemitraan sukarela seperti FLEGT VPA, praktik pembalakan liar yang dilakukan negara pengekspor pun diharapkan bisa mencapai titik minimal.

Melalui FLEGT VPA ini, para negara mitra pun diminta untuk terus mengembangkan suatu sistem pengendalian dalam rangka untuk memverifikasi dan menjamin legalitas kayu yang akan diekspor ke Uni Eropa. Setiap negara pun memiliki pengembangan sistemnya masing-masing, dan Uni Eropa sudah berkomitmen untuk membantu dalam pembangunan dan penyempurnaan sistem negara mitranya tersebut.<sup>8</sup> Di Indonesia sendiri, sistem pengendalian dan penjamin legalitas kayu ini terorganisir dalam SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) yang akan penulis bahas lebih lanjut pada sub-bab mendatang.

Rencana Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola, serta Perdagangan di Bidang Kehutanan (FLEGT) yang dilakukan Uni Eropa tidak hanya mencakup kemitraan sukarela (VPA) namun juga mengacu pada implementasi regulasi kayu Uni Eropa dan tertuang dalam *European Union’s Timber Regulation No 995/2010*. Dari segi usaha

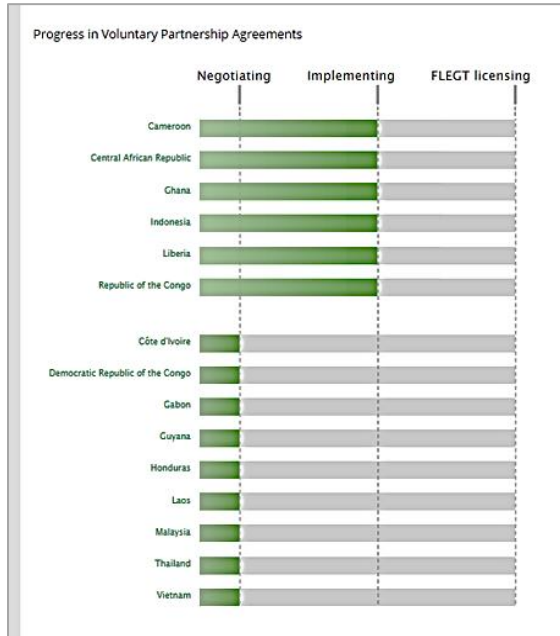
---

<sup>7</sup> Dikutip dari *EU FLEGT Facility*;  
<http://www.euflegt.efi.int/about-flegt>, diakses pada tanggal 21 Maret 2016

<sup>8</sup> *Op.cit.*,  
[http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/document/s/eu\\_indonesia/euidn\\_vpa\\_201105note\\_id.pdf](http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/document/s/eu_indonesia/euidn_vpa_201105note_id.pdf).



Uni Eropa untuk meminimalisir praktik *illegal logging*, rangkaian aspek kesepakatan ini sangatlah bermanfaat. Berdasarkan laporan dari komisi Uni Eropa di bidang lingkungan, peraturan dan regulasi kayu (*timber regulation*) yang sudah dijalankan selama dua tahun belakangan ini membuahkan hasil yang positif dan terbukti efektif—per tanggal 18 Februari 2016.<sup>9</sup>



Bagan 1 - <http://www.euflegt.efi.int/vpa-countries222>

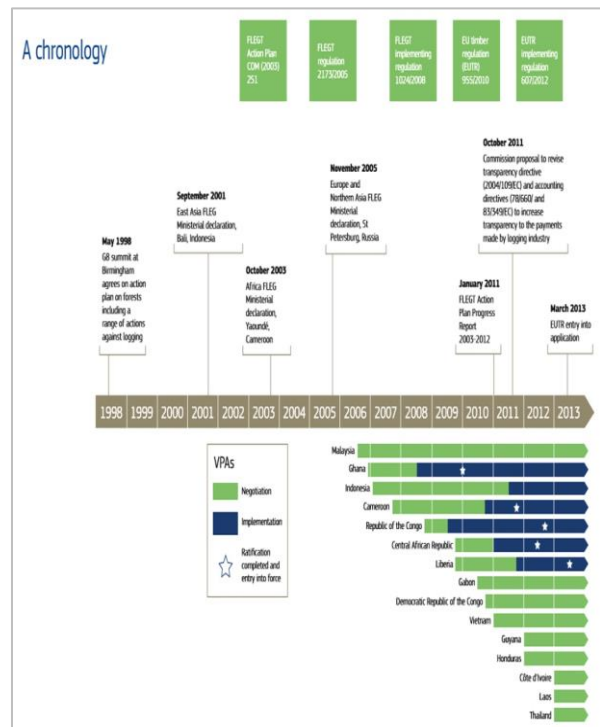
Dalam proses pemberlakuannya, FLEGT VPA memiliki 3 tahap utama yang menentukan kedalaman kerjasama negara pengekspor kayu dengan Uni Eropa. Ketiga tahap tersebut dimulai dengan *negotiation* (negosiasi), *implementation* (implementasi) dan diakhiri dengan *FLEGT Licensing* (perijinan dan pemberian lisensi FLEGT).<sup>10</sup> Melalui bagan 1 yang ada, kita bisa melihat bahwa dari total 15 negara yang sedang berproses, belum ada satupun negara yang sudah mencapai *full implementation* sampai dengan tahap *FLEGT Licensing*. Indonesia pun menjadi salah satu dari 6 negara yang

<sup>9</sup> Dikutip dari *European Union Commission website*; [http://ec.europa.eu/environment/forests/eutr\\_report.htm](http://ec.europa.eu/environment/forests/eutr_report.htm), diakses pada tanggal 21 Maret 2016.

<sup>10</sup> *Op.cit.*, <http://www.euflegt.efi.int/vpa-countries>.

sudah mencapai tahap implementasi, dan 9 negara lainnya baru mencapai tahap negosiasi. Posisi-posisi negara tersebut sedikit banyak pasti akan mempengaruhi kebijakan ekspor kayu nasionalnya terhadap Uni Eropa. Hal ini disebabkan karena tiap fase dari kedalaman implementasi FLEGT VPA tersebut memiliki kecenderungan kebijakan yang berbeda-beda.

Namun pada bagan 2, kita bisa melihat bahwa walaupun belum sampai memasuki tahap pemberian lisensi FLEGT, ada beberapa negara seperti Ghana, Kamerun, Republik Demokratik Kongo, Afrika Tengah dan Liberia yang sudah hampir mencapai implementasi penuh. Kembali lagi, ini semua tergantung pada kondisi nasional negara yang bersangkutan.



Bagan 2 – [https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/brochure-FLEGT-lessons-summary-2014\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/brochure-FLEGT-lessons-summary-2014_en.pdf)

Menurut penulis, konsep *Voluntary Partnership Agreement* ini pun merupakan suatu konsep yang menarik, di mana berarti tidak ada paksaan dalam melakukan kesepakatan FLEGT yang ada, dan justru

mengharuskan suatu inisiatif yang tinggi—khususnya dari negara yang bersangkutan. Meskipun begitu, VPA yang bersifat ‘sukarela’ tetap memiliki suatu kekuatan hukum yang mengikat kesepakatan kerja sama antara Uni Eropa dan negara pengekspor kayu tersebut.

*“A VPA is a legally binding trade agreement between the EU and a timber-exporting country outside the EU. VPAs are bilateral agreements that are negotiated between an individual country and the EU. The process of negotiating and implementing each VPA is therefore different for each country. The EU provides technical assistance and capacity-building support. Establishing a VPA also involves in-country negotiations and discussions. The forest stakeholders affected by logging operations, including representatives from the private sector and civil society, are involved in these.”<sup>11</sup>*

Jadi bisa dilihat bagaimana konsep VPA yang ditawarkan oleh Uni Eropa bersifat sukarela, namun tetap mengikat secara hukum, dan memiliki tahapan implementasi yang berbeda-beda di tiap negara; tergantung kondisi dan kesiapannya. Melalui konsep ini juga, terlihat bagaimana Uni Eropa ingin negara mitra pengekspor kayu memberlakukan suatu sistem yang menyeluruh, di mana semua entitas yang terlibat dalam operasi dan produksi kayu ikut terlibat serta berkoordinasi secara aktif. Bila dilihat dari kondisi Indonesia saat ini, sepertinya masih ada koordinasi yang belum cukup sinergis antara pelaku industri dan pihak kementerian itu sendiri.

FLEGT dan VPA yang diberlakukan Uni Eropa sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda, namun saling melengkapi. Di satu sisi, tahapan yang harus dilakukan negara pengekspor secara umum adalah sama seperti tahapan pemberlakuan FLEGT

seperti yang penulis sudah bahas sebelumnya. Namun untuk VPA sendiri yang notabene berbasis sukarela, ada 4 tahapan yang harus ditempuh, yaitu *information and consensus building, formal negotiations, ratification and implementation*, dan *licensing*.<sup>12</sup>

Melalui tulisan ini, penulis pun ingin mengkaji lebih lanjut posisi Indonesia dalam FLEGT VPA tersebut dan dampaknya bagi kebijakan ekspor kayu dan produk kayu nasionalnya. Indonesia sendiri sudah menjalani hampir 9 tahun dari proses negosiasi pertama kali.<sup>13</sup>

Indonesia sudah mulai melakukan implementasi terhadap sistem jaminan legalitas kayunya (“Indonesian TLAS” atau “Sistem Verifikasi Legalitas Kayu” dalam bahasa Indonesia) pada bulan September 2010, ditandai dengan dimulainya program verifikasi dan peningkatan kapasitas.<sup>14</sup> Melihat dari posisi tersebut, sebetulnya Indonesia sudah cukup matang dalam fase implementasi FLEGT yang ada dengan Uni

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup>

“Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia memulai perundingan-perundingan VPA dengan UE untuk menangani masalah pembalakan liar dan untuk meningkatkan kesempatan pasar bagi kayu maupun produk kayu Indonesia sebagai tanggapan terhadap peraturan-peraturan pasar yang baru di AS, UE dan pasar-pasar lainnya. Inti proses VPA adalah penetapan perangkat peraturan perundangan yang berlaku bagi sektor kehutanan Indonesia (‘definisi legalitas’), dan untuk mengembangkan sistem-sistem pengendalian maupun prosedur-prosedur verifikasi yang memastikan bahwa semua kayu dan produk kayu yang diekspor dari Indonesia ke Uni Eropa memenuhi peraturan perundangan dimaksud.”  
Indonesia. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta. *Informasi Ringkas: Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Antara Indonesia Dan Uni Eropa*. By Kementerian Kehutanan, Delegasi Uni Eropa Untuk Indonesia, and Direktorat Bina Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hutan. Jakarta: Direktorat Bina Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hutan, 2011, hal. 3.

<sup>14</sup> *Ibid.*

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, <http://www.euflegt.efi.int/the-process>.

Eropa. Tujuan umum dalam pengembangan produksi kayu yang legal dan terverifikasi pun sudah hampir tercapai. Namun sama dengan negara-negara yang lain, Indonesia pun belum bisa mencapai tahap lisensi FLEGT VPA dari Uni Eropa.

Semula, pihak kementerian Indonesia dan pihak Uni Eropa sendiri sudah merencanakan bahwa pemberian lisensi FLEGT berdasarkan VPA akan mulai dijalankan pada bulan Januari 2013; apabila kedua belah pihak telah sepakat bahwa syarat-syarat untuk pemberian lisensi FLEGT telah dipenuhi, sambil mengantisipasi diberlakukannya Peraturan Kayu UE.<sup>15</sup> Namun hingga sekarang (per bulan Maret 2015—tanggal dibuatnya tulisan ini), pemberian lisensi FLEGT oleh Uni Eropa belum juga muncul. Hal ini disebabkan karena pihak Uni Eropa yang masih mempertanyakan beberapa poin dari kebijakan Indonesia akan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dimilikinya.

### **C. Dampak Perubahan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia Menurut Permendag Nomor 89 Tahun 2015**

Sebelum membahas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan Permendag yang mengaturnya, penulis akan terlebih dahulu memaparkan mengenai ‘legalitas’ itu sendiri. Adapun definisi legalitas Indonesia sudah disusun berdasarkan undang-undang dan peraturan Indonesia mengenai kehutanan, perdagangan, lingkungan hidup, pertanian, dan pertanahan; maupun perjanjian internasional yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Indonesia.<sup>16</sup>

Secara lebih mendalam, definisi legalitas Indonesia yang sudah dirancang berdasarkan sejumlah prinsip utama yang mencakup aspek-aspek produksi dan pengolahan, serta bergantung pada jenis

hutan tersebut akhirnya diresmikan pada tahun 2009 dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan; yang mencakup:

- Untuk hutan negara berupa hutan alam dan hutan tanaman prinsip-prinsip ini meliputi: (1) status hukum dan kawasan, serta izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan kayu; (2) kepatuhan kepada persyaratan hukum untuk pemungutan hasil; dan (3) kepatuhan kepada aspek-aspek lingkungan hidup dan sosial berkaitan dengan pemungutan hasil.
- Untuk hutan-hutan hak atau hutan lahan milik, prinsip-prinsip ini mencakup kepemilikan areal, kayu dan perdagangannya, yang dapat dipastikan keterlacakannya.
- Izin-izin pemungutan hasil kayu lainnya yang mengatur penebangan dari areal untuk penggunaan lain yang mungkin atau mungkin tidak menyebabkan konversi hutan.
- Di samping itu ada sebuah standar legalitas umum yang mencakup pengelolaan rantai pasokan kayu mulai dari hutan melalui unit usaha pengolahan sampai ke titik ekspor.<sup>17</sup>

Konsep legalitas kayu yang dimiliki Indonesia secara umum sudah baik; di mana status legalitas tidak hanya berdasar pada asal kayu, namun juga status pemanfaatannya, dan bahkan mencakup kepatuhan akan aspek lingkungan hidup. Namun hal ini tidak sesederhana itu karena dalam praktiknya, ekspor kayu dan produk kayu Indonesia diatur dalam Permendag Nomor 89 Tahun 2015, sekaligus mengacu pada kebijakan FLEGT VPA Uni Eropa itu sendiri.

Sebetulnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 5.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Ekspor Produk Kehutanan merupakan pengganti dari Permendag Nomor 66/M-DAG/8/2015 terkait Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

Kesamaan dari keseluruhan Permendag itu adalah bahwa Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang selanjutnya tertuang dalam dokumen Surat Legalitas Kayu (S-LK) memang sudah ada sejak awal. Sistem ini merupakan hal yang krusial, mengingat tingkat permintaan kayu dan produk kayu legal di level global sudah semakin meningkat. Dengan adanya SVLK, industri kayu Indonesia bisa dengan mudah mengekspor produknya dengan status yang sudah terverifikasi. Di sisi lain, perbedaan dari perubahan Permendag tersebut adalah mengenai pemberlakuan 'wajib SVLK' bagi industri kayu dan produk kayu.

Secara umum, terdapat dua titik industri sumber ekspor kayu dan produk kayu di Indonesia; yaitu industri hulu dan industri hilir. Sama seperti industri lainnya, industri hulu merupakan industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Sementara industri hilir merupakan industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi yang siap dipakai oleh konsumen. Dalam konteks industri kayu Indonesia, industri hulu merupakan *supplier* dari kayu mentah dan selanjutnya akan diproses dan berakhir pada industri hilir yang lebih fokus memproduksi barang jadi seperti mebel, kerajinan kayu, dan lain sebagainya.

Di sinilah pembahasan menjadi semakin menarik. Permasalahan SVLK industri hulu dan hilir memang merupakan permasalahan yang pelik. Dahulu, khususnya bagi Industri Kecil Menengah (IKM) di sektor industri hilir (*furniture*, dan lain-lain), SVLK wajib mereka proses agar bisa mendapatkan dokumen V-Legal yang harus mereka lampirkan agar dapat

melakukan ekspor.<sup>18</sup> Keluhan IKM itu lalu ditanggapi pemerintah melalui kesepakatan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014, yang menyatakan agar bisa melakukan ekspor, IKM produk hasil kehutanan cukup menyertakan dokumen deklarasi ekspor (DE) saja; namun selain memberikan kemudahan berupa DE, Kementerian Perdagangan dan Kementerian LHK juga terus mendorong pelaku usaha untuk melakukan proses SVLK.<sup>19</sup>

Perubahan peraturan belum berhenti sampai di sana. Setelah melakukan implementasi dan pengecekan, pemerintah merasa masih ada beberapa aspek dari Permendag terkait yang bisa lebih disederhanakan demi mempermudah jalur ekspor industri kayu. Hal inilah yang membuat Kemendag mengeluarkan lagi aturan baru berupa Permendag Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, pada akhir Agustus 2015.

Melalui Permendag Nomor 66 Tahun 2015, kebijakan pemerintah yang mengharuskan IKM untuk menyerahkan Deklarasi Ekspor sebagai bagian dari dokumen pelengkap pabean—yang sebelumnya tertera pada Permendag Nomor 97 Tahun 2014, Pasal 20 Ayat 2—, akhirnya dihapus.<sup>20</sup> Namun belum sampai beberapa hari Permendag tersebut diresmikan, perubahan pun kembali terjadi.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> B., Wibowo. "Dokumen Cukup Hasil Fotokopi." *Agroindonesia.co.id*, 3 November, 2015.

<http://agroindonesia.co.id/index.php/2015/11/03/doku-men-cukup-hasil-fotokopi/>.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> "... beberapa hari setelah Permendag 66 diteken Mendag Thomas Lembong, Presiden Jokowi meluncurkan paket kebijakan jilid I yang berfokus

Konsep dan sistematika yang diatur dalam Permendag Nomor 89 Tahun 2015 sebenarnya sangat masuk akal. Ada penekanan lebih bahwa industri yang komoditinya masuk dalam lampiran 1 kelompok B (produk hasil industri hilir) pada Permendag 89, tidak perlu lagi melakukan kewajiban menjalankan SVLK ataupun menyertakan Deklarasi Ekspor pada saat proses ekspor. Sesuai dengan semangat debirokratisasi dan deregulasi, apabila industri hulu sudah menjalankan SVLK dan komoditinya dinyatakan legal, secara otomatis kayu yang diproduksi oleh industri hilir pun sudah pasti legal.

“Verifikasi atas pemegang izin, pemegang hak pengelolaan atau pemilik hutan hak dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang berbadan hukum Indonesia. Verifikasi dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang secara rinci tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VIBPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Legalitas kayu yang berasal dari hutan yang dikelola oleh masyarakat didasarkan pada terpenuhinya prinsip-prinsip kepastian areal, sistem dan prosedur penebangan yang sah dan aspek lingkungan dan sosial. Pemegang izin wajib mempunyai izin yang sah dan bukti pemenuhan kewajiban membayar iuran dan PSDH serta mempunyai rencana kerja yang telah disetujui pejabat berwenang.”<sup>22</sup>

---

pada debirokratisasi, deregulasi dan pemberian insentif. Kemendag pun diberi mandat untuk melakukan simplifikasi terhadap sejumlah kebijakan Kemendag yang selama ini dinilai kurang mendukung kegiatan usaha. ... Kemendag mengeluarkan lagi kebijakan debirokratisasi dan deregulasi, sesuai yang diminta Presiden Jokowi, antara lain berupa penerbitan Permendag 89/M-DAG/PER/10/2015. *Ibid.*

<sup>22</sup> Astana, Satria; Obidzinski, Krystof; dkk.

"Implikasi Biayad Dan Manfaat Pelaksanaan SVLK

Penjelasan tersebut secara rinci mengatakan bahwa SVLK Indonesia sudah memiliki suatu prosedur tersendiri yang (seharusnya) sudah sangat menjamin kelegalan sumber kayu yang ada. Di sisi lain—dari segi produktifitas industri—, pemberlakuan SVLK sangatlah membantu para pengusaha untuk mendapatkan dokumen pernyataan legalitas kayu dengan biaya yang relatif lebih murah, dibandingkan pengurusan legalitas yang sebelumnya sudah melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).<sup>23</sup>

Di satu sisi, kebijakan yang dilakukan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ini memiliki visi yang sangat baik secara nasional; khususnya apabila kita melihat dari segi efektifitas birokrasi dan regulasi. Pelaku usaha, khususnya IKM, menjadi semakin mudah dalam melakukan prosedur ekspor kayu dan produk kayu secara legal. Namun di sisi lain, justru muncul suatu permasalahan baru, terkait dengan sinergi antara SVLK Indonesia dengan implementasi kesepakatan FLEGT VPA dengan Uni Eropa.

#### **D. Perkembangan Kebijakan SLVK Indonesia dan Asosiasi Industri Hilir terkait dengan Implementasi FLEG VPA**

Di sinilah permasalahan SVLK Indonesia menjadi topik pembicaraan yang cukup pelik akhir-akhir ini. Perubahan-perubahan kebijakan terkait sistem legalitas kayu di Indonesia yang tertuang dalam Permendag 89, ternyata belum sepenuhnya sejalan dengan implementasi FLEGT VPA. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, FLEGT VPA yang dibuat oleh Uni Eropa bertujuan untuk menjamin legalitas kayu yang akan diekspor, melalui suatu sistem verifikasi legalitas kayu. Dengan begitu,

---

Terhadap Sektor Perakayuan Skala Kecil." *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 11, no. 3 (September 2014): 175-198.

<sup>23</sup> *Ibid.*

berarti Uni Eropa mewajibkan semua produk yang akan diekspor dari Indonesia harus sudah melalui proses SVLK, dan memiliki S-LK (Surat Legalitas Kayu) serta dokumen V-legal.

Hal ini pun menimbulkan polemik yang berkesinambungan. Permasalahan awal; dengan peraturan implementasi FLEGT VPA yang demikian, ekspor kayu dan produk kayu Indonesia yang dibebaskan dari wajib SVLK mengalami kesulitan untuk memasuki pasar Uni Eropa. Industri-industri ini memang sudah mengantongi dokumen kelegalan kayu hasil dari SVLK industri hulu; namun sesuai dengan kesepakatan FLEGT VPA, hanya produk yang ber-SVLK lah yang boleh diekspor. Pada akhirnya, produk industri hilir, seperti mebel dan kerajinan kayu tetap boleh masuk, namun harus mengikuti uji tuntas yang dilakukan oleh Uni Eropa.<sup>24</sup> Hal ini pun sangat disayangkan oleh salah satu asosiasi produk kayu terkait di Indonesia.

“Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mengeluhkan kredibilitas Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) yang diterbitkan pemerintah Indonesia di skala internasional. Pasalnya kendati sudah mengantongi sertifikat SVLK dengan mencantumkan dokumen V-legal, Uni Eropa masih memberlakukan uji tuntas (*due diligence*) atas produk ekspor kayu dan olahan termasuk bubur kayu (pulp) dan kertas asal Indonesia sebelum diizinkan beredar di sana. ... “Dalam hal ini, kata kuncinya menurut saya adalah trust, rasa kepercayaan menjadi berkurang. Hal ini menjadi penting, anggota kami yang sudah mempunyai sertifikat SVLK akhirnya waktu ekspor ke Uni Eropa terkena uji tuntas,” ujar

---

<sup>24</sup> Primadhyta, Safyra. "APKI: Sertifikat SVLK Kayu Indonesia Tak Dianggap Di Eropa." *CNN Indonesia*, March 7, 2016. <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160307160950-92-115880/apki-sertifikat-svlk-kayu-indonesia-tak-dianggap-di-eropa/>.

Liana dalam diskusi yang berjudul "Tantangan Era Standarisasi dalam Mendorong Ekspor Industri Hasil Hutan" di Jakarta, Senin (7/3). Uji tuntas, lanjut Liana, memakan waktu dan biaya. Disebutkannya, uji tuntas memakan biaya sekitar US\$2.500 hingga US\$3 ribu setiap kali pengiriman ekspor kayu maupun olahannya. Sementara, pelaku usaha juga harus mengeluarkan biaya untuk memperoleh V-legal."<sup>25</sup>

Para pelaku usaha hilir akhirnya ‘memprotes’ perubahan kebijakan dalam Permendag 89 yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan. Melihat hambatan ini, para pengusaha industri hilir mengkhawatirkan hilangnya kredibilitas kayu Indonesia di mata Internasional hanya karena adanya hambatan proses terkait SVLK di Uni Eropa.<sup>26</sup> Melihat adanya permasalahan ini, muncul wacana dari kementerian untuk merevisi Permendag 89 Tahun 2015 untuk menerapkan SVLK di semua sektor industri kayu dan produk kayu Indonesia, termasuk produk ekspor industri hilir.<sup>27</sup> Adanya wacana revisi peraturan itu justru kembali menimbulkan polemik lain yang kali ini datang dari Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Amkri). Amkri justru tidak setuju dengan wacana revisi yang sudah beredar.<sup>28</sup>

Setelah melihat beberapa pandangan yang ada, bisa dilihat bahwa permasalahan utama sebenarnya bukan terdapat

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Kompas, Redaksi. "Polemik SVLK Berlanjut." *KOMPAS* (Jakarta), 26 Maret, 2016, hal. 18.

<sup>28</sup> “Kami bukan menolak SVLK, tetapi berlakukan sistem itu di sektor hulu, bukan di industri hilir. Kalau sudah dipastikan legal di hulu, yang di hilir pun pasti legal,” kata Sekretaris Jenderal Amkri Abdul Sobur di Jakarta, Kamis (24/2). ... Amkri menilai revisi tidak perlu dilakukan. Itu karena peraturan Menteri Perdagangan tersebut sudah sesuai prinsip dasar usulan pelaku industri mebel dan kerajinan, yakni SVLK hanya berlaku di industri hulu. Namun, tidak berlaku untuk 15 HS (nomor sistem harmonisasi) mebel dan kerajinan.” *Ibid.*

pada—dalam konteks ini— Permendag 89 Tahun 2015. Kembali lagi di sini lebih mengarah pada kepentingan-kepentingan yang terdapat pada industri-industri terkait. Karena di satu sisi, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sudah berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi segala tuntutan dan kepentingan nasional maupun global; sesuai dengan rencana-rencana yang memang sudah disiapkan secara khusus. Pembahasan mengenai relevansi kebijakan pemerintah Indonesia dengan rencana strategis (Renstra) akan penulis bahas lebih lanjut pada sub-bab selanjutnya.

#### **E. Kesesuaian Kesepakatan FLEGT VPA terhadap Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Periode 2015-2019**

Seperti yang sudah dibahas sedikit sebelumnya, perlu diingat bahwa kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah, pastilah sudah melalui berbagai tahap pertimbangan dan pematangan. Dalam konteks tulisan ini, pertimbangan yang ada mencakup kepentingan nasional secara umum, dan kepentingan pembangunan ekonomi pada khususnya. Maka dari itu, akan sangat membantu apabila kita dapat melihat peran dan aksi pemerintah terkait dengan dinamika Permendag yang ada, dan relevansinya dengan kebijakan SVLK Indonesia terhadap kesepakatan FLEGT VPA dengan Uni Eropa. Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki, khususnya dalam kementerian. Hal ini bertujuan agar ada suatu perencanaan yang terorganisir dengan baik, dalam mengembangkan kekuatan nasional. Renstra Kementerian Perdagangan yang berdurasi 5 tahunan, merupakan perencanaan pembangunan yang menjamin kegiatan pembangunan di bidang perdagangan sehingga bisa berjalan secara efektif dan

efisien.<sup>29</sup> Sejalan dengan hal tersebut, penulis ingin melihat apa yang menjadi visi misi dan strategi tertentu dari Kementerian Perdagangan, dalam konteks ekspor kayu ke pasar global. Berikut ditampilkan secara ringkas Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Perdagangan 2015-2019:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Indonesia. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019*, 2015.

<sup>30</sup> “Untuk mewujudkan visi dan misi berlandaskan ‘terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong’ yang dijumpai melalui misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2015-2019 yaitu:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar Internasional;
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
5. Peningkatan efektifitas pengelolaan impor barang dan jasa;
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. Peningkatan perlindungan konsumen;
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan; dan
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.” *Ibid.*

**Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan 2015-2019**

<b>MISI</b>	1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan	2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang tumbuh dan berkualitas	3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan
<b>TUJUAN</b>	1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa 2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan	3. Peningkatan Akses dan Pangsa Pasar Internasional 4. Pemantapan Promosi Ekspor dan Notion Branding 5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa	6. Optimalisasi/Pengaturan pasar Berjangka Komoditi, S&G dan Pasar Lelang 7. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri (PDN) 8. Optimalisasi/Pengaturan pasar Berjangka Komoditi, S&G dan Pasar Lelang 9. Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting 10. Peningkatan Perlindungan Konsumen 11. Peningkatan Kim Usaha dan Kepastian Berusaha 12. Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi 13. Peningkatan Dukungan Kinerja Perdagangan 14. Peningkatan Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian
<b>SASARAN</b>	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa (1) Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional (2) Meningkatnya Diversifikasi Pasar dan Produk Ekspor (3) Menurunnya Hambatan Akses Pasar (Tarif dan Non Tarif) (2,3)	Meningkatnya Produk Ekspor (Notion Branding) (4) Optimalnya Kinerja Kelembagaan Ekspor (3, 4) Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Impor (5) Meningkatnya Promosi Circa Produk Ekspor (Notion Branding) (4) Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Impor (5) Meningkatnya Peningkatan Perdagangan LN di Perbatasan (6) Meningkatnya Pelayanan & Kemudahan Berusaha Bidang Dagang (7)	Meningkatnya Pemantapan Pasar Berjangka Komoditi, S&G, dan Pasar Lelang (8) Meningkatnya Pengelolaan Perdagangan Perantara (5,7,9,10) Meningkatnya Kinerja dan Profesionalisme SDM Sektor Perdagangan (12) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (12) Meningkatnya Efektivitas Peningkatan Internal (12) Terwujudnya Sistem Informasi Perdagangan yang Terintegrasi (13) Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Berbasis Kajian (14) Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha (11)

**Bagan 3 –**

<http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2015/04/07/27mdagper42015-id-1429871217.pdf>

Mari kita lihat secara lebih seksama. Secara umum, Renstra dari Kementerian Perdagangan untuk periode 2015-2019 berfokus pada pengembangan dan peningkatan ekspor non-migas.

*“Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun kedepan sesuai dengan yang tertuang di dalam RPJM 2015-2019 adalah ‘meningkatkan daya saing produk ekspor non-migas dan jasa’ melalui: 1.) Peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional; serta 2.) Pengoptimalan upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.”<sup>31</sup>*

Hal ini sudah menjadi suatu poin penting untuk melihat bahwa dinamika perubahan Permendag yang akhir-akhir ini terjadi memang merupakan bagian dari aksi

<sup>31</sup> *Ibid.*

pemerintah dalam menjalankan tujuannya. Ditambah dengan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, efektifitas kinerja pengusaha dan sinerginya dengan Kementerian Perdagangan RI diharapkan akan semakin lancar, sesuai dengan tujuan Renstra mengenai peningkatan efektifitas dan kinerja perdagangan.

Dengan mengikutsertakan diri dalam FLEGT VPA Uni Eropa, Indonesia juga sudah mengimplementasikan poin penting lainnya dalam hal peningkatan akses dan pangsa pasar Internasional; pemantapan promosi ekspor dan *nation branding*; serta pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri. Bahkan disebutkan bahwa peningkatan kerjasama perdagangan luar negeri merupakan salah satu fokus utama dari arah perdagangan Indonesia periode ini.<sup>32</sup> Di sisi lain melalui FLEGT VPA ini, pengamanan perdagangan Indonesia juga semakin diperkuat. Dengan pengamanan ekspor kayu ke Uni Eropa yang semakin ‘ketat’, industri perindustri kayu di Indonesia bisa terpicu untuk bisa menyaingi kualitas global secara kompetitif.

Dalam pembuatan kebijakan dan peraturan-peraturan terkait ekspor kayu dan produk kayu Indonesia, Kementerian Perdagangan senantiasa bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Maka dari itu, terkait dengan perkembangan dinamika pemberlakuan SVLK ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga turut mengambil andil untuk memberikan masukan. Pertimbangan pun juga pasti disesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menempatkan upaya pemberantasan penebangan liar sebagai salah satu agenda utamanya.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan *Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, 2015.



Secara umum, polemik yang terjadi antara kebijakan SVLK Indonesia dan upaya pencapaian tahap akhir FLEGT VPA masih berada dalam jalur yang sesuai dengan tujuan pemerintah Indonesia. Melalui pemaparan sebelumnya pun bisa dilihat ada dua arah utama yang menjadi target utama dalam konteks kali ini; yaitu untuk meningkatkan produksi dan efektifitas ekspor non-migas (kayu produk kayu Indonesia); sekaligus memberantas praktik penebangan liar.

## F. Kesimpulan

Dari penjabaran artikel tersebut, penulis merasa ada banyak hal menarik yang bisa dipelajari khususnya terkait dengan dunia hubungan internasional. Permasalahan SVLK dan implementasi FLEGT VPA merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas. Karena melalui polemik yang ada, kita bisa melihat bagaimana ada hubungan nyata dari pemerintah sebagai ‘jembatan’ bagi para pengusaha dan pelaku industri, dengan potensi pasar global. Bila ditelaah lebih lanjut, semua kebijakan yang dilakukan Kementerian Perdagangan sebetulnya sudah sangat baik. Melalui Permendag awal sampai Permendag 89 Tahun 2015, terlihat jelas bahwa Kementerian Perdagangan berusaha sebaik mungkin untuk berproses dan beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang ada.

Dari keseluruhan pemberitaan media dan tanggapan-tanggapan instansi, terbentuk suatu persepsi yang justru terkesan menyudutkan pemerintah Indonesia. Hal ini memang sebetulnya tidak bisa disalahkan, apabila yang menjadi fokus bahasan adalah SVLK dalam konteks yang terbatas. Namun menurut penulis, akan sangat berbeda apabila kita mencoba melihat permasalahan ini secara makro dan menyeluruh.

Baru berjalan hampir tiga tahun semenjak pertama kali Indonesia menyetujui kerjasama FLEGT VPA terkait

ekspor kayu dan produk kayu ke Uni Eropa; dan baru sekitar 1 tahun Kementerian Perdagangan melakukan berbagai penyesuaian kebijakan dan peraturan terkait pemberlakuan kebijakan SVLK. *Timeframe* ini menunjukkan masih terlalu dini bagi kita untuk mengharapkan suatu kondisi yang stabil bagi ekspor kayu dan produk kayu Indonesia. Masih ada banyak hal yang harus diurus, karena kembali lagi ini semua merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Ada banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan dari masing-masing pihak agar pada akhirnya bisa mencapai suatu koordinasi yang baik.

Mungkin apabila Indonesia tidak terlibat dalam FLEGT VPA bersama Uni Eropa, permasalahan SVLK Indonesia tidak akan menemui masalah; karena dalam perjanjian tersebut mengharuskan seluruh industri baik dari hulu maupun hilir, menyertakan SVLK. Namun permasalahan bukanlah pada Indonesia harus mengikuti FLEGT VPA atau tidak. Hal ini memang sedikit tidak sesuai dengan semangat umum pemerintah Indonesia yang menginginkan debirokratisasi dan deregulasi dalam Permendag 89 Tahun 2015, di mana apabila industri hulu sudah menjalankan SVLK, kayu yang diproduksi industri hilir pun sudah otomatis legal.

Menurut penulis, meskipun sedang menghadapi berbagai polemik, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan sudah berada di jalur yang benar. Dalam permasalahan ini kita tidak hanya berbicara mengenai produktifitas ekonomi lokal, namun juga lingkungan hidup yaitu mengenai legalitas kayu. Melihat potensi ekspor kayu dan produk kayu Indonesia yang sedang bertumbuh cukup pesat, ‘ekonomi’ dan ‘legalitas kayu’ bukanlah pilihan. Sebisa mungkin keduanya harus berjalan secara bersamaan. Dalam memenuhi target nasional, memang produktifitas ekspor harus tinggi dan

maksimal. Namun di lain sisi hal itu akan percuma apabila tidak didukung dengan sumber kayu yang legal.

Maka dari itu, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa peraturan dan kebijakan merupakan suatu proses yang pada tahap pemberlakuannya nanti masih bisa terus diawasi dan dievaluasi. Pasti akan ada fase di mana peraturan terasa tidak cocok dan perlu penyesuaian. Hal ini lah yang sedang terjadi dalam sektor kayu dan produk kayu Indonesia, terhadap kebijakan SVLK Permendag 89 Tahun 2015. Saat ini pun pihak dari Indonesia masih terus melakukan negosiasi dan evaluasi yang diharapkan bisa dengan cepat membawa Indonesia sampai pada tahap akhir *full implementation* dalam pemberian lisensi FLEGT VPA. Apabila kedua hal ini tercapai, ekspor kayu dan produk kayu Indonesia pun seharusnya bisa semakin maju di pasar global.

Bagian saran ini akan penulis tujukan kepada aktor utama terkait permasalahan ini. Yang pertama bagi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan, agar bisa semakin tegas dan cepat tanggap dalam membuat kebijakan maupun keputusan. Karena pemerintah lah yang memegang peranan penting dalam menjembatani kepentingan pelaku industri dan juga pasar global. Semoga ke depannya pemerintah bisa cepat memastikan dan bahkan memperkuat posisi Indonesia di tingkat FLEGT VPA bersama Uni Eropa, sehingga bisa semakin cepat pula terbentuk suatu sistem yang pasti terhadap kebijakan SVLK Indonesia.

Bagi para pelaku industri dan asosiasi terkait, diharapkan bisa lebih memahami situasi saat ini dan bisa bekerja lebih kooperatif dengan pemerintah. Penulis tahu dan sangat mengerti bahwa kondisi seperti ini membawa kerugian terhadap industri hilir kayu dan produk kayu Indonesia. Namun kembali lagi, ini semua

masih diusahakan dan diproses lebih lanjut. Apabila ada sinergi yang baik antara pelaku industri dan pemerintah, diharapkan atmosfer perdagangan ekspor sektor perkayuan bisa lebih kondusif; terlepas dari kebijakan SVLK keseluruhan yang masih dalam tahap evaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astana, Satria. (2014). Implikasi Biayad Dan Manfaat Pelaksanaan SVLK Terhadap Sektor Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, comp. (2012). *Diplomasi Ekonomi: Optimalisasi Instrumen Kerjasama Luar Negeri Sebagai Upaya Peningkatan Ekspor dan Arus Masuk Investasi Asing ke Indonesia*. Jakarta: BPPK
- Dokumen Cukup Hasil Fotokopi [editorial]. (2015, November 3). Retrieved from <http://agroindonesia.co.id/index.php/2015/11/03/dokumen-cukup-hasil-fotokopi/>
- European Commission. (2014). *Combating Illegal Logging: Lessons from the EU FLEGT Action Plan*. Retrieved from [https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/brochure-FLEGT-lessons-summary-2014\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/brochure-FLEGT-lessons-summary-2014_en.pdf)
- EU FLEGT Facility. Retrieved from <http://www.euflegt.efi.int/about-flegt>
- Informasi Ringkas. (2011). Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa. Retrieved from [http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/eu\\_indonesia/euidn\\_vpa\\_201105n\\_ote\\_id.pdf](http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/eu_indonesia/euidn_vpa_201105n_ote_id.pdf)
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Indonesia. (2011). *Informasi Ringkas: Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Antara Indonesia Dan Uni Eropa*. Jakarta: Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). *Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2014, December). Warta Ekspor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Retrieved from [http://djpen.kemendag.go.id/app\\_frontend/webroot/admin/docs/publication/3971421058470.pdf](http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/webroot/admin/docs/publication/3971421058470.pdf)
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019*.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri*. Retrieved from <http://www.kemendag.go.id/id/about-us/task-and-function/directorate-general-of-foreign-trade>
- Perkayuan Skala Kecil. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 11(3). <https://doi.org/10.20886/jpsek.2014.11.3.175-198>
- Polemik SVLK Berlanjut [editorial]. (2016, March 26). *Kompas*.
- Primadhyta, S. (2016, March 7). APKI: Sertifikat SVLK Kayu Indonesia Tak Dianggap di Eropa. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160307160950-92-115880/apki-sertifikat-svlk-kayu-indonesia-tak-dianggap-di-eropa/>

## Pengiriman Naskah **Verity**

Naskah yang dikirimkan harus mengikuti petunjuk yang telah ditentukan oleh dewan redaksi **Verity** berikut ini:

1. Naskah diketik dengan ukuran A4 dengan margin batas atas, bawah, dan samping masing-masing 2,5 cm. Naskah diketik rata kanan dan kiri (justified) dengan spasi 11/2.
2. Halaman depan hanya memuat judul artikel, nama penulis, nama institusi/perusahaan tempat penulis berafiliasi, alamat korespondensi, dan abstrak. Naskah tidak lebih dari 20 halaman, termasuk gambar, tabel, dan daftar referensi. Nomor halaman ditempatkan pada bagian pojok kiri bawah.
3. Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris maksimal 200 kata dan memuat tidak lebih dari 5 (lima) kata kunci. Penulisan bagian Abstrak berspasi tunggal dan dicetak miring. Abstrak harus menyatakan tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil, dan kontribusinya.
4. Gambar dan tabel diletakkan dalam badan tulisan. Gambar dan tabel diberikan nomor dengan menggunakan format penomoran Arab, contohnya Gambar 1, Tabel 1, dst. Judul gambar diletakkan pada bagian bawah gambar, sementara judul tabel ditempatkan pada bagian atas tabel.
5. Naskah diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan ketentuan sebagai berikut:

	Size	Bold	<i>Italics</i>	Description
Judul artikel	14	Yes	No	Centered
Nama penulis	12	Yes	No	Centered
Nama institusi/ afiliasi	12	No	No	Centered
Abstrak	10	No	Yes	Justified
Kata kunci	10	No	Yes	Justified
Heading	12	Yes	No	Justified
Isi naskah	12	No	No	Justified
Referensi	12	No	No	Justified; left margin set to 1 cm
Judul gambar dan tabel	10	No	No	Centered
Tulisan dalam gambar dan tabel	>8	No	No	-

6. Kutipan ditulis dengan menggunakan format APA (6th edition, American Psychological Association). Catatan kaki tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam penulisan naskah. Berikut adalah contoh penulisan kutipan dengan menggunakan format APA:

- a. Sumber kutipan dengan satu penulis: (Goulding, 2005)
- b. Sumber kutipan dengan dua penulis: (Schiffman & Kanuk, 2010)

- c. Sumber kutipan dengan lebih dari dua penulis: (Ghazali et al., 2008)
- d. Dua sumber kutipan dengan penulis berbeda: (Ghazali et al., 2008; Danielsson, 2009)
- e. Dua sumber kutipan dengan penulis sama: (Lawson 2003, 2007). Jika tahun publikasinya sama: (Fam, 2008a, 2008b)
- f. Sumber kutipan dari institusi ditulis dengan menyebutkan akronim institusi yang bersangkutan, misalnya (BI, 2011)
- g. Sumber kutipan dari hasil wawancara: (Aldiano, wawancara pribadi, Oktober 12, 2010)

7. Daftar referensi disusun secara berurutan secara abjad dan menggunakan sistem APA (6th edition, American Psychological Association) yang dapat dilihat lengkapnya di <https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/05/>. Berikut adalah contoh penulisan referensi:

- a. Buku: Allison, G. (1999). *Essence of Decision*. Longman Publication.
- b. Artikel atau bagian dalam sebuah buku: Mearsheimer, J. (2003). *The Tragedy of Great Power Politics* (Ed.), *The Primacy of Land Power* (pp. 83 - 103). New York, NY: W.W. Norton & Company, Inc.
- c. Artikel jurnal versi cetak: Ghazali, M., Othman, M. S., Yahya, A. Z., & Ibrahim, M. S. (2008). Products and country of origin effects: The Malaysian consumers' perception. *International Review of Business Research Paper*, 4(2), 91-102.
- d. Artikel jurnal versi elektronik dengan DOI (digital object identifier): WONG, J. (2006). *China-ASEAN Relations: An Economic Perspective*. *China-ASEAN Relations*, 17-32. doi:10.1142/9789812707161\_0002
- e. Artikel jurnal versi elektronik tidak dengan DOI: Stone, R. (2001). *The Use and Abuse of Game Theory in International Relations: The Theory of Moves*. *Journal of Conflict Resolution*. Vol.45 Issue 2, p216 – 244.
- f. Artikel koran atau majalah: Widyastuti, R. S. (2011, Januari 14). Masih sebatas macan kertas. *Kompas*, 34.
- g. Laporan organisasi atau perusahaan:: Bank Indonesia. (2011). *Perekonomian Indonesia tahun 2010*. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia.

## Verity Author Guidelines

Papers submitted should follow the instructions determined by the Verity Editorial Board as follow:

1. Article typed on the A4 paper size with top, bottom, left, and right sides of margin set to 2.5 cm. Article typed using justified format with the 1½ line spacing.
2. The front page containing only the title of the article, the author's name, institution or company where the author is affiliated, correspondence address, and abstracts. The number of pages of the article is no more than 20 pages, including figures, tables, and reference lists. The page numbers are placed at the bottom left corner for the back page and bottom right corner for the right page.
3. Abstract written in English up to 200 words and no more than 5 (five) keywords. Abstract typed using single line spacing and all italicized. Abstracts should state the purpose of research, methods used, results, and contribution.
4. Figures and tables placed in the body of the text. Figures and tables are given numbers using Arabic numbering format (e.g. Figure 1, Table 1, and so on). The title of figures is placed at the bottom of the image, while the title of the table is placed on the top of the table.
5. Article typed using Times New Roman font with the following terms:

	Size	Bold	<i>Italics</i>	Description
Title	14	Yes	No	Centered
Name of authors	12	Yes	No	Centered
Name of institution	12	No	No	Centered
Abstract	10	No	Yes	Justified
Keywords	10	No	Yes	Justified
Heading	12	Yes	No	Justified
Body of the article	12	No	No	Justified
References	12	No	No	Justified; left margin set to 1 cm
Title of figure and table	10	No	No	Centered
Content of figure and table	>8	No	No	-

6. Citations are written using the format of APA Style (6th edition, American Psychological Association). Footnotes are not allowed to be used in the writing of the paper. Here is an example of citations written using APA style:
  - a. One author: (Allison, 2005)
  - b. Two authors: (Allison & Zelikow, 1971)
  - c. More than two authors: (Ghazali et al., 2008)
  - d. Two different citations by different authors: (Ghazali et al., 2008; Danielsson 2009)

e. Two different citations by the same authors: (Lawson, 2003, 2007) If the same publication:  
(Fam, 2008a, 2008b)

f. Institutions: (BI, 2011)

g. Interviews, e-mail correspondence, conversations: (Aldiano, personal communication,  
October 12, 2010)

Reference list must be in English and arranged alphabetically and sequentially using an APA Style (6th edition, American Psychological Association), which can be seen in detail at <https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/05/>. Include digital object identifiers (DOIs) if they have been assigned to the content.

7. Here are examples of references:

a. Book: Allison, G. (1999). *Essence of Decision*. Longman Publication.

b. Article or section in a book: Mearsheimer, J. (2003). *The Tragedy of Great Power Politics* (Ed.), *The Primacy of Land Power* (pp. 83 - 103). New York, NY: W.W. Norton & Company, Inc.

c. Article from printed journal: Ghazali, M., Othman, M. S., Yahya, A. Z., & Ibrahim, M. S. (2008). Products and country of origin effects: The Malaysian consumers' perception. *International Review of Business Research Paper*, 4(2), 91-102.

d. Article from online journal with a DOI (digital object identifier): WONG, J. (2006). *China-ASEAN Relations: An Economic Perspective*. *China-ASEAN Relations*, 17-32. doi:10.1142/9789812707161\_0002

e. Article from online journal without a DOI: Stone, R. (2001). *The Use and Abuse of Game Theory in International Relations: The Theory of Moves*. *Journal of Conflict Resolution*. Vol.45 Issue 2, p216 – 244.

f. Article from newsletter or magazine: Widyastuti, R. S. (2011, Januari 14). *Masih sebatas macan kertas*. *Kompas*, 34.

g. Organization or company report: Bank Indonesia. (2011). *Perekonomian Indonesia tahun 2010*. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia.

## BIODATA KONTRIBUTOR

### **Anak Agung Banyu Perwita**

Anak Agung Banyu Perwita adalah seorang Profesor dalam ilmu Hubungan Internasional, jurusan Hubungan Internasional di President University, Kota Jababeka, Cikarang-Bekasi, Indonesia. Anak Agung Banyu Perwita juga merupakan seorang peneliti senior di President Center for International Studies (PRECIS). Dia meraih gelar MA di Strategic Studies and International Relations dari Lancaster University, UK, yang dibiayai penuh oleh British Chevening Scholarship dan mendapatkan gelar PhD dari Flinders University, Australia, yang dibiayai oleh Australian Development Scholarship. Anak Agung terlibat aktif dengan Kementerian Pertahanan dan Dewan Ketahanan Nasional. Buku terakhir yang ditulis oleh Anak Agung adalah “Maritime Security in the Indo-Pacific” (dalam bahasa Inggris), diterbitkan oleh PT Graha Ilmu Yogyakarta, 2016.

### **Joseph Tertia**

Joseph adalah mantan asisten peneliti di *President Center for International Studies (PRECIS)*, dan memperoleh gelar sarjana dalam Hubungan Internasional dari *School of International Relations*, President University. Saat ini ia bekerja sebagai peneliti di KRA Group - sebuah lembaga urusan publik dan konsultasi risiko politik di Jakarta.

### **Wildan Faisol**

Wildan merupakan seorang asisten dosen di Universitas Indonesia yang fokus pada bidang *International Development Course* dan *International Law Course*. Ia meraih gelar Sarjana Hubungan Internasional di Universitas Jember dan gelar S2 di Universitas Indonesia. Ia juga pernah terlibat sebagai anggota peneliti dari *Junior Researcher of Community Engagement Team from DRPM* Universitas Indonesia.

### **Yuhao Wen**

Yuhan meraih gelar Master of Arts with Honours (Asia-Pacific Studies) di Australian National University, Canberra. Spesialisasi Yuhao adalah tentang Asia Tenggara, Australia dan komunitas etnis Tionghoa di wilayah Asia-Pasifik, khususnya di Indonesia. Ia juga merupakan seorang penerjemah (English-Chinese) bersertifikat dari National Accreditation Authority for Translators and Interpreters. Saat ini, Yuhao merupakan mahasiswa pasca sarjana di Western Sydney University. Karya tulisan dari Yuhao Wen dapat ditemukan di link berikut: <https://works.bepress.com/yuhao-wen/>

### **Michael J. Kristiono**

Kristiono adalah mantan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Berpengalaman dengan tugas di Kedutaan Besar, ditambah dengan statusnya yang lama sebagai anggota aktif diaspora Indonesia, telah menumbuhkan minat akademisnya dalam Hubungan Internasional. Kristiono memperoleh gelar masternya dalam studi Hubungan Internasional di Universitas Indonesia dengan konsentrasi studi transnasional. Setelah kelulusannya, Kristiono terus berkecimpung dengan dunia Hubungan Internasional dengan melakukan penelitian independen. Minat yang ia tekuni saat ini adalah bagaimana berbagai aktor non-negara menggunakan pengaruh pada politik global melalui jaringan budaya dan agama. Saat ini, Kristiono bekerja di



Kamboja dengan berbagai kegiatan bisnis di negara-negara lain sambil mencoba memahami budaya Indocina.

### **Firman Daud Lenjau Lung**

Firman meraih gelar S1 pada program studi Hubungan Internasional di Universitas Pelita Harapan (UPH). Dalam masa perkuliahan, ia mengambil konsentrasi mata kuliah dalam bidang Perdagangan Internasional. Prestasi yang ia miliki menjadi sumbangsih terbesar sehingga menjadi salah satu penerima beasiswa akademik mahasiswa berprestasi di UPH. Minat yang ditekuni oleh Firman adalah dibidang ekonomi politik internasional dan pembangunan internasional. Saat ini ia bekerja sebagai asisten dosen program studi Hubungan Internasional Sarjana Satu di Universitas Pelita Harapan.